LKJIP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI SIDOARJO,

Ahmad Muhdlor Ali

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
IKHTISAR EKSEKUTIF v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO 2
1. Kondisi Geografis 2
2. Kondisi Demografis 9
3. Kondisi Pemerintahan 16
4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 22
5. Kondisi Sarana dan Prasarana 27
BAB II 29
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29
A. RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 - 2021 29
1. VISI DAN MISI 31
2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 37
B. CASCADING KINERJA 55
C. CROSSCUTTING 58
D. PETA PROSES BISNIS 63
E. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020 65
F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 65
BAB III 81
AKUNTABILITAS KINERJA 81
A. CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA 82
B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PER MISI, TUJUAN DAN SASARAN 85
MISI 1 85
MISI 2. 119
MISI 3 136
MISI 4 149
MISI 5 171
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 193
BAB IV 199
PENUTUP DAN KESIMPULAN 199
BAB V 201
PRESTASI DAN PENGHARGAAN 201
Lampiran 1 202

Lampiran 2 203
Lampiran 3 204
Lampiran 4 212
Lampiran 5 215
Lampiran 6 218
Lampiran 7 220
Lampiran 8 222
Lampiran 9 232
Lampiran10……....237
Lampiran 11……...238

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 3
Desa dan Kelurahan per Kecamatan 3
Tabel I.2 5
Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2020 5
Tabel I.3 6
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2020 6
Tabel I.4 6
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2020 6
Tabel I.5 7
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2020 7
Tabel I.6 8
Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 8
Tabel I.7 10
Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kecamatan Tahun 2020 10
Tabel I.8 11
Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 11
Tabel I.9 12
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 12
Tabel I.10 14
Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2020 14
Tabel I.11 15
Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2020 15
3. Kondisi Pemerintahan 16
4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 22
Tabel I.12 22
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 22
Tabel II.1 36
Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 36
Tabel II.2 39
Tabel II.3 48
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 48
Tabel II.4 51
Tema dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 51
Tabel II.5 55
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo 55
Tabel II.6 68
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 68

Tabel III.1 83
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 83
Tabel III-1.1 86
Tabel Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo 86
Tabel III-1.2 86
Pencapaian Kinerja Tujuan 1 86
Tabel III-1.3 87
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 87
Tabel III-1.4 87
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s.d. Akhir Periode RPJMD 87
Tabel III-1.5 87
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 dengan Realisasi Nasional 87
Tabel III-1.6 88
Kategorisasi Penilaian Indeks Good Governance 88
Tabel III-1.7 89
Indeks Reformasi Birokrasi 89
Tabel III-1.8 90
Pencapaian Kinerja Tujuan 1 90
Tabel III-1.9 90
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 90
Tabel III-1.10 90
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s.d. Akhir Periode RPJMD 90
Tabel III-1.11 91
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 dengan Realisasi Nasional 91
Tabel III-1.12 97
Pencapaian Kinerja Sasaran 97
Tabel III-1.13 97
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya 97
Tabel III-1.14 97
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran s.d. Akhir Periode RPJMD 97
Tabel III-1.15 98
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Realisasi Nasional 98
Tabel III-1.16 99
Opini BPK Atas Laporan Keuangan 99
Grafik III-1.C 103
Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo 103
Tabel III-1.17 110
Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo 110

Tabel III-1.18 113
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo 113
Tabel III-2.1 119
Tingkat Keberhasilan Misi 2 119
Tabel III-2.2 120
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 120
Tabel III-2.3 120
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 - 2020 120
Tabel III-2.4 121
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 121
Tabel III-2.5 121
Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dengan Target 2021 121
Tabel III-2.6 122
Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 122
Tabel III-2.7 123
Realisasi Indeks GINI Tahun 2016-2020 123
Tabel III-2.8 123
Perbandingan Indek GINI Tahun 2020 123
Tabel III-2.9 124
Perbandingan Realisasi Indeks GINI Tahun 2020 124
Tabel III-2.10 125
PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 125
Tabel III-2.11 126
Realisasi PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 126
Tabel III-2.12 126
Perbandingan Realisasi PDRB Perkapita Tahun 2020 126
dengan Target 2021 126
Tabel III-2.13 127
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 127
Tabel III-2.14 128
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020 128
Tabel III-2.15 128
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 128
Tabel III-2.16 129
Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 129
Tabel III-2.17 130
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 130
Tabel III-2.18 130
Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2020 130

Tabel III-2.19 131
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 131
Tabel III-2.20 131
Perbandingan Realisasi Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021 131
Tabel III-2.21 133
Presentase Desa Maju Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 133
Tabel III-2.22 134
Indek Desa Maju (IDM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 134
Tabel III-2.23 135
Perbandingan Realisasi Presentase Desa Maju Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021 ... 135
Tabel III-3.1 138
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 138
Tabel III-3.2 138
Rekapitulasi Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Sidoarjo 138
Grafik III-3.A 139
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 139
Tabel III-3.3 140
Nilai Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 140
Tabel III-3.4 141
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo 141
Tabel III-3.5 141
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 141
Tabel III-3.6 142
Tabel Rekapitulasi Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 142
Tabel III-3.7 144
Tabel Rekapitulasi Target dan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Tahun 2016 144
Tabel III-3.8 146
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo 146
Tabel III-4.1 149
Indeks Kebahagiaan 149
Tabel III-4.2 149
Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2020 149
Tabel III-4.3 150
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Dengan Tahun Sebelumnya 150
Tabel III-4.4 150
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan s.d. Akhir Periode RPJMD 150
Tabel III-4.5 150
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dengan Realisasi Nasional 150
Tabel III-4.6 154

Indeks Rasa Aman....154
Tabel III-4.7....154
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020....154
Tabel III-4.8....155
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya....155
Tabel III-4.9....155
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran s.d. Akhir Periode RPJMD....155
Tabel III-4.10....155
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Realisasi Nasional....155
Tabel III-4.11....161
Indeks Resiko Bencana....161
Tabel III-4.12....162
Indeks Realisasi Resiko Bencana 5 Tahunan....162
Tabel III-4.13....169
Indeks Pembangunan Gender....169
Tabel III-5.1....170
Tingkat Keberhasilan Misi 5....170
Tabel III-5.2....171
Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020....171
Tabel III-5.3....172
Realisasi Indeks Infrastruktur Tahun 2016 - 2020....172
Tabel III-5.4....172
Perbandingan Realisasi Infrastruktur Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional....172
Tabel III-5.5....173
Perbandingan Realisasi Infrastruktur Tahun 2020 dengan Target 2021....173
Tabel III-5.6....174
IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020....174
Tabel III-5.7....174
Realisasi IKLH Tahun 2016-2020....174
Tabel III-5.8....175
Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional....175
Tabel III-5.9....175
Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2020 dengan Target 2021....175
Tabel III-5.10....178
Presentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020....178
Tabel III-5.11 Realisasi Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020....178
Tabel III-5.12....178
Perbandingan Realisasi Jalan Kondisi Mantap Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional....178
Tabel III-5.13....179

Perbandingan Realisasi Jalan Kondisi Mantap Tahun 2020 179
Tabel III-5.14 Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir 179
Tabel III-5.15 Realisasi Luas Area Rawan Genangan Banjir Tahun 2016-2020 180
Tabel III-5.16 Perbandingan Realisasi Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir 180
Tabel III-5.17 Perbandingan Realisasi Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir 181
Tabel III-5.18 Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 182
Tabel III-5.19 Peningkatan Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020 183
Tabel III-5.20 Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional 183
Tabel III-5.21 Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2020 184
Tabel III-5.22 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 185
Tabel III-5.23 186
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 186
Tabel III-5.24 187
Tabel III-5.25 Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional 188
Tabel III-5.26 Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 188
Tabel III-5.28 Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .. 189
Tabel III-5.29 191
Tabel III-5.30 Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan/ Vegetasi 192
Tabel III-5.31 Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Vegetasi 192
Tabel III.2 193
Laporan Realisasi Anggaran 193
Tabel III.3 196
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan 196
Tabel III.4 198
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan 198

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 4
Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 4
Grafik I.2 9
Grafik I.3 12
Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2020 12
Grafik I.4 13
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 13
Grafik III-3.A 139
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 139
Grafik III-3.B 143
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah 143
Grafik III-3.C 147
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020 147
Grafik III-4.A 152
Indeks Kebahagiaan Kabupaten 152
Grafik III-4.B 157
Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo 157
Grafik III-4.E 169
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidoarjo 169
Grafik III-5.A Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo 176
Grafik III-5.B Realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo 182
Grafik III-5.C 187
Peningkatan Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2020 187
Grafik III-5.D Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan 190

IKHTISAR EKSEKUTIF

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan"		
	Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	**Indeks Good Governance**	**69.55**
		Indeks Reformasi Birokrasi	**B**
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK	WTP
		Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Status Kinerja EKPPD	ST
		Tingkat Maturitas SPIP	terdefinisi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.65
	Misi 2 : "Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat"		
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	**Pertumbuhan Ekonomi**	**1,4% - 2,5%**
		Indeks GINI	**0.343 - 0.35**
3.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	86.801
4.	Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,82% - 6,47%
		Tingkat Kemiskinan	7,16% - 8,58%
		Persentase Desa Maju	31.68%
	Misi 3 : "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		
	Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**78.84 - 79.50**
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.45 Tahun
		Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10.8 Tahun
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73.69 Tahun
	Misi 4 : "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan,		

	Ketentraman dan Ketertiban"		
	Tujuan 4 : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	**Indeks Kebahagiaan**	**80.47**
7.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Indeks Rasa Aman	76.87
		Indeks Resiko Bencana	113.7
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.65
	Misi 5 : "Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan"		
	Tujuan 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kelestarian Lingkungan Hidup	**Indeks Infrastruktur**	**1.422**
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**53.01**
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Jalan Kondisi Mantap	90%
		Persentase penurunan Luas wilayah Rawan Genangan	65%
9.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	49.05
		Indeks Kualitas Udara	86.26
		Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	31.04

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima (ke – 5) dari periode perencanaan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021. Secara umum tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 dapat tercapai dengan baik, dari 5 tujuan yang mencakup 8 indikator dan 9 sasaran yang mencakup 21 indikator rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **106,01%** atau bermakna **SANGAT BERHASIL**.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 8 Indikator Kinerja Tujuan, 9 Sasaran dan 21

Indikator Kinerja Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran untuk tahun keempat (2020) periode perencanaan RPJMD Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja sasaran :
  - Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Good Governance	Sangat Berhasil
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum ada rilis dari Kemenpan RB

  - Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 6 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Opini Atas Audit BPK	Belum ada rilis dari BPK
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Belum ada rilis dari Kementerian PANRB
3.	Status Kinerja EKPPD	Belum ada rilis dari Kemendagri
4.	Tingkat Maturitas SPIP	Berhasil
5.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sangat Berhasil
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Berhasil

- Misi II terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran :
  - Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Kurang
2.	Indeks GINI	Belum ada rilis dari BPS

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 4 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Pendapatan Perkapita	Berhasil
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Kurang
3.	Tingkat Kemiskinan	Sangat Berhasil
4.	Persentase Desa Maju	Sangat Berhasil

➢ Misi III terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Sangat Berhasil
2.	Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)	Berhasil
3.	Angka Harapan Hidup	Sangat Berhasil

➢ Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Kebahagiaan	Cukup

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 1 sasaran dan 3 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Indeks Rasa Aman	Berhasil
2.	Indeks Resiko Bencana	Berhasil
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Berhasil

➢ Misi V terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Infrastruktur	Berhasil
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 5 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Persentase Jalan Kondisi Mantap	Berhasil
2.	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	Berhasil
3.	Indeks Kualitas Air	Sangat Berhasil
4.	Indeks Kualitas Udara	Berhasil
5.	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Sangat Berhasil

Berkenaan dengan ketercapaian indikator tujuan dan sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

➢ Hasil analisis pencapaian indikator tujuan terhadap 5 (lima) tujuan dengan 8 (delapan) indikator kinerja tujuan, diketahui 2 indikator belum dapat diukur karena belum ada rilis dari kementerian lembaga terkait, sehingga hanya 6 (enam) indikator yang diukur. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, 3 (tiga) indikator atau 50% dinilai Sangat Berhasil, 1 (satu) indikator atau 16,6% dinilai Berhasil, 1 (satu) indikator atau 16,6% dinilai Cukup dan 1 (satu) indikator atau 16,6% dinilai Kurang..

➢ Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 9 (sembilan) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, diketahui bahwa 8 (delapan) indikator atau 44,4

% dinilai Sangat Berhasil, 9 (sembilan) atau 50% dinilai Berhasil, satu indikator dinilai Kurang dan 3 (tiga) indikator atau 15,8% belum ada rilis dari kementerian lembaga terkait. Jadi ada 5 (lima) indikator atau 16% indikator belum bisa diukur dan 2 (dua) indikator kinerja atau 6,5% telah mendapatkan nilai Kurang karena disebabkan pandemi Covid-19. Adapun 2 (dua) indikator kinerja dimaksud adalah Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Pengangguran Terbuka. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 mengalami minus 3,69%, Provinsi Jawa Timur minus 2,39% dan Nasional minus 2,07%. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar 10,97%, dibandingkan dengan Tahun 2019 meningkat sebesar 6,25% dari realisasi capaian Tahun 2019 sebesar 4,72%.

Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 masuk kategori BERHASIL. Walaupun masuk katagori Berhasil, namun demikian capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan dibanding capaian kinerja Tahun 2019 karena akibat dari pandemi Covid-19.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten / Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5’ – 112°9’ Bujur Timur dan 7°3’ – 7°5’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area)* dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel I.1

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	**322**	**31**

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Grafik I.1

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur meliputi 29,99% dari luas wilayah;
- 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar meliputi 40,81% dari luas wilayah; dan
- 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat meliputi 29,20% dari luas wilayah.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten

Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Tabel I.2

Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Tinggi Rata – Rata (m dpl)	luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	4	62.56
2	Buduran	4	41.03
3	Candi	4	40.67
4	Porong	4	29.82
5	Krembung	5	29.55
6	Tulangan	7	31.21
7	Tanggulangin	4	32.29
8	Jabon	2	81.00
9	Krian	12	32.50
10	Balongbendo	20	31.40
11	Wonoayu	4	33.92
12	Tarik	16	36.06
13	Prambon	10	34.23
14	Taman	9	31.54
15	Waru	5	30.32
16	Gedangan	4	24.06
17	Sedati	4	79.43
18	Sukodono	7	32.68
Jumlah			**714.24**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kandungan gas bumi yang dibentuk oleh batuan *alluvium* seluas 686,89 Ha tersebar disemua kecamatan, batuan *plistosen fasien sedimen* terdapat di 6 kecamatan, tanah *alluvial* kelabu merata di 18 kecamatan, *assosiasi alluvial* kelabu dan cokelat kekuningan terdapat di 4 kecamatan, yaitu : Krembung, Balongbendo, Tarik, dan Prambon.

Tabel I.3

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen (Ha)	Alluvium (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	42,00	6.214,00	6.256,00
2	Buduran	1.469,00	2.633,50	4.102,50
3	Candi	-	40,67	4.066,75
4	Porong	-	29,82	2.982,25
5	Krembung	-	29,55	2.955,00
6	Tulangan	-	31,21	3.120,50
7	Tanggulangin	-	32,29	3.229,00
8	Jabon	-	81,00	8.099,75
9	Krian	-	32,50	3.250,00
10	Balongbendo	-	31,40	3.140,00
11	Wonoayu	-	33,92	3.392,00
12	Tarik	-	36,06	3.606,00
13	Prambon	-	34,23	3.422,50
14	Taman	448,00	2.705,50	3.153,50
15	Waru	384,00	2.648,00	3.032,00
16	Gedangan	38,00	2.367,75	2.405,75
17	Sedati	355,00	7.588,00	7.943,00
18	Sukodono	-	32,68	3.267,75
Jumlah		**2.736,00**	**24.602,07**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Tabel I.4

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	2.966,11	-	3.289,89	-	6.256,00
2	Buduran	1.480,02	-	1.853,22	769,26	4.102,50
3	Candi	1.552,88	-	2.513,87	-	4.066,75
4	Porong	2.083,07	-	899,18	-	2982,25
5	Krembung	2.500,95	454,05	-	-	2.955,00
6	Tulangan	3.120,50	-	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	1.564,77	-	1.664,23	-	3.229,00

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
8	Jabon	2.580,20	-	5.519,55	-	8.099,75
9	Krian	3.250,20	-	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	3.250,00	2.795,55	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	3.392,00	-	-	-	3.392,00
12	Tarik	2.618,93	987,07	-	-	3.606,00
13	Prambon	2.688,94	733,56	-	-	3.422,50
14	Taman	3.153,50	-	-	-	3.153,50
15	Waru	2.020,67	-	1.011,33	-	3.032,00
16	Gedangan	2.304,31	-	-	101,44	2.405,75
17	Sedati	3.333,04	-	4.609,96	-	7.943,00
18	Sukodono	3.267,75	-	-	-	3.267,75
Jumlah		**47.017,64**	**4.970,23**	**21.361,23**	**870,70**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter di bawah permukaan tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, banjir periodik di sebagian 5 (lima) kecamatan, dan banjir karena air pasang berada di sebagian 4 (empat) kecamatan.

Tabel I.5

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2020

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4.063,62	308,14	-	-	6.256,00
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krembung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
Total		**16.312,67**	**1.573,75**	**610,40**	**2.018,55**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah di bulan Agustus.

Tabel I.6

Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

No	Lokasi Penakar Hujan	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Kemlaten	226.0	442.0	152.0	229.0	-	16.0	-	-	-	-	91.8	374.0
2	Ponokawan	196.0	909.0	313.0	189.0	-	23.0	-	-	-	-	231.0	222.0
3	Bakalan	261.0	470.0	268.0	109.0	-	18.0	-	-	-	-	182.0	197.0
4	Krian	173.0	377.0	325.0	175.0	-	20.0	-	-	-	-	216.0	198.0
5	Ketawang	280.0	450.0	318.0	135.0	-	27.0	-	-	-	-	242.5	223.5
6	Ketintang	250.0	483.0	252.0	234.0	-	24.0	-	-	-	-	130.2	234.0
7	Watutulis	238.0	398.0	228.0	178.0	-	20.0	-	-	-	-	290.0	243.0
8	Pertapan Maduretno	242.0	436.0	361.0	111.8	-	27.0	-	-	-	-	236.0	279.0
9	Cepiples	159.0	361.0	191.0	136.0	-	18.0	-	-	-	-	25.0	220.0
10	Luwung	176.0	438.0	228.0	183.0	-	20.0	-	-	-	-	42.0	241.0
11	Gedangrowo	111.1	322.0	144.0	166.0	-	15.0	-	-	-	-	98.0	121.0
12	Prambon	136.0	438.0	169.0	138.0	-	19.0	-	-	-	-	143.0	181.0
13	Botokan	292.0	529.0	410.0	174.0	-	32.0	-	-	-	-	191.0	214.0
14	Durungbedug	253.0	583.0	196.0	217.0	-	31.0	-	-	-	-	174.0	157.0
15	Bono	301.0	432.0	497.0	124.0	-	53.0	-	-	-	-	126.0	187.0
16	Sruni	359.0	578.0	523.0	147.0	-	35.0	-	-	-	-	240.0	278.0
17	Sedati	346.0	336.0	457.0	257.0	-	49.0	-	-	-	-	76.0	207.0
18	Bankar Kemantren	227.0	548.0	453.0	191.0	-	27.0	-	-	-	-	203.0	337.0
19	Ketegan	406.0	473.0	539.0	292.0	-	60.0	-	-	-	-	74.0	379.0
20	Sumput	66.0	295.0	91.0	47.0	-	4.0	-	-	-	-	62.0	135.0
21	Klagen	256.0	269.0	76.0	88.0	-	5.0	-	-	-	-	287.0	229.0
22	Karangnongko	267.0	543.0	248.0	111.0	-	22.0	-	-	-	-	145.0	163.0
23	Sidoarjo	-	490.0	247.0	235.0	-	36.0	-	-	-	-	119.0	209.0
24	Kludan	201.0	441.0	344.0	167.0	-	15.0	-	-	-	-	67.0	254.0

No	Lokasi Penakar Hujan	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
25	Putat	284.0	518.0	334.0	138.0	-	-	-	-	-	-	44.0	211.0
26	Kedung Cangkring	152.0	371.0	248.0	37.0	-	-	-	-	-	-	48.0	80.0
27	Porong	189.0	423.0	259.0	65.0	-	14.0	-	-	-	-	68.0	125.0
28	Krembung / Biting	129.0	391.0	80.0	122.0	-	4.0	-	-	-	-	49.0	98.0
29	Bedugbulus	140.0	399.0	113.0	168.0	-	5.0	-	-	-	-	136.0	154.0
30	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata		**217.8**	**453.2**	**278.1**	**155.6**	**0.0**	**22.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**141.4**	**210.6**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

2. Kondisi Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2020, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.266.533 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik I.2

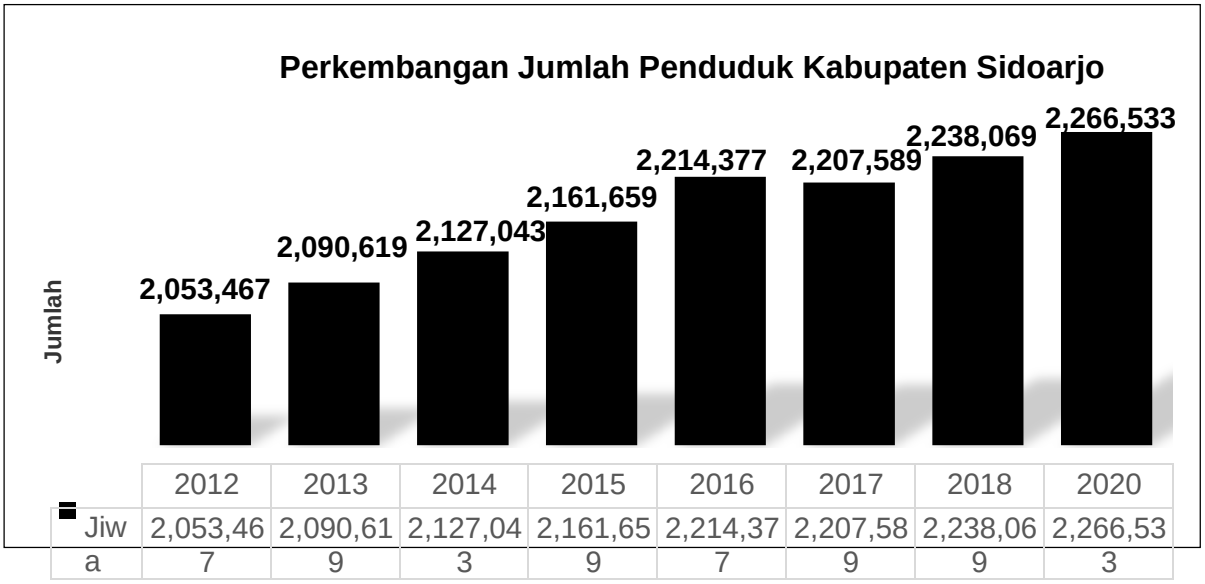

Sumber data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 240.674 jiwa, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 61.092 jiwa. Jumlah penduduk per Kecamatan dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.7

Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	TARIK	69.189	22.614
2	PRAMBON	79.952	26.231
3	KREMBUNG	69.887	22.530
4	PORONG	73.446	23.892
5	JABON	56.266	18.167
6	TANGGULANGIN	89.804	27.919
7	CANDI	153.423	47.630
8	SIDOARJO	201.115	63.231
9	TULANGAN	102.339	33.586
10	WONOAYU	85.586	27.367
11	KRIAN	130.930	41.659
12	BALONGBENDO	76.050	24.744
13	TAMAN	207.815	66.235
14	SUKODONO	121.859	37.716
15	BUDURAN	98.710	30.780
16	GEDANGAN	120.003	37.218
17	SEDATI	96.636	30.587
18	WARU	200.754	64.919
	T O T A L	**2.033.764**	**647.025**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.8

Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	34.830	34.359	69.189
2	PRAMBON	40.397	39.555	79.952
3	KREMBUNG	35.024	34.863	69.887
4	PORONG	37.102	36.344	73.446
5	JABON	28.274	27.992	56.266
6	TANGGULANGIN	45.097	44.707	89.804
7	CANDI	76.872	76.551	153.423
8	SIDOARJO	100.000	101.115	201.115
9	TULANGAN	51.423	50.916	102.339
10	WONOAYU	43.169	42.417	85.586
11	KRIAN	66.413	64.517	130.930
12	BALONGBENDO	38.449	37.601	76.050
13	TAMAN	104.753	103.062	207.815
14	SUKODONO	61.855	60.004	121.859
15	BUDURAN	49.710	49.000	98.710
16	GEDANGAN	60.286	59.717	120.003
17	SEDATI	48.821	47.815	96.636
18	WARU	99.933	100.821	200.754
	T O T A L	**1.022.408**	**1.011.356**	**2.033.764**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya

usia tua. Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 35 tahun sampai dengan 39 tahun.

Grafik I.3

Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2020

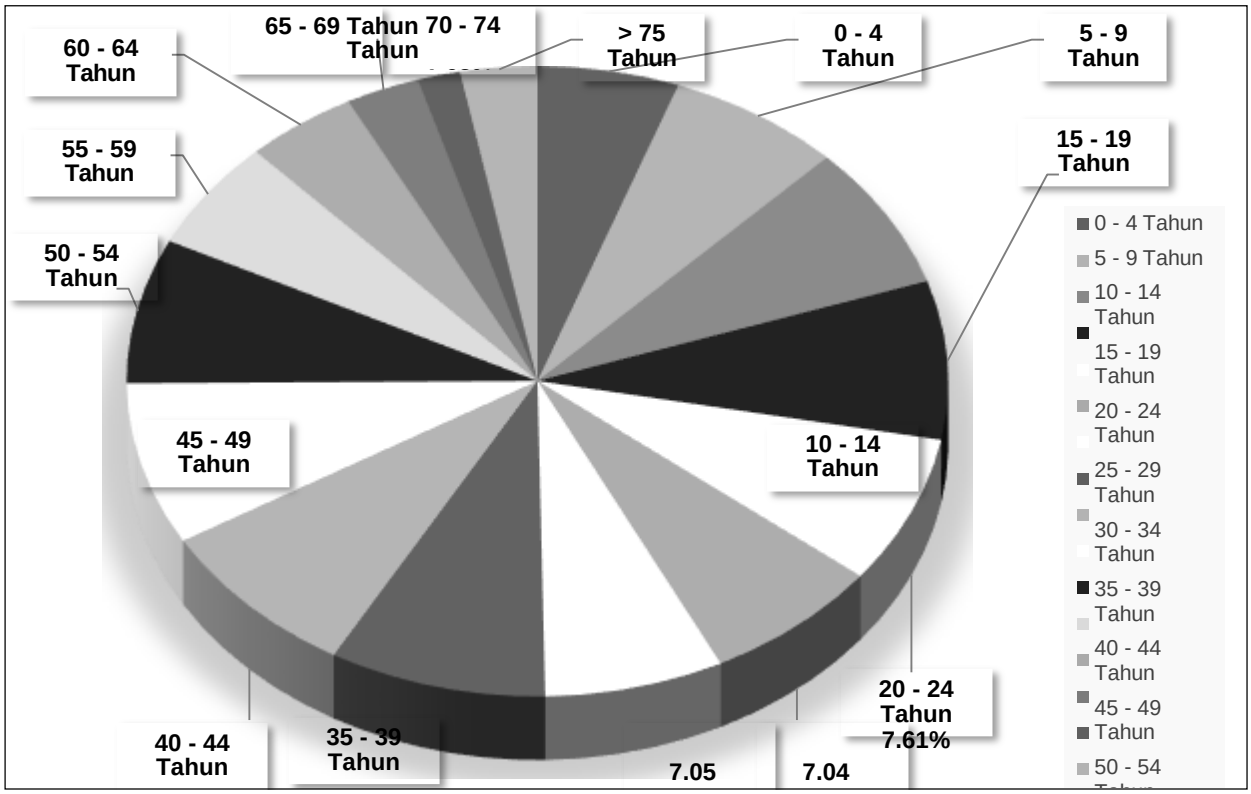

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel I.9

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0 - 4	63.703	58.934	122.637
2.	5 - 9	78.832	73.831	152.663
3.	10 - 14	83.399	77.919	161.318
4.	15 - 19	84.004	78.791	162.759
5.	20 - 24	78.213	75.501	153.714
6.	25 - 29	76.534	74.137	150.671
7.	30 - 34	71.090	68.943	140.033
8.	35 - 39	81.037	81.627	162.664

9.	40 - 44	77.345	81.097	158.442
10.	45 - 49	77.427	82.760	160.187
11.	50 - 54	73.300	75.310	148.610
12.	55 - 59	58.374	62.394	120.768
13.	60 - 64	48.478	46.929	95.407
14.	65 - 69	32.586	29.239	61.825
15.	70 - 74	15.475	17.303	32.778
16.	>75	22.611	26.641	49.252
TOTAL		**1,142,655**	**1.022.408**	**1.011.356**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.142.655 jiwa atau 50,41%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.123.878 jiwa atau 49,59%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Grafik I.4

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sumber : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan Lulusan SMA Sederajat, yaitu 42,04% dari jumlah penduduk. Meski demikian, masih ada 25,20% penduduk Kabupaten Sidoarjo yang masih berpendidikan rendah atau Lulusan SD Sederajat.

Komposisi penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel berikut :

Tabel I.10

Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	TDK/BLM SEKOLAH	BLM TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SD/ SEDERAJAT	SLTP/SED ERAJAT	SLTA/SE DERAJAT	D-I/II	AKADEMI/D-III/ SARJANA MUDA	D-IV/S-I	S-II	S-III	TOTAL
1.	TARIK	14.000	4.984	16.359	13.390	17.673	145	496	2.067	72	3	**69.189**
2.	PRAMBON	14.197	6.588	18.477	14.201	22.597	180	690	2.930	88	4	**79.952**
3.	KREMBUNG	13.414	6.562	13.825	12.630	20.042	174	677	2.473	87	3	**69.887**
4.	PORONG	20.476	1.794	15.643	12.682	19.207	121	623	2.775	120	5	**73.446**
5.	JABON	12.605	2.980	13.945	10.911	13.584	108	449	1.630	49	5	**56.266**
6.	TANGGULANGIN	19.958	5.489	17.070	15.417	25.717	187	1.024	4.737	201	4	**89.804**
7.	CANDI	31.829	14.202	25.530	21.222	44.841	469	2.632	12.031	627	40	**153.423**
8.	SIDOARJO	44.243	13.853	27.411	24.501	58.968	825	4.811	24.910	1.523	70	**201.115**
9.	TULANGAN	19.302	9.500	18.719	17.054	31.518	217	1.119	4.747	161	2	**102.339**
10.	WONOAYU	21.176	4.322	20.446	13.367	21.721	184	760	3.474	131	5	**85.586**
11.	KRIAN	27.335	11.420	25.297	20.737	37.012	349	1.645	6.879	248	8	**130.930**
12.	BALONGBENDO	18.086	4.660	16.246	13.794	19.762	174	600	2.643	84	1	**76.050**
13.	TAMAN	36.331	20.240	30.543	28.769	68.332	1.219	4.200	17.018	1.076	87	**207.815**
14.	SUKODONO	25.096	9.503	19.120	17.342	38.261	515	2.041	9.519	437	25	**121.859**
15.	BUDURAN	19.340	8.982	12.972	14.106	31.061	365	1.884	9.401	578	21	**98.710**
16.	GEDANGAN	29.664	6.875	16.815	16.547	36.505	428	2.205	10.373	563	28	**120.003**
17.	SEDATI	19.950	7.264	15.429	13.056	30.326	358	1.840	7.734	652	27	**96.636**
18.	WARU	42.105	15.550	23.441	25.481	62.121	674	4.438	24.993	1.856	95	**200.754**
TOTAL		429.107	154.768	347.288	305.207	599.248	6.692	32.134	150.334	8.553	433	**2.033.764**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.11

Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2020

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	615.678	45.	USTADZ/MUBALIGH	126
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	118.096	46.	JURU MASAK	35
3	PELAJAR/MAHASISWA	325.217	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	15.685	48.	ANGGOTA DPR RI	5
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	27.382	49.	ANGGOTA DPD RI	2
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	13.915	50.	ANGGOTA BPK	2
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	4.655	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	17.764	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	41.640	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	2
10	PETERNAK	48	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	787	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	166	56.	GUBERNUR	0
13	KONSTRUKSI	192	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	189	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	718.225	59.	WAKIL BUPATI	1
16	KARYAWAN BUMN	5.685	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	562	61.	WAKIL WALIKOTA	1
18	KARYAWAN HONORER	689	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.759	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	20
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.966	64.	DOSEN	3,145
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	65.	GURU	22,064
22	BURUH PETERNAKAN	17	66.	PILOT	38
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	326	67.	PENGACARA	131
24	TUKANG CUKUR	20	68.	NOTARIS	93
25	TUKANG LISTRIK	65	69.	ARSITEK	42
26	TUKANG BATU	1.046	70.	AKUNTAN	21
27	TUKANG KAYU	212	71.	KONSULTAN	76
28	TUKANG SOL SEPATU	26	72.	DOKTER	1,647
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	102	73.	BIDAN	1,317
30	TUKANG JAHIT	429	74.	PERAWAT	2,345
31	TUKANG GIGI	4	75.	APOTEKER	183
32	PENATA RIAS	48	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	16

33	PENATA BUSANA	6	77.	PENYIAR TELEVISI	1
34	PENATA RAMBUT	36	78.	PENYIAR RADIO	4
35	MEKANIK	240	79.	PELAUT	245
36	SENIMAN	72	80.	PENELITI	7
37	TABIB	18	81.	SOPIR	3.445
38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	9	83.	PARANORMAL	10
40	PENTERJEMAH	6	84.	PEDAGANG	13.434
41	IMAM MASJID	5	85.	PERANGKAT DESA	2.442
42	PENDETA	131	86.	KEPALA DESA	219
43	PASTOR	4	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	8
44	WARTAWAN	155	88.	WIRASWASTA	70.280
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	248
				JUMLAH	**2.033.764**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebesar 35,12%. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 3,05%, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebesar 2,15%, yang berkutat pada bisnis perdagangan sebesar 1,11%, dan pedagang sebesar 0,66%. Komposisi penduduk menurut mata pencaharisan ini tidak lepas dari struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

3. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah.

  Sekretariat Daerah, terdiri dari :

  a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
     1. Bagian Pemerintahan
     2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
     3. Bagian Hukum

  b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
     1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
     2. Bagian Pembangunan
     3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

  c. Asisten Administrasi Umum
     1. Bagian Organisasi
     2. Bagian Umum
     3. Bagian Protokol dan Rumah Tangga

- Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
- Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
- Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

  1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;
4) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan, pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi, serta sub urusan penataan ruang;
5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

10) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

- Badan Daerah terdiri dari :
  1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan;
  3) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
  4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- Kecamatan, yang terdiri dari 18 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain :
  1) Kecamatan Sidoarjo dengan Tipe A;
  2) Kecamatan Candi dengan Tipe A;
  3) Kecamatan Buduran dengan Tipe A;
  4) Kecamatan Gedangan dengan Tipe A;
  5) Kecamatan Sedati dengan Tipe A;
  6) Kecamatan Waru dengan Tipe A;
  7) Kecamatan Taman dengan Tipe A;
  8) Kecamatan Krian dengan Tipe A;
  9) Kecamatan Wonoayu dengan Tipe A;
  10) Kecamatan Sukodono dengan Tipe A;
  11) Kecamatan Balongbendo dengan Tipe A;
  12) Kecamatan Tarik dengan Tipe A;
  13) Kecamatan Tulangan dengan Tipe A;
  14) Kecamatan Prambon dengan Tipe A;

15) Kecamatan Krembung dengan Tipe A;
16) Kecamatan Tanggulangin dengan Tipe A;
17) Kecamatan Jabon dengan Tipe A;
18) Kecamatan Porong dengan Tipe A.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf ahli dimaksud antara lain :

1) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
2) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
3) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM

4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2020 sebanyak 11.294 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

Tabel I.12

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

NO	UNIT KERJA	JABATAN STRUKTURAL YANG HARUS ADA	JABATAN STRUKTURAL YANG ADA	NON STRUKTURAL (STAF)	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH PEGAWAI
					JUMLAH	NAMA JABATAN	
1	SEKRETARIAT DAERAH	41	40	128	4	PRANATA KOMPUTER	172
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	18	15	46	3	ASSESSOR SDM APARATUR	69
					3	PRANATA KOMPUTER	
					1	ARSIPARIS	
					1	ANALIS KEPEGAWAIAN	
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	11	22	1	PRANATA KOMPUTER	34
4	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	16	13	59	1	PRANATA KOMPUTER	73
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	12	64	1	PRANATA KOMPUTER	77
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17	15	42	0		57

7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21	18	24	1	PRANATA KOMPUTER	51
					2	PENELITI	
					5	PERENCANA	
					1	STATISTISI	
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17	13	50	1	PRANATA KOMPUTER	64
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21	16	31	3	PRANATA KOMPUTER	51
					1	ARSIPARIS	
10	DINAS KESEHATAN	49	47	290	1	ADMINISTRATOR KESEHATAN	1.461
					7	APOTEKER	
					53	ASISTEN APOTEKER	
					416	BIDAN	
					36	DOKTER GIGI	
					125	DOKTER UMUM	
					37	NUTRISIONIS	
					318	PERAWAT	
					42	PERAWAT GIGI	
					7	PRANATA KOMPUTER	
					53	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	
					1	REFRAKSIONIS	
					25	SANITARIAN	
					3	TEKNISI ELEKTROMEDIS	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20	17	32	3	PRANATA KOMPUTER	55
					3	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	15	12	21	1	PRANATA KOMPUTER	34
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	23	22	280	1	PRANATA KOMPUTER	305
					2	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
14	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	27	20	67	3	MEDIK VETERINER	144
					2	PARAMEDIK VETERINER	
					51	PENYULUH PERTANIAN	

					1	PRANATA KOMPUTER	
15	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	21	18	134	1	ARSIPARIS	157
					2	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	
					1	TEKNIK PENGAIRAN	
					1	PRANATA KOMPUTER	
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17	17	31	1	ARSIPARIS	50
					1	PRANATA KOMPUTER	
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27	25	550	67	GURU AGAMA ISLAM	6.269
					43	GURU PENJASKES	
					3.148	GURU KELAS	
					1.847	GURU MATA PELAJARAN	
					507	KEPALA SEKOLAH	
					21	PENGAWAS DIKMENUM	
					41	PENGAWAS TK/SD	
					7	PENILIK DIKMAS	
					2	PRANATA KOMPUTER	
					9	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	
					1	FISIOTERAPIS	
					1	PSIKOLOGI KLINIS	
18	DINAS PERHUBUNGAN	23	18	58	16	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	93
					1	PRANATA KOMPUTER	
19	DINAS PERIKANAN	15	14	27	1	PRANATA KOMPUTER	42
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21	18	158	1	PRANATA KOMPUTER	188
					3	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					8	PENERA	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14	13	17	4	ARSIPARIS	38
					4	PUSTAKAWAN	

22	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARY DAN TATA RUANG	23	19	40	2	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	61
23	DINAS SOSIAL	16	13	20	1	PRANATA KOMPUTER	34
24	DINAS TENAGA KERJA	15	13	17	6	MEDIATOR HUBUNGA N INDUSTRI AL	38
					2	PENGANTAR KERJA	
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	16	23	1	PRANATA KOMPUTER	40
26	INSPEKTORAT	9	8	19	32	AUDITOR	62
					2	AUDITOR KEPEGAWAIAN	
					1	ARSIPARIS	
27	KECAMATAN BALONGBENDO	10	9	19	1	PRANATA KOMPUTER	29
28	KECAMATAN BUDURAN	10	9	18	1	PRANATA KOMPUTER	28
29	KECAMATAN CANDI	10	7	23	1	PRANATA KOMPUTER	31
30	KECAMATAN GEDANGAN	10	6	19	1	PRANATA KOMPUTER	26
31	KECAMATAN JABON	10	8	14	1	PRANATA KOMPUTER	23
32	KECAMATAN KREMBUNG	10	9	22	1	PRANATA KOMPUTER	32
33	KECAMATAN KRIAN	25	17	24	0		41
34	KECAMATAN PORONG	35	12	29	1	PRANATA KOMPUTER	42
35	KECAMATAN PRAMBON	10	8	22	1	PRANATA KOMPUTERA	31
36	KECAMATAN SEDATI	10	9	20	1	PRANATA KOMPUTER	30
37	KECAMATAN SIDOARJO	80	44	73	1	PRANATA KOMPUTER	118
38	KECAMATAN SUKODONO	10	8	20	1	PRANATA KOMPUTER	29
39	KECAMATAN TAMAN	50	28	37	1	PRANATA KOMPUTER	66
40	KECAMATAN TANGGULANGIN	10	8	21	1	PRANATA KOMPUTER	30
41	KECAMATAN TARIK	10	7	19	1	PRANATA KOMPUTER	27
42	KECAMATAN TULANGAN	10	5	29	1	PRANATA KOMPUTER	35

43	KECAMATAN WARU	10	8	20	1	PRANATA KOMPUTER	29
44	KECAMATAN WONOAYU	10	9	23	1	PRANATA KOMPUTER	33
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	29	29	181	5	ADMINISTRATOR KESEHATAN	692
					6	APOTEKER	
					32	ASISTEN APOTEKER	
					19	BIDAN	
					4	DOKTER GIGI	
					4	DOKTER PENDIDIK KLINIS	
					60	DOKTER SPESIALIS	
					9	DOKTER UMUM	
					8	FISIOTERAPIS	
					17	NUTRISIONIS	
					263	PERAWAT	
					2	PERAWAT GIGI	
					7	PEREKAM MEDIS	
					1	PRANATA KOMPUTER	
					24	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	
					11	RADIOGRAFER	
					1	REFRAKSIONIS	
					2	SANITARIAN	
					7	TEKNISI ELEKTROMEDIS	
46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	12	94	1	ARSIPARIS	108
					1	PRANATA KOMPUTER	
47	SEKRETARIAT DPRD	15	15	41	1	ARSIPARIS	58
					1	PRANATA KOMPUTER	
48	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	5	2	0	0		2
49	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	16	15	22	1	PRANATA KOMPUTER	38
	JUMLAH						11.294

Sumber Data : BKD Kab. Sidoarjo

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain itu instrumen penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana untuk setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut :

NO	OPD	BARANG (UNIT)			NILAI (Rp)		
		BAIK	RUSAK BERAT (Aset Lainnya)	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT (Aset Lainnya)	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	5,012	1,079	6,091	120,522,267,225.56	5,793,812,713.49	126,316,079,939.05
2	Sekretariat DRPD	4,020	227	4,247	49,289,385,256.00	922,739,810.00	50,212,125,066.00
3	Inspektorat	677	199	876	21,026,668,159.26	614,979,015.00	21,641,647,174.26
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203,368	43,349	246,717	2,083,766,094,442.56	114,294,353,886.64	2,198,060,448,329.20
5	Dinas Kesehatan	26,844	11,827	38,671	379,516,062,232.51	32,381,428,150.20	411,897,490,382.71
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,864	1,217	5,081	11,103,955,787,720.40	272,032,186,665.51	11,375,987,974,385.90
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	2,056	169	2,225	1,010,830,321,840.76	5,414,202,190.00	1,016,244,524,030.76
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1,013	46	1,059	25,670,569,216.80	423,395,270.00	26,093,964,486.80
9	Dinas Sosial	1,237	127	1,364	27,815,216,489.91	1,403,185,729.67	29,218,402,219.58
10	Dinas Tenaga Kerja	535	228	763	7,367,463,477.00	1,479,245,393.10	8,846,708,870.10
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keluarga Berencana	1,347	704	2,051	19,500,490,948.00	3,103,368,451.00	22,603,859,399.00
12	Dinas Pangan dan Pertanian	2,226	3	2,229	79,110,954,510.94	1,378,216,449.89	80,489,170,960.83
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6,344	1,117	7,461	663,816,811,786.53	16,501,426,880.34	680,318,238,666.87
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	936	147	1,083	20,664,284,843.72	2,220,417,419.28	22,884,702,263.00
15	Dinas Perhubungan	4,828	1,285	6,113	106,964,824,562.20	6,168,359,070.10	113,133,183,632.30
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,114	157	1,271	33,134,774,543.34	1,105,875,270.00	34,240,649,813.34
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	490	81	571	14,220,452,824.16	344,245,382.00	14,564,698,206.16
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,616	181	1,797	151,403,824,779.98	934,186,261.00	152,338,011,040.98

19	Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	920	1,029	1,949	224,964,261,297.32	21,663,668,563.00	246,627,929,860.32
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32,049	7,540	39,589	27,484,748,857.44	1,138,078,490.56	28,622,827,348.00
21	Dinas Perikanan	1,597	78	1,675	212,226,334,001.31	3,471,952,724.00	215,698,286,725.31
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,656	666	3,322	472,318,995,896.85	4,919,471,065.44	477,238,466,962.29
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,384	253	1,637	10,950,423,754.00	2,042,258,353.00	12,992,682,107.00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,616	217	1,833	172,623,406,918.45	5,685,721,526.00	178,309,128,444.45
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	2,007	325	2,332	30,516,670,542.22	1,860,853,280.00	32,377,523,822.22
26	Badan Kepegawaian Daerah	1,604	433	2,037	34,355,448,316.00	2,192,347,990.00	36,547,796,306.00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,245	31	1,276	12,513,350,255.27	212,842,800.00	12,726,193,055.27
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,038	377	1,415	41,337,699,378.37	7,042,628,313.45	48,380,327,691.82
29	Rumah Sakit Umum Daerah	25,997	8,740	34,737	935,588,210,787.02	35,698,654,043.31	971,286,864,830.33
30	Kecamatan Sidoarjo	3,008	214	3,222	140,671,483,057.84	461,412,800.00	141,132,895,857.84
31	Kecamatan Candi	660	151	811	9,489,313,782.71	436,313,436.84	9,925,627,219.55
32	Kecamatan Buduran	694	99	793	5,818,018,767.00	256,609,446.84	6,074,628,213.84
33	Kecamatan Gedangan	366	122	488	7,005,902,021.00	266,662,543.84	7,272,564,564.84
34	Kecamatan Sedati	501	314	815	5,546,227,233.00	534,907,004.84	6,081,134,237.84
35	Kecamatan Waru	735	158	893	10,805,525,561.75	244,636,286.80	11,050,161,848.55
36	Kecamatan Taman	2,268	226	2,494	113,650,611,958.00	1,705,767,336.84	115,356,379,294.84
37	Kecamatan Krian	1,273	51	1,324	61,210,033,491.00	685,005,550.84	61,895,039,041.84
38	Kecamatan Wonoayu	732	161	893	6,374,757,403.00	342,022,486.84	6,716,779,889.84
39	Kecamatan Sukodono	802	43	845	8,573,541,428.84	139,343,765.00	8,712,885,193.84
40	Kecamatan Balongbendo	479	156	635	8,509,143,773.00	288,161,786.84	8,797,305,559.84
41	Kecamatan Tarik	743	282	1,025	7,888,095,928.84	194,688,298.00	8,082,784,226.84
42	Kecamatan Tulangan	505	11	516	7,795,091,672.00	88,588,000.00	7,883,679,672.00
43	Kecamatan Prambon	940	43	983	8,063,649,897.54	221,331,036.84	8,284,980,934.38
44	Kecamatan Krembung	636	18	654	7,786,431,258.84	47,964,000.00	7,834,395,258.84
45	Kecamatan Tanggulangin	917	33	950	7,808,291,668.04	403,465,450.00	8,211,757,118.04

46	Kecamatan Jabon	261	65	326	7,630,497,622.00	124,239,986.84	7,754,737,608.84
47	Kecamatan Porong	791	169	960	28,767,544,972.37	1,983,410,300.00	30,750,955,272.37
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	424	65	489	3,636,108,795.00	348,923,000.00	3,985,031,795.00
	TOTAL	356,375	84,213	440,588	18,550,486,075,155.60	561,217,553,673.18	19,111,703,628,828.80

Sumber Data : BPKAD Kab. Sidoarjo

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 - 2021

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Sidoarjo berawal dari isu strategis sebagai berikut :

1. Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan;
2. Lemahnya inovasi untuk menunjang pelayanan publik pada penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa;
3. Kualitas dan pemerataan pendidikan rendah;
4. Belum optimalnya layanan dan Akses Kesehatan;
5. Rendahnya aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin;
6. Perselisihan perusahaan dan tenaga kerja meningkat;
7. Komitmen Terhadap Reformasi Birokrasi;
8. Letak Kabupaten yang Strategis dengan ibukota provinsi dan wilayah Gerbangkertasusila;
9. Iklim investasi yang Kondusif;
10. Pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam seiring dengan pesatnya sektor industri dan perdagangan

11. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan
12. Pencegahan konflik berbau SARA, dan Politik
13. Sarana dan prasarana kegiatan Kepemudaan yang masih minim
14. Degradasi Kebudayaan Lokal
15. Jumlah PMKS yang meningkat
16. Belum berkembangnya sektor industri kreatif dalam mendorong sektor pariwisata
17. Potensi Unggulan pada Sektor Industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perikanan
18. Peningkatan pada penerimaan Retribusi dan pajak daerah
19. Afirmasi pusat terhadap infrastruktur
20. Arah dan Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Industri Ramah Lingkungan
21. Belum produktifnya usaha ekonomi dan Kemandirian Pemerintahan Desa
22. Penanggulangan Banjir
23. Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama dengan Swasta
24. Penanggulangan kemiskinan
25. LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
26. Interchanges Tol dengan kawasan wilaah barat sidoarjo
27. Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT)
28. RTRW
29. Program 100-0-100
30. Frontage Road (FR)
31. Pelayanan Persampahan
32. Pengembangan kawasan geowisata
33. Pengembangan kawasan aerocity / aerotropolis
34. Smart City
35. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
36. Limbah domestik
37. Kemacetan

38. Permukiman
39. Pencemaran industri
40. Lemahnya UMKM
41. Pasar tradisional

1. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.

a. Visi

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Tahun 2010 - 2015, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2016 – 2021. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 – 2021, yaitu :

" KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN".

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut:

- ***Inovatif*** ; Melakukan proses pembangunan dengan menerapkan berbagai inovasi di bidang pembangunan fisik dan non fisik untuk

mendukung akselerasi pembangunan menuju Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

- ***Sejahtera*** ; Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
- ***Mandiri*** ; Cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
- ***Berkelanjutan*** ; Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen global tentang *climate change*.

b. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut :

MISI	UNSUR VISI	PENJABARAN
Misi 1	Mandiri	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan
Misi 2	Mandiri	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat
Misi 3	Sejahtera	Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan
Misi 4	Sejahtera	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
Misi 5	Berkelanjutan	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 5 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.

Salah satu tolok ukur terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Good Governance dan Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I Kabupaten Sidoarjo difokuskan untuk pencapaian tujuan diatas, dengan menetapkan 2 sasaran yakni Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi; .

Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai Misi II ditetapkan 1 Tujuan dan 2 Sasaran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut dapat dicapai melalui 2 sasaran yaitu Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Misi 3: Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Misi III Kabupaten Sidoarjo terfokus terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan Misi III. Berdasarkan 3 indeks pembentuk IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan secara representatif menggambarkan pencapaian IPM pada Misi III. Selain itu sasaran diarahkan terhadap pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Misi 4: Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.

Perspektif Misi IV lebih diarahkan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat, yang menggunakan tolok ukur capaian dengan menggunakan Indeks Kebahagiaan, Indeks Rasa Aman, Indeks Resiko Bencana, dan Indeks Pembangunan Gender. Misi IV dapat dicapai dengan meningkatkan harmonisasi dan keamanan sosial.

Misi 5: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi terakhir adalah terfokus terhadap peningkatan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi, namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan

Menindaklanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2021, maka disusunlah konsep kerangka yang merupakan kerangka arsitektur kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2021. Kerangka kinerja yang juga sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.1

Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

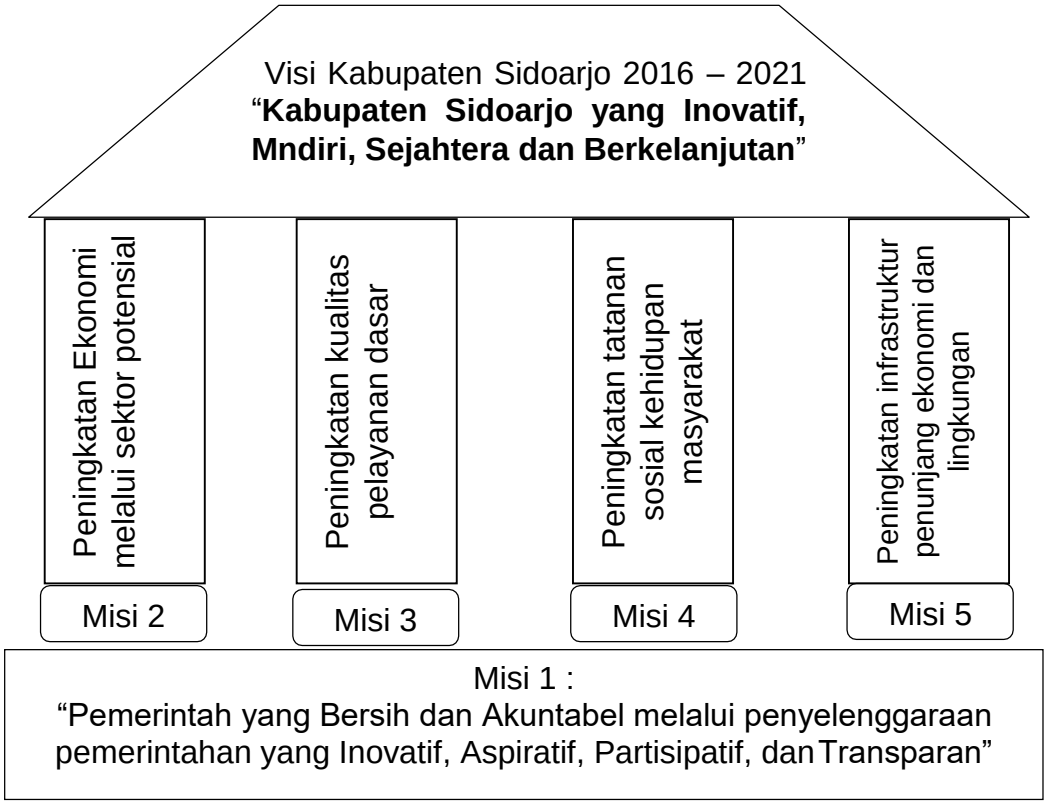

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, juga dipaparkan 10 (sepuluh) Program Prioritas Bupati yang antara lain, sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar 9 Tahun gratis dan berkualitas
2. Percepatan pembangunan infrastruktur, seperti gedung pemerintahan satu atap, frontage road, penanganan banjir, dan lain sebagainya
3. Pembangunan RSUD wilayah barat
4. Pembangunan Eco Industry
5. Penguatan kemandirian desa
6. Sidoarjo "Smart City"
7. Pengelolaan lingkungan yang sehat dan terintegratif
8. Modernisasi pasar tradisional
9. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan

10. Beasiswa pelajar berprestasi dan pasca sarjana bagi pendidik

2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan 5 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :

a) Tujuan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan.
   Indikator kinerja :
   a. Indeks Good Governance
   b. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing
   Indikator kinerja :
   a. Pertumbuhan Ekonomi
   b. Indeks GINI
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
   Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan
   Indikator : Indeks Kebahagiaan
5. Meningkatakan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup
   Indikator :
   a. Indeks Infrastruktur
   b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

b) Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.
   Indikator kinerja :
   a. Opini Atas Audit BPK
   b. Nilai SAKIP Kabupaten
   c. Status Kinerja EKPPD
   d. Tingkat Maturitas SPIP
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.
   Indikator kinerja :
   a. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
   b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
   Indikator kinerja : PDRB Perkapita
4. Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat
   Indikator kinerja :
   a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
   b. Tingkat Kemiskinan
   c. Persentase Desa Maju
5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
   Indikator kinerja :
   a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
   b. Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   Indikator kinerja : Angka Harapan Hidup
7. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum yang berkeadilan
   Indikator kinerja :
   a. Indeks Rasa Aman
   b. Indeks Resiko Bencana
   c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

   Indikator kinerja :

   a. Persentase Jalan Kondisi Mantap
   b. Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir

9. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

   Indikator kinerja :

   a. Indeks Kualitas Air
   b. Indeks Kualitas Udara
   c. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator keberhasilannya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tabel :

Tabel II.2

Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.	T.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	1. Indeks Good Governance	S1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Opini atas audit BPK
					2. Nilai SAKIP Kabupaten
					3. Nilai Kinerja EKPPD
					4. Tingkat Maturitas SPIP
			2. Indeks Reformasi Birokrasi	S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
					2. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan,	T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	1. Pertumbuhan Ekonomi	S.3 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita
			2. Indeks GINI	S.4 Meningkatnya Pemerataan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka

	pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat			Distribusi Pendapatan Masyarakat	2. Tingkat Kemiskinan
					3. Persentase Desa Maju
3	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	T.3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	S.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
					2. Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS)
				S.6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
4	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.	T.4 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	Indeks Kebahagiaan	S. 7 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	1. Indeks Rasa Aman
					2. Indeks Resiko Bencana
					3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	T.5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Infrastruktur	S.8 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1. Persentase Jalan Kondisi Mantap
					2. Persentase Luas area rawan genangan banjir
			2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	S.9 Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air
					2. Indeks Kualitas Udara
					3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

b. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 dengan kinerj Renstra OPD Tahun 2016 – 2021, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa

terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja MISI – 1

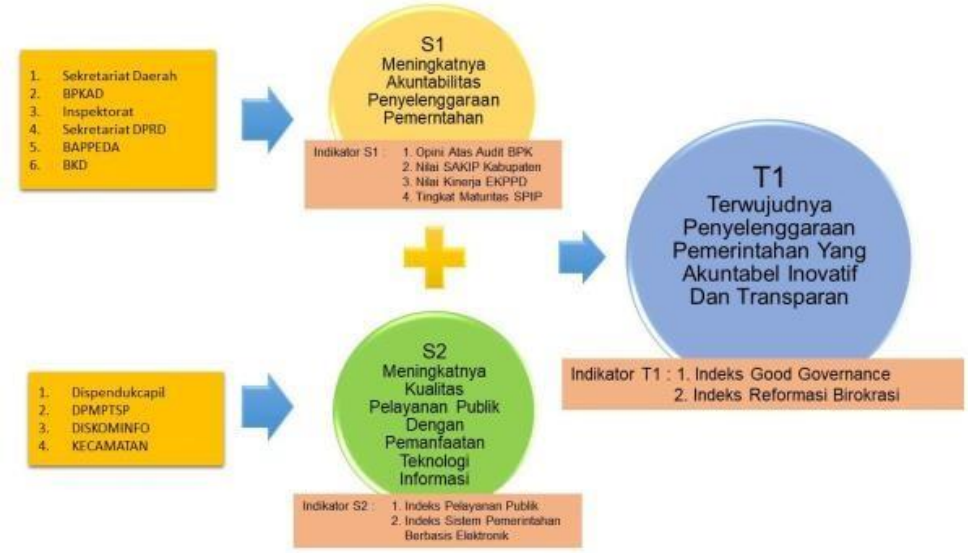

- Keselarasan Kinerja MISI – 2

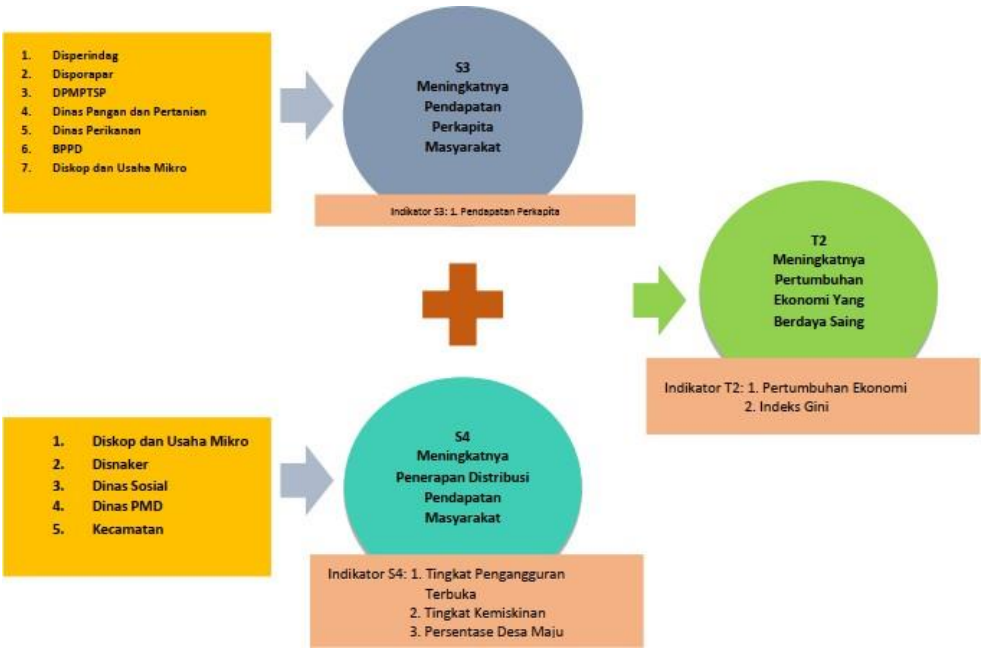

- Keselarasan Kinerja MISI – 3

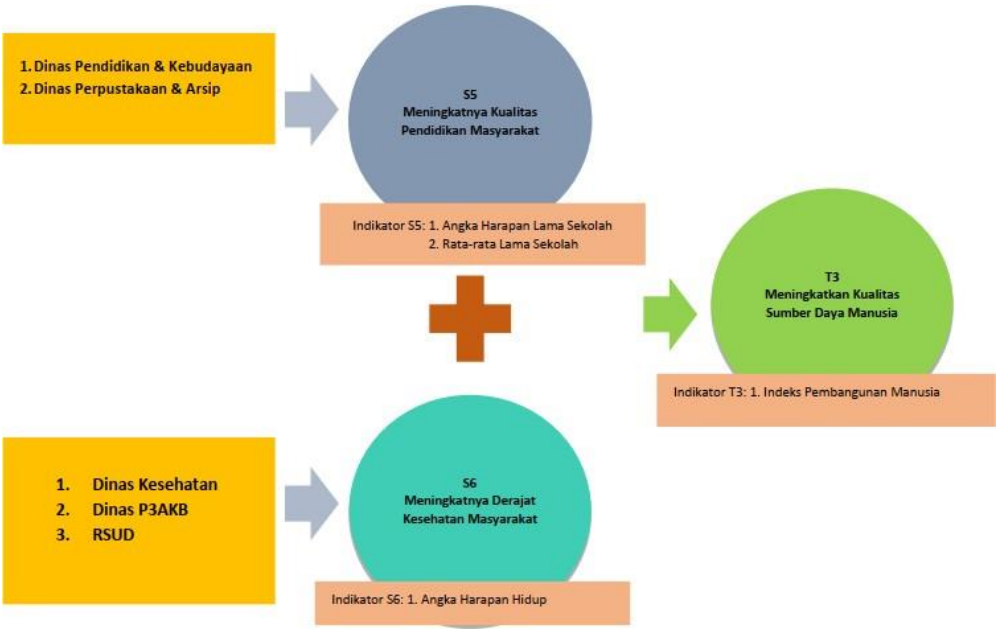

- Keselarasan Kinerja MISI – 4

- Keselarasan Kinerja MISI – 5

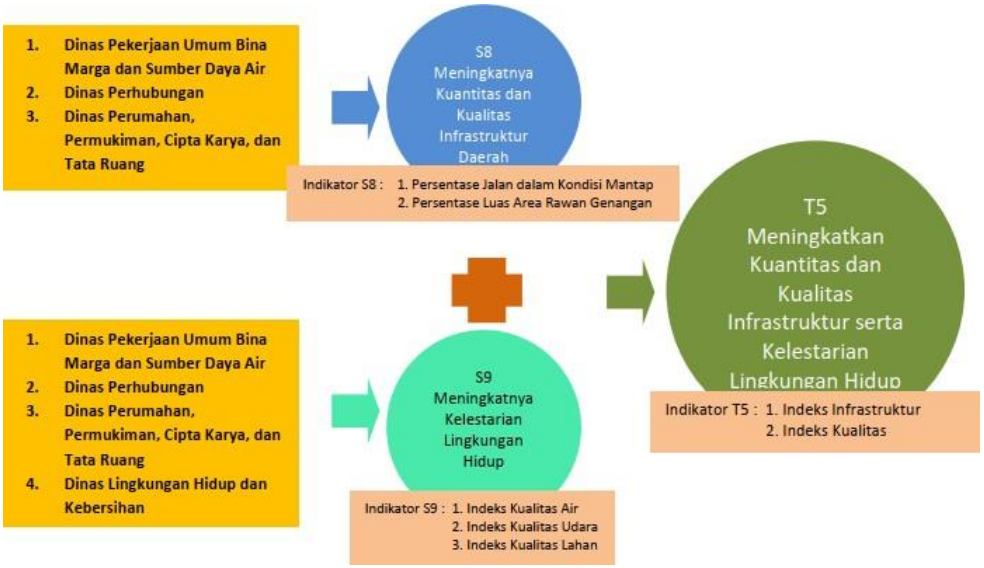

c. Strategi Pembangunan Daerah

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity*, dan *threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Berikut analisa SWOT dari isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana gambar berikut :

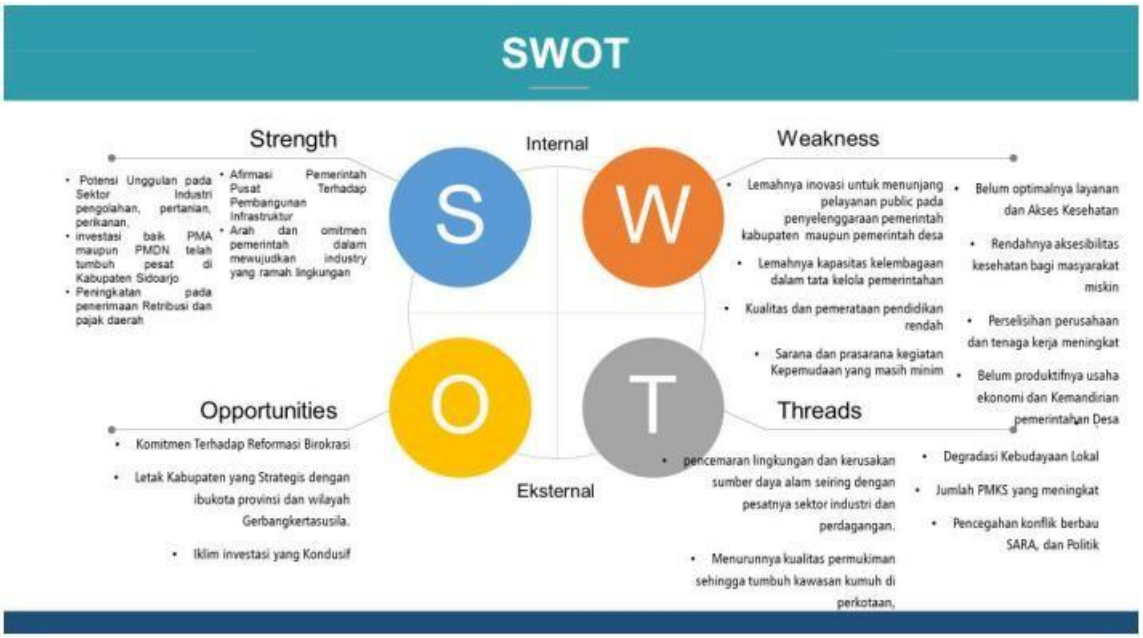

Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dirumuskan dalam strategi, sebagai berikut :

- Strategi S-O ; yang ditetapkan adalah Penguatan Ekonomi yang berdayasaing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis *eco Industri*. Dimaksudkan pada strategi ini yaitu Industri olahan, UMKM, Pertanian dan Perikanan kelautan merupakan sektor sektor potensial Kabupaten Sidoarjo yang perlu didorong oleh pemerintah. Sebab, sektor-sektor potensial tersebut menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor, industri olahan, UMKM, pertanian, Perikanan dan kelautan. Pajak daerah dan restribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah, hal ini tentunya perhatian dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Kabupaten Sidoarjo. investasi baik PMA maupun PMDN telah tumbuh

pesat di Kabupaten Sidoarjo, tentunya perlunya menciptkan lingkungan iklim investasi kondusif

- Strategi S-T ; yang ditetapkan adalah Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan.

  Pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektifikatas antar wilayah dan infrastruktur strategis penunjang perekonomian, serta pembangunan yang patuh akan rencanana tata ruang. Sesuai dengan Konsep *Sustainable Development*, maka pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu unsur yang perlu perhatian guna untuk generasi mendatang dan menjaga dari dampak perubahan iklim
- Strategi W-O ; yang ditetapkan adalah Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.

  Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertangungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Smart governance prinsip dasar yaitu mengakolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan

masyarakat, mengembangkan operasional, meningkatkan managemen organisasi, membuat system database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi yang up to date, menggunakan teknologi yang mutakhir, adanya koordinasi stakeholder

- Strategi W-T (1) ; yang ditetapkan adalah Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Membangun generasi yang profesional menjadi prioritas utama dalam Kabupaten Sidoarjo mengingat daya saing dan kompetensi semakin meningkat. Kualitas pendidikan yang baik selaras dengan akses seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau serta pemerataan pendidikan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah, merawat dan mengobati, pemulihan kesehatan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, upaya tersebut didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Masyarakat secara merata.
- Strategi W-T (2) ; yang ditetapkan adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.
  pada strategi ini mencipatkan adanya social sustainabilty, prinsip utamanya yaitu equity, individu mempunyai akses berpartisipasi secara penuh. kedua, *social inclusion and interaction*, adanya hak untuk kesempatan berpartisipasi baik meliputi partisipasi dalam pembangunan maupun dalam berpolitik. Ketiga, security jaminan untuk lingkungan yang aman dan mendukung. Terakhir yaitu adaptability kelenturan terhadap komunitas. Strategi ini juga menciptakan adanya penguatan pada demokrasi Pancasila.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.
2. Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis *Eco Industry*.
3. Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.
5. Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai :

Tabel II.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

Visi : **Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan**		
Misi I "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
T.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	S1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Strategi: Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government
	S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	
Misi II "Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat"		
T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	S.3 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Strategi: Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis Eco Industry.
	S.4 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	
Misi III "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		
T.3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	S.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Strategi: Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S.6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	

Misi IV "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"		
T.4 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	S. 7 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan
Misi V "Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"		
T.5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian Lingkungan Hidup	S.8 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Strategi: Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan
	S.9 Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan dituangkan dalam tema pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tahun	Tema dan Prioritas Pembangunan
Tahun 2016	Mewujudkan Iklim Demokrasi yang Sehat Dan Kondusif Guna Menunjang Peningkatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Daerah
Tahun 2017	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Publik Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
Tahun 2018	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja
Tahun 2020	Pemantapan Infrastruktur Penunjang Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2020	Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui akselarasi sektor-sektor potensial daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah
Tahun 2021	Menciptakan Stabilisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang berdaya saing

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Berikut tematik pembangunan tahunan selama 5 tahun perencanaan (tahun 2016–2021) sebagaimana gambar :

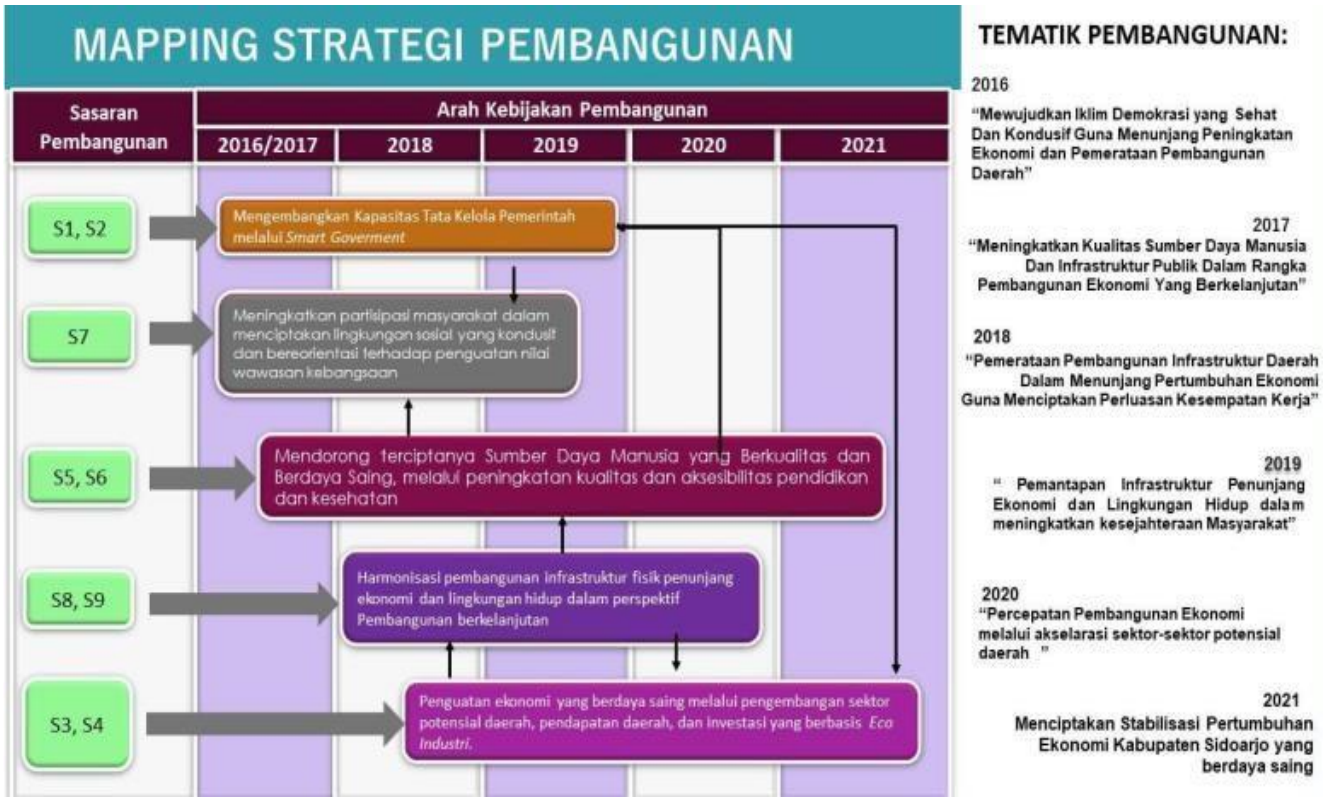

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan di tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.4

Tema dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
Tema Pembangunan Tahun 2020 :	
"Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui akselarasi sektor-sektor potensial daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah"	
Prioritas Pembangunan Tahun 2020 :	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	1. Program pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 2. Program peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan 3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	

3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	4. Program pendidikan sekolah dasar 5. Program pendidikan sekolah menengah pertama 6. Program perluasan dan aksesibilitas Pendidikan 7. Program Penyediaan Dana BOSREG 8. Program pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca 9. Program pelayanan kesehatan masyarakat 10. Program pengembangan sumber daya kesehatan 11. Program upaya kesehatan masyarakat 12. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 13. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat 14. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal 15. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 16. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap danGaram 17. Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan 18. Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 19. Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan 20. Program Peningkatan Ketahanan pangan daerah 21. Program Pengembangan Objek, promosi, dan usaha pariwisata 22. Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 23. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujutkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis	
5. Optimalisasi pembangunan system infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	

	24. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 26. Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 27. Program Penetapan Pajak Daerah 28. Program Pengendalian Pajak Daerah 29. Program pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 30. Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31. Program peningkatan pelayanan pada badan layanan umum daerah 32. Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi Informatika 33. Program Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 34. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan 35. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir 36. Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman 37. Program penataan bangunan 38. Program peningkatan pelayanan angkutan 39. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 40. Program Pemberdayan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya 41. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 43. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 44. Program peningkatan kesempatan kerja dan penyelenggaraan transmigrasi 45. Program pengembangan dan perlindungan ketenagakerjaan

	46. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 47. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 48. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 49. Program Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar Lembaga 50. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 51. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan 52. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 53. Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 54. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 55. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 56. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 57. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 58. Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel II.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Utama
1.	Indeks Good Governance
2.	Indeks Reformasi Birokasi
3.	Pertumbuhan Ekonomi
4.	Indeks GINI
5.	Tingkat Kemiskinan
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7.	Indeks Infrastruktur
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
9.	Indeks Kebahagiaan
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

B. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Sidoarjo menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas* / hubungan sebab akibat dan *alignment* / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 1 :

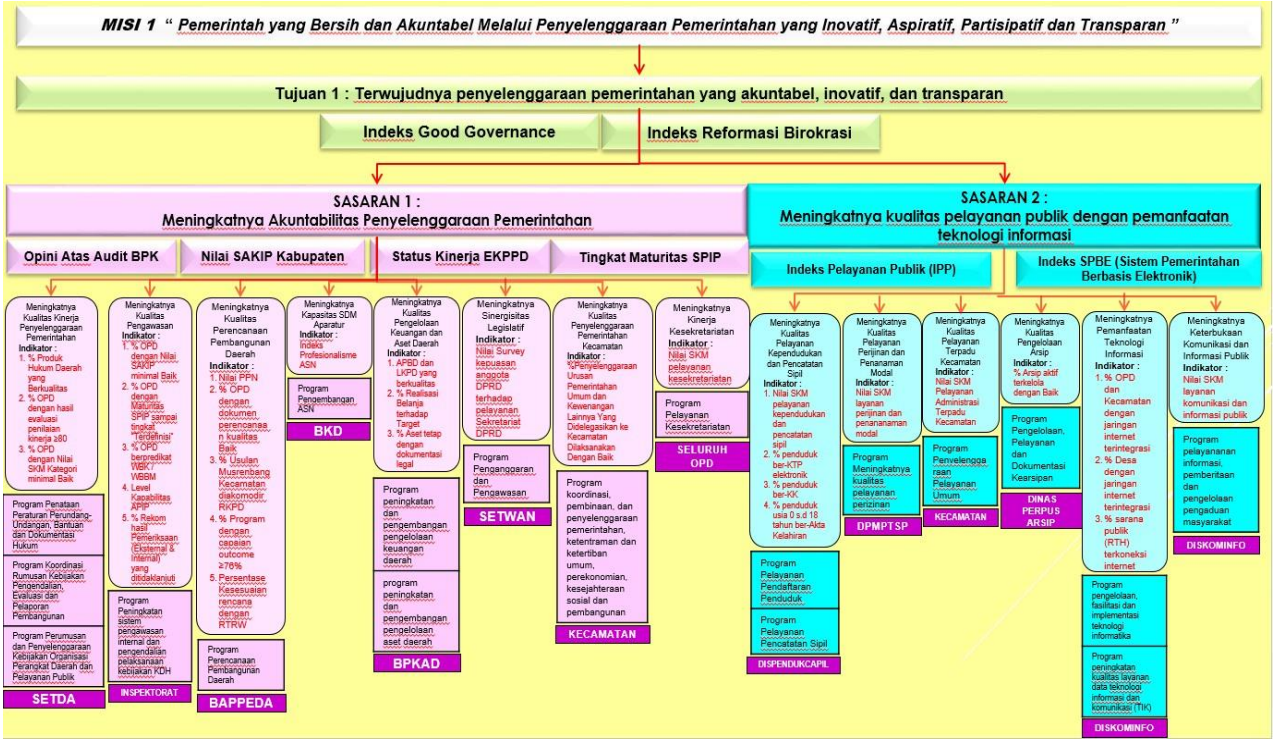

Cascading Kinerja Misi 2 :

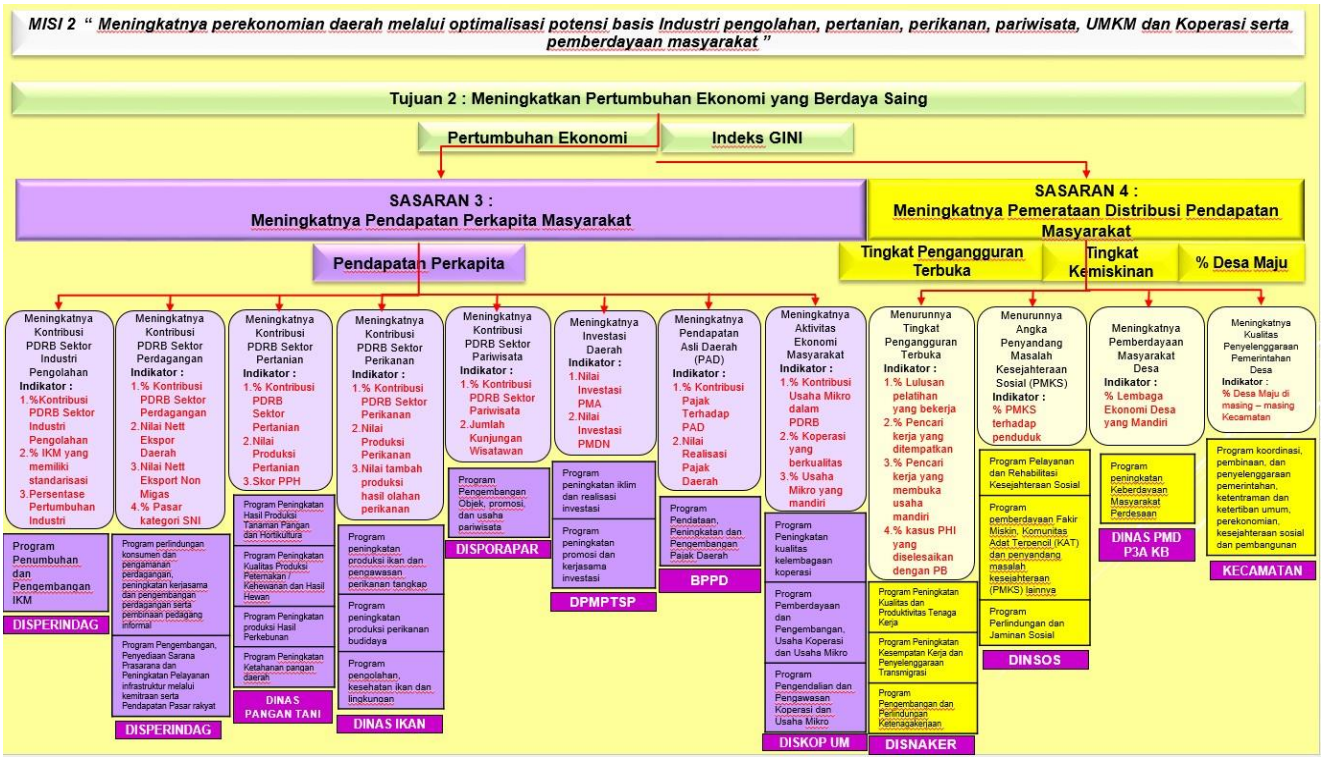

Cascading Kinerja Misi 3 :

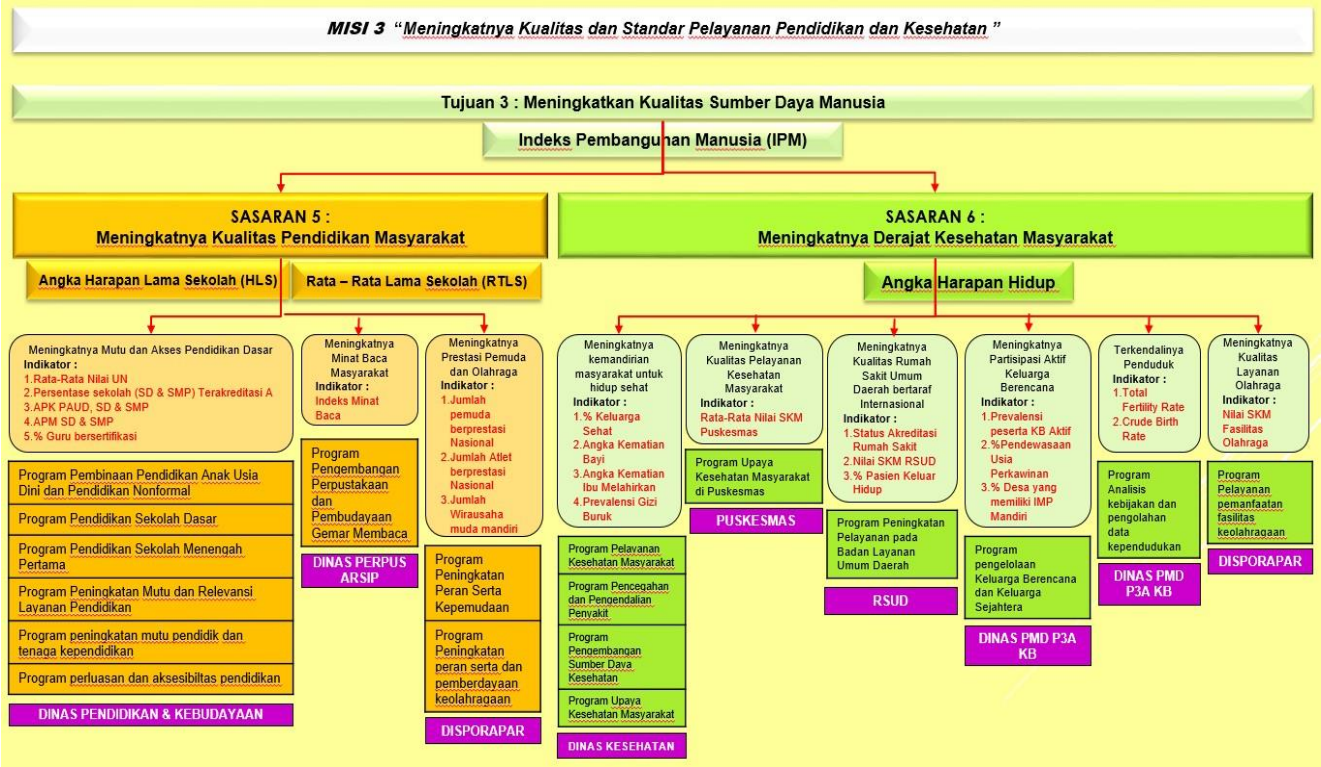

Cascading Kinerja Misi 4 :

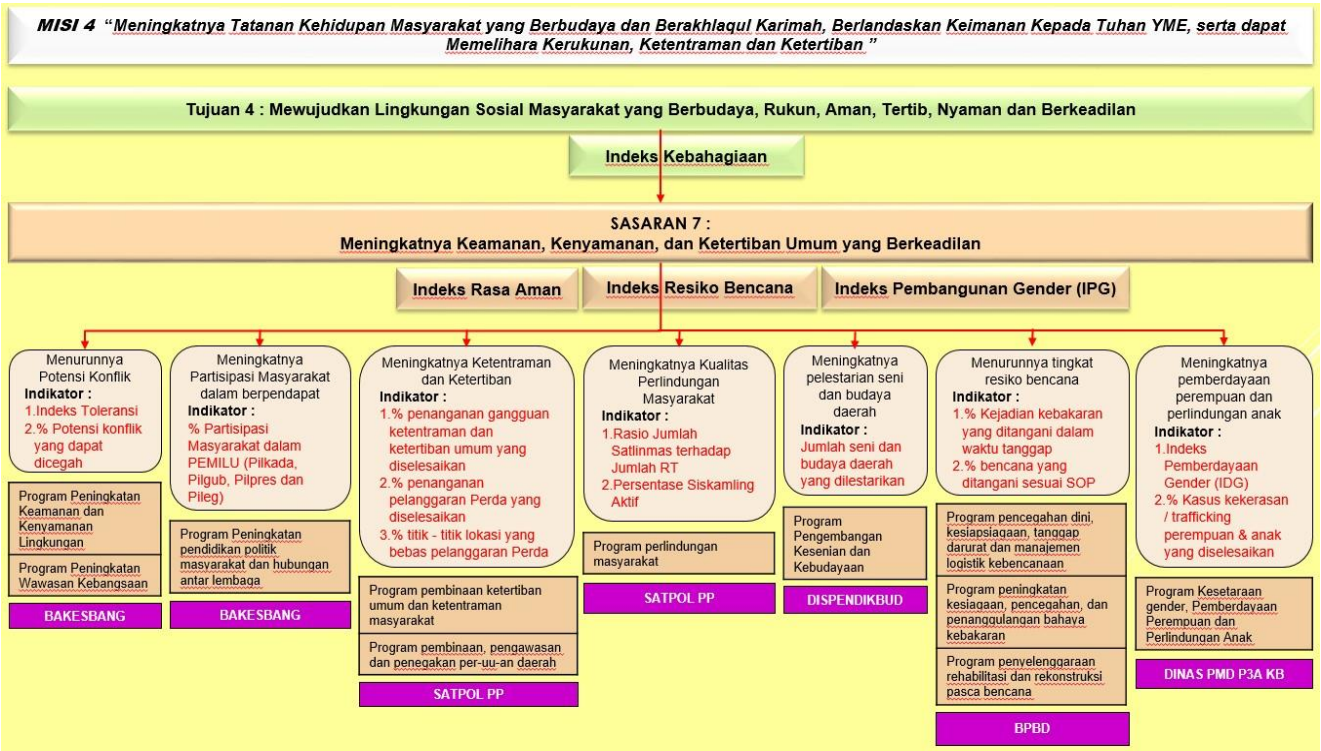

Cascading Kinerja Misi 5 :

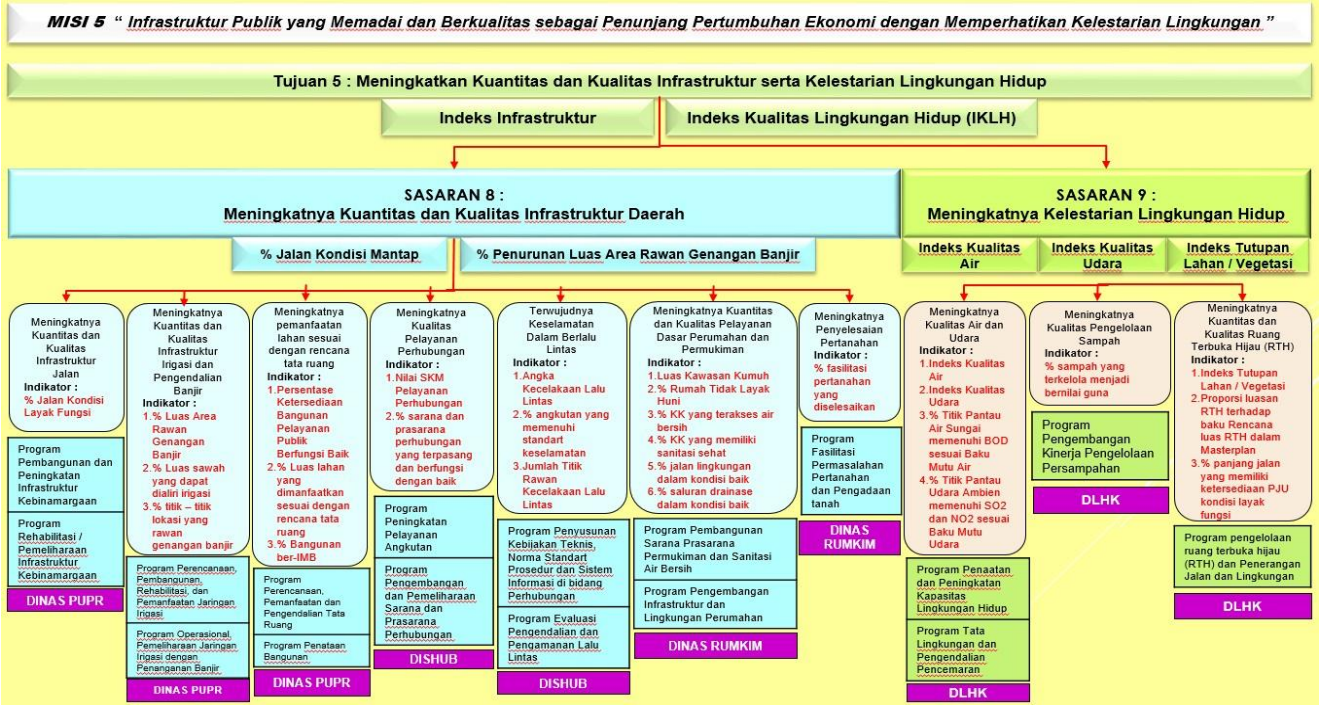

C. CROSSCUTTING

Sebagai wujud integritas kinerja lintas sektor dari strategi pencapaian kinerja disusun pula CrossCutting Kinerja Daerah. Dengan adanya crosscutting maka dapat ditentukan mana – mana saja program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam setiap sasarannya, serta cara yang tepat dan efektif dalam mewujudkan kinerja yang akan dicapai dengan menerapkan lintas instansi dan lintas fungsi. Melalui CrossCutting pula dapat digambarkan pola hubungan kinerja antar OPD dan apa kaitan OPD dengan kinerja yang tertuang dalam RPJMD. CrossCutting tersebut untuk tiap sasaran digambarkan sebagai berikut :

CrossCutting Sasaran 1 :

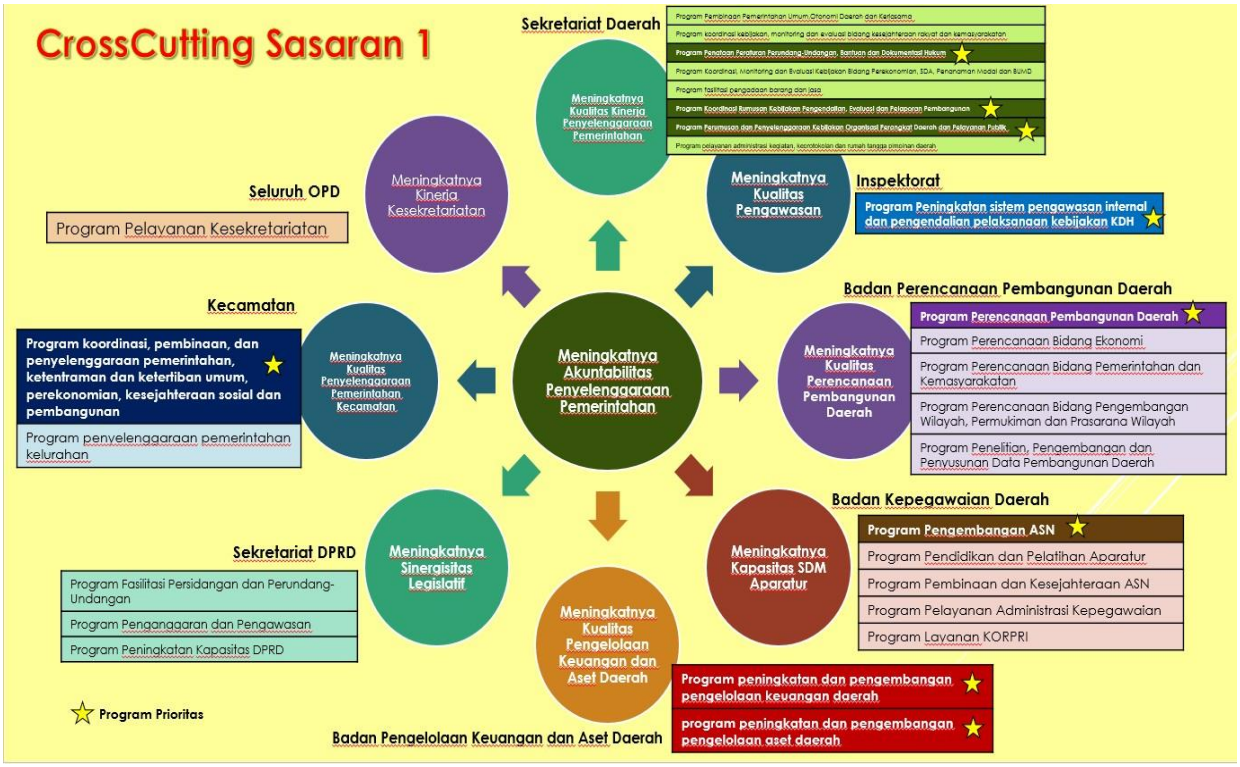

CrossCutting Sasaran 2:

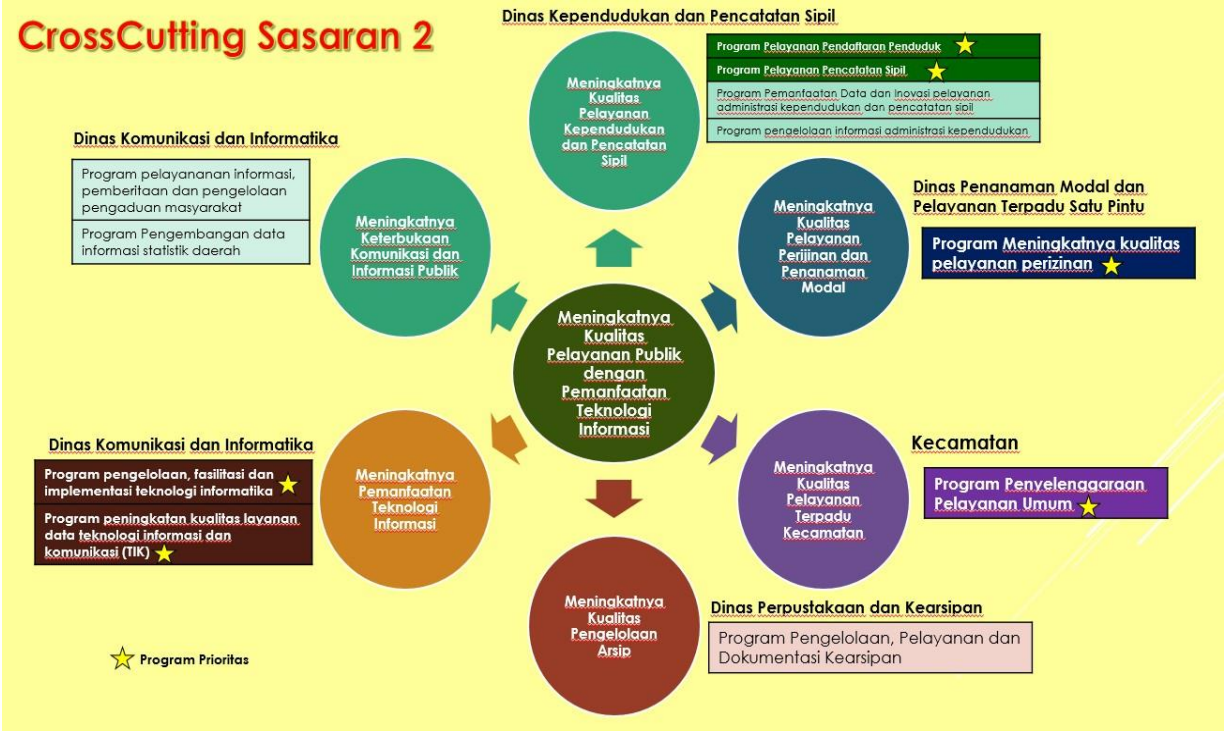

CrossCutting Sasaran 3 :

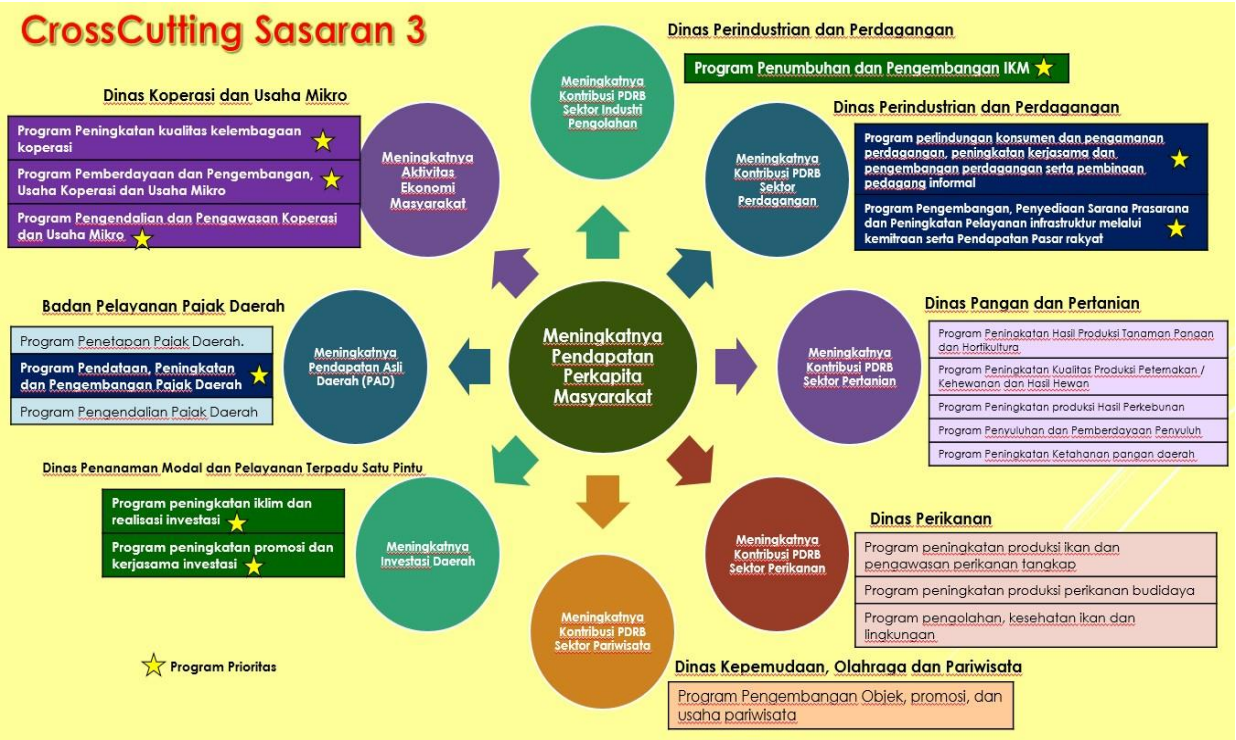

CrossCutting Sasaran 4 :

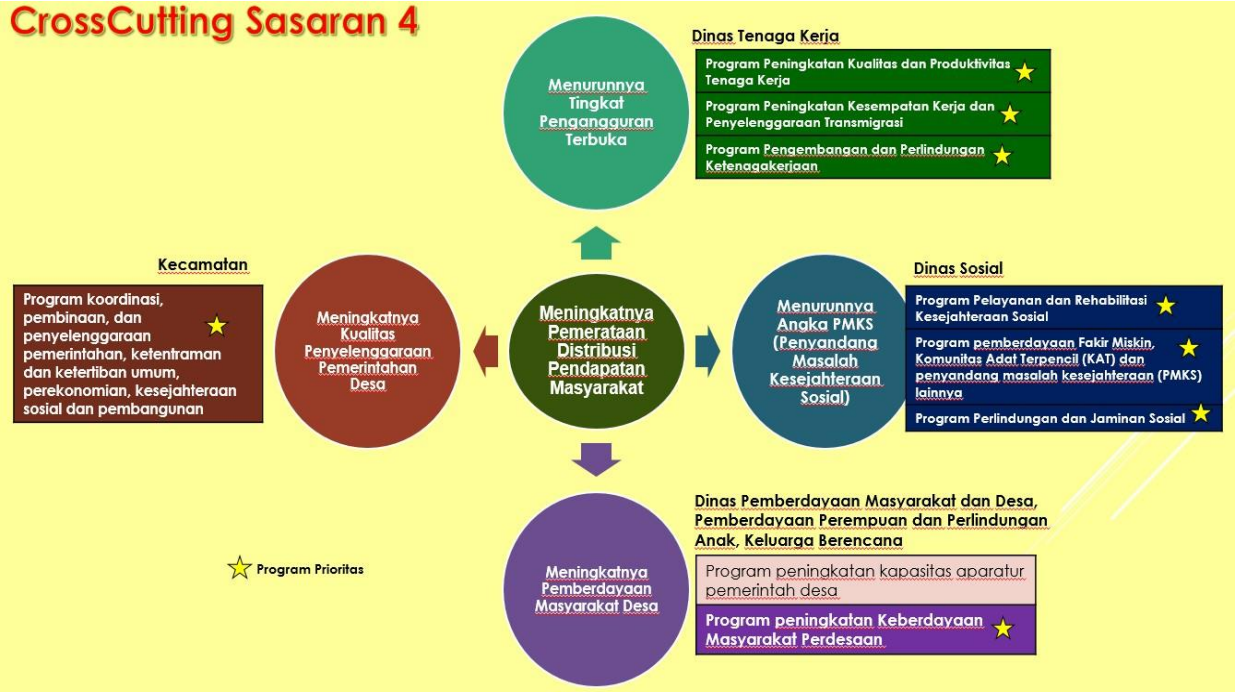

CrossCutting Sasaran 5 :

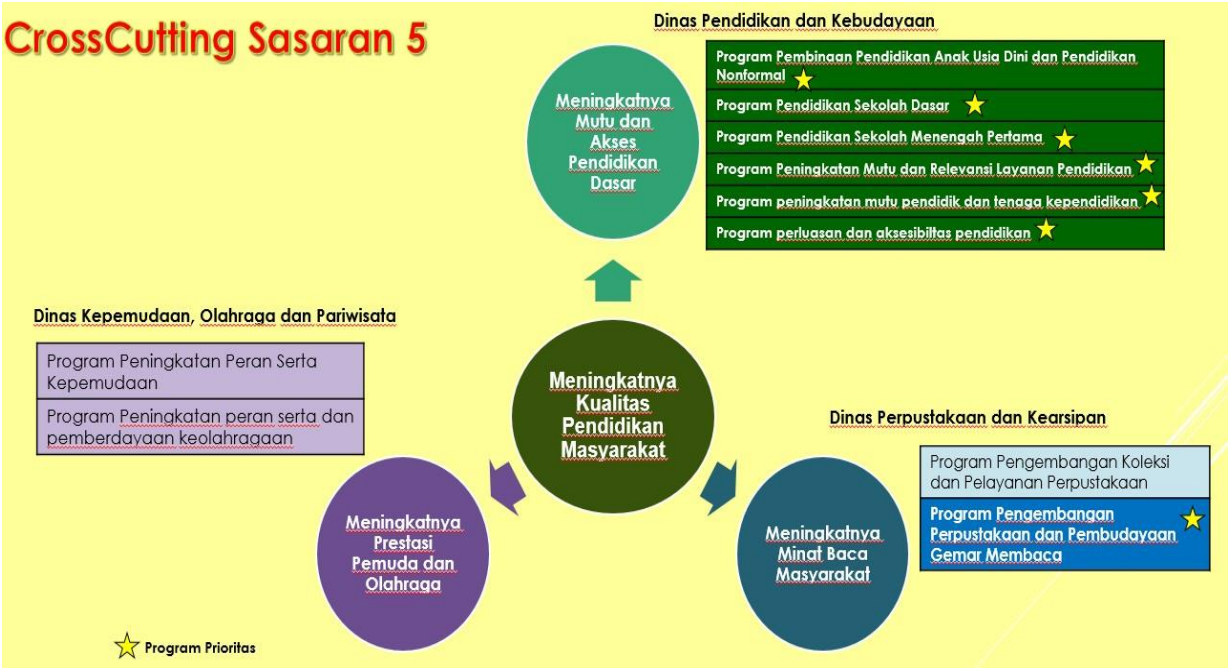

CrossCutting Sasaran 6 :

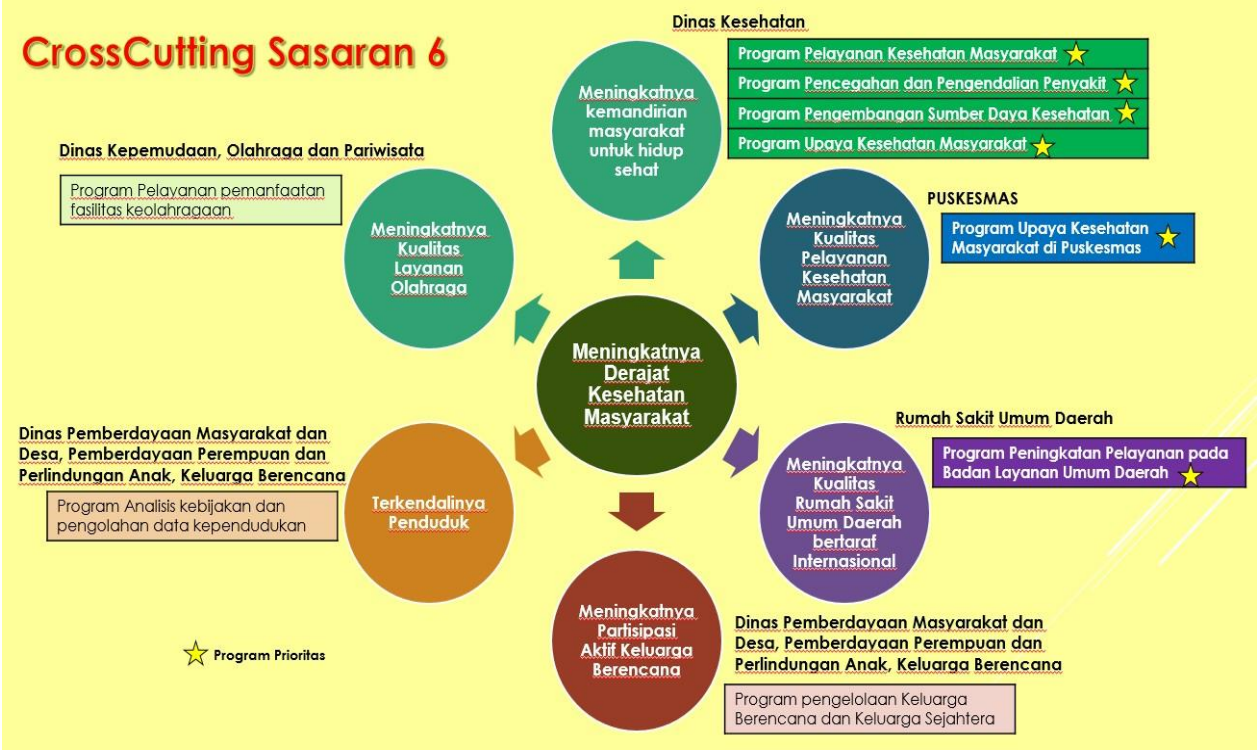

CrossCutting Sasaran 7 :

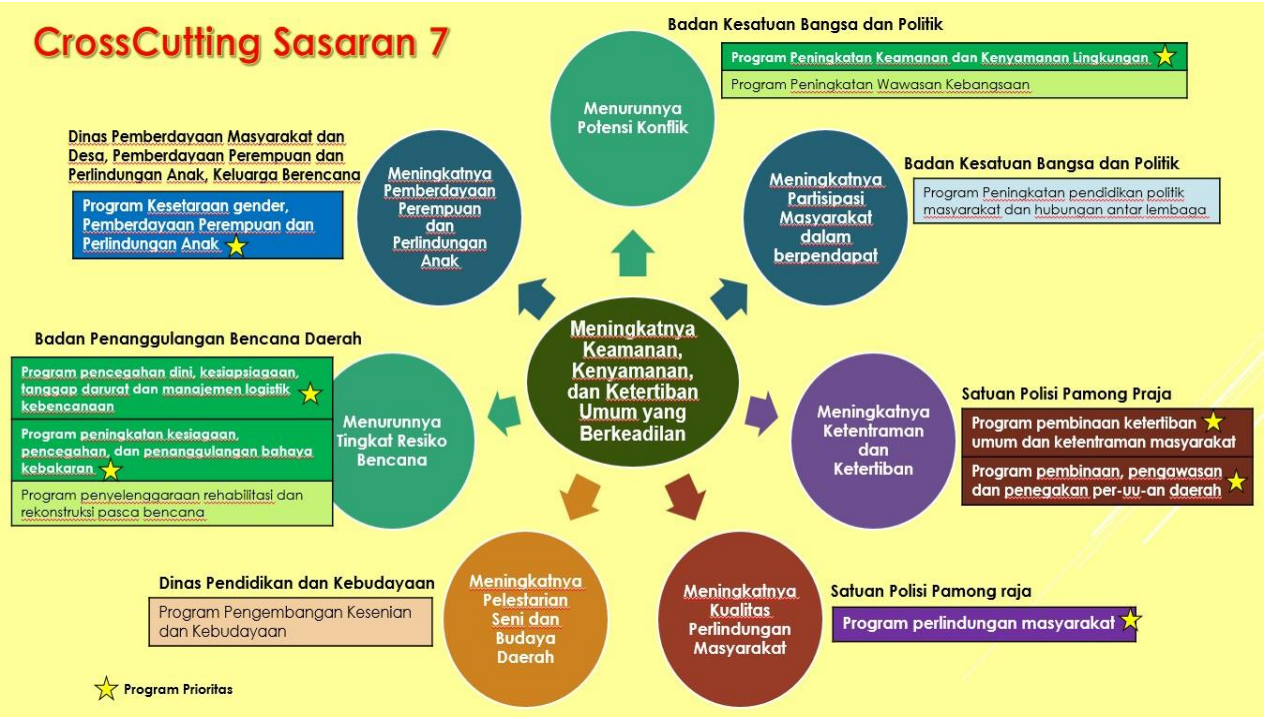

CrossCutting Sasaran 8 :

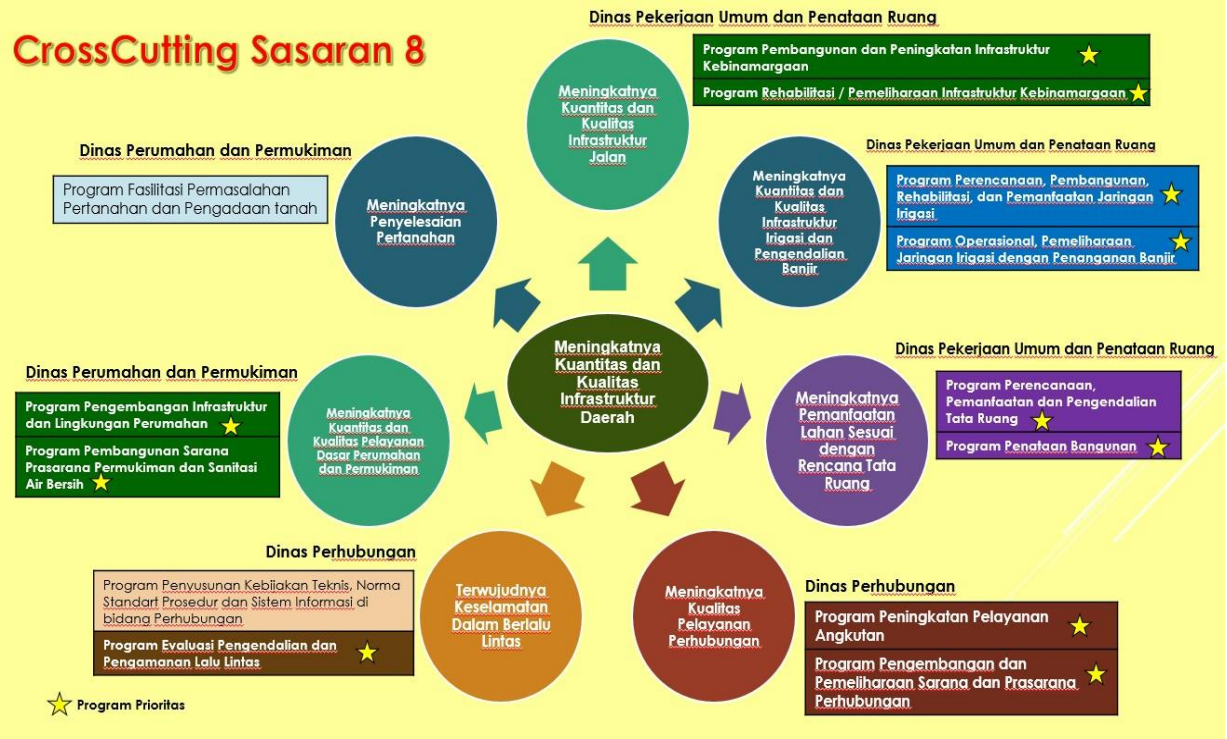

CrossCutting Sasaran 9 :

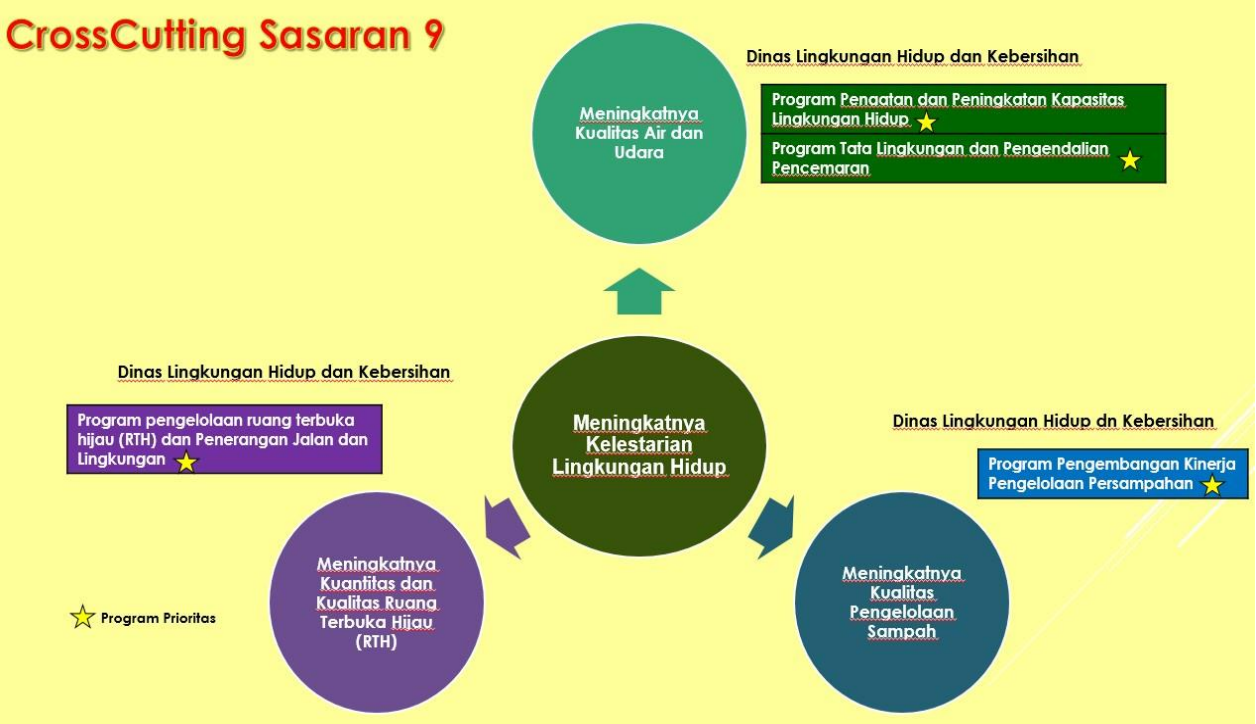

D. PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis maka akan mudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standart pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut diagram alir dari peta proses bisnis Kabupaten Sidoarjo baik BPMN (Bisnis Proses Model dan Notasi) maupun diagram level / tingkatannya :

Bisnis Proses Model dan Notasi :

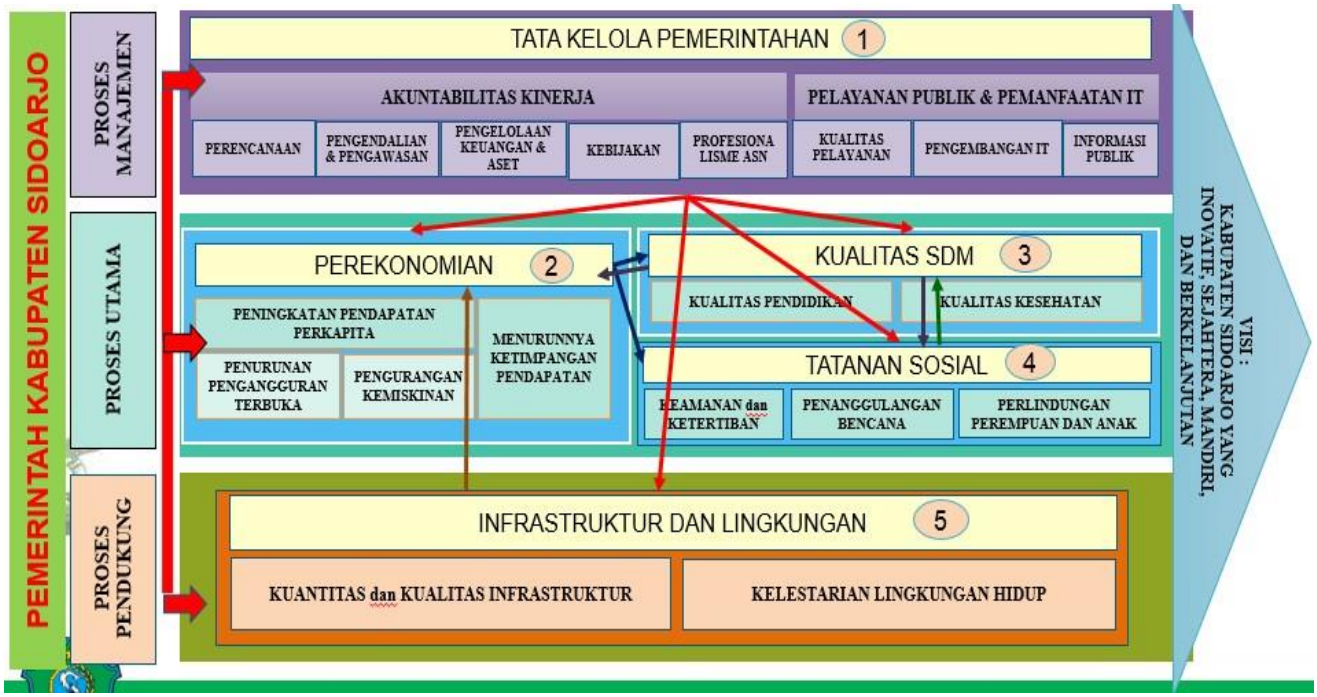

Kausalitas Loop Diagram Pencapaian Visi Misi :

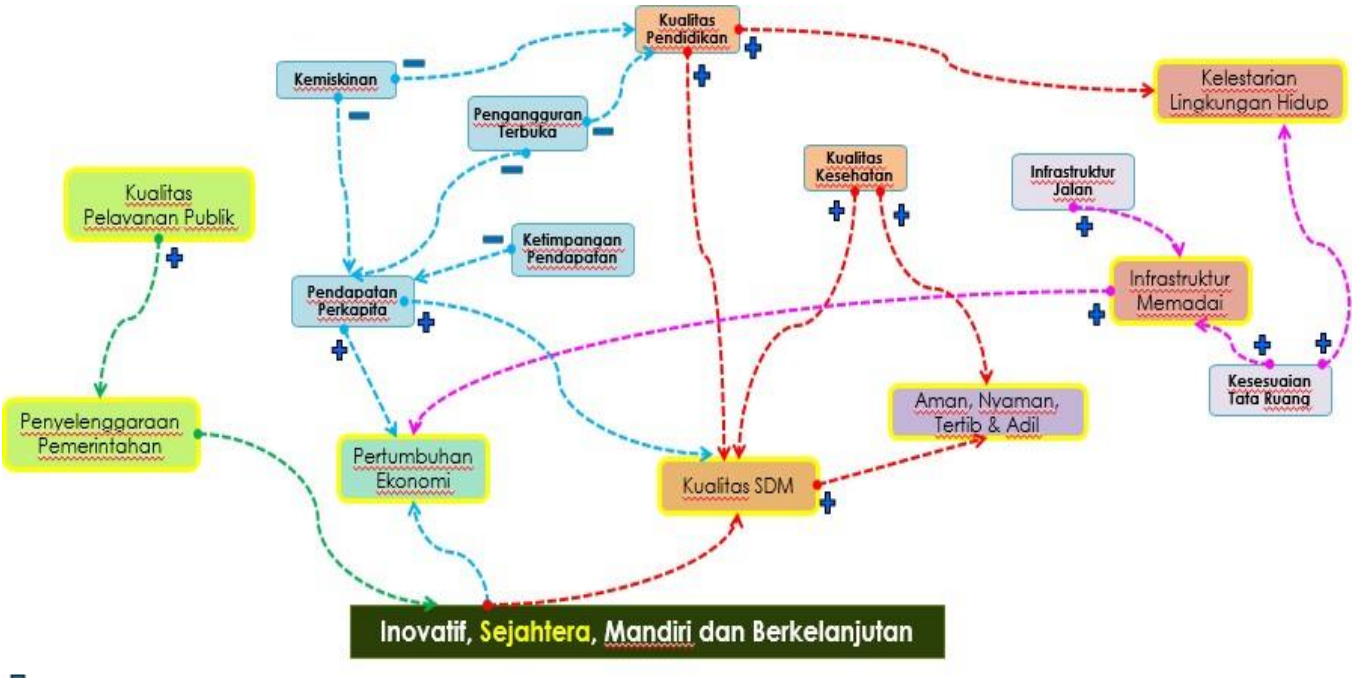

E. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan"		
	Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	**Indeks Good Governance**	**69.55**
		Indeks Reformasi Birokrasi	**B**
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK	WTP
		Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Status Kinerja EKPPD	ST
		Tingkat Maturitas SPIP	terdefinisi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.65
	Misi 2 : "Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat"		
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	**Pertumbuhan Ekonomi**	**1.4-2.5**
		Indeks GINI	**0.343-0.35**
3.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	86.801
4.	Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.82-6.47

		Tingkat Kemiskinan	7.16-8.58
		Persentase Desa Maju	31.68%
	Misi 3 : "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		
	Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**78,84-79,5**
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.45 Tahun
		Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10.8 Tahun
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73.69 Tahun
	Misi 4 : "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"		
	Tujuan 4 : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	**Indeks Kebahagiaan**	**80.47**
7.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Indeks Rasa Aman	76.87
		Indeks Resiko Bencana	85
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.65
	Misi 5 : "Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan"		
	Tujuan 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kelestarian Lingkungan Hidup	**Indeks Infrastruktur**	**1.422**
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**53.01**
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Jalan Kondisi Mantap	90%
		Persentase penurunan Luas wilayah Rawan Genangan	65%
9.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53.29
		Indeks Kualitas Udara	87.79
		Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	26.72

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan Kab. Sidoarjo Tahun 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	**SEKRETARIAT DAERAH**	**41,541,608,299.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	12,645,660,184.00	APBD
	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pertanian dan BUMD	866,647,090.00	APBD
	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	776,852,080.00	APBD
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	1,126,938,660.00	APBD
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	1,972,143,386.00	APBD
	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1,268,766,145.00	APBD
	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	9,776,601,570.00	APBD
	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	2,575,185,304.00	APBD
	Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	10,532,813,880.00	APBD
2	**SEKRETARIAT DPRD**	**92,285,134,614.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	17,462,784,075.00	APBD
	Program Penganggaran dan Pengawasan	40,995,292,898.00	APBD
	Program Fasilitasi Persidangan dan Perundang - Undangan	27,134,879,651.00	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6,692,177,990.00	APBD
3	**INSPEKTORAT**	**6,269,890,250.00**	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,070,921,300.00	APBD
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,198,968,950.00	APBD
4	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**418,976,328,110.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,642,446,610.00	APBD
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	136,111,121,230.00	APBD
	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	620,087,680.00	APBD

	Program perluasan dan aksesibiltas pendidikan	84,141,293,020.00	APBD
	Program Pendidikan Sekolah Dasar	6,468,939,125.00	APBN dan DAK
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,370,693,080.00	APBN dan DAK
	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	13,577,600.00	APBD
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1,828,822,150.00	APBD
	Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	175,779,347,615.00	APBN dan DAK
5	**DINAS KESEHATAN**	**336,245,035,610.24**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,940,782,507.60	APBD
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31,601,241,702.00	APBD dan DAK
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7,054,972,060.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	81,204,163,595.00	APBD dan DAK
	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	100,210,968,634.00	APBD
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	108,232,907,111.64	APBD dan BLUD
6	**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**	**252,022,707,095.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,381,146,432.00	APBD
	Program Penyusunan Perencanan Teknis dan Pengelolaan Data ke-PU-an	5,162,081,951.00	APBD
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	186,136,974,854.00	APBD dan DAK
	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir	54,342,503,858.00	APBD dan DAK
7	**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**	**207,699,965,194.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,303,050,663.00	APBD
	Program Penataan Bangunan	136,714,780,383.00	APBD
	Program Pengawasan Bangunan	1,199,913,360.00	APBD
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	56,765,805,488.00	APBD dan DAK
	Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	9,716,415,300.00	APBD
8	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**21,107,040,645.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,054,350,915.00	APBD
	Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	13,574,965,700.00	APBD

	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	948,500,300.00	APBD
	Program Perlindungan Masyarakat	529,223,730.00	APBD
9	**DINAS SOSIAL**	**33,101,625,209.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,762,567,019.00	APBD
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	23,038,015,650.00	APBD
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,418,731,200.00	APBD
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,882,311,340.00	APBD
10	**DINAS TENAGA KERJA**	**8,404,101,810.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,575,430,055.00	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,959,810,980.00	APBD
	Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1,393,438,220.00	APBD
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Penyelenggaraan Transmigrasi	475,422,555.00	APBD
11	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**18,458,272,824.00**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,514,173,486.00	APBD
	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,885,716,739.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12,864,487,599.00	APBD
	Program Pengendalian Kependudukan	1,193,895,000.00	APBD
12	**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**16,824,201,785.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,790,265,450.00	APBD
	Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	894,570,400.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	761,243,620.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan	1,456,665,800.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan	2,676,703,940.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan	5,244,752,575.00	APBD dan DAK

13	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**	**174,411,520,989.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,368,440,323.00	APBD
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	40,083,242,187.00	APBD
	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	2,306,776,390.00	APBD dan DBHCHT
	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	1,847,503,700.00	APBD dan DBHCHT
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan	125,805,558,389.00	APBD
14	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**10,782,787,100.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,165,380,530.00	APBD
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	828,821,050.00	APBD
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,618,232,960.00	APBD
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	924,994,760.00	APBD
	Program pelayanan pencatatan sipil	245,357,800.00	APBD
15	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**15,832,953,530.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	8,662,204,560.00	APBD
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,201,048,650.00	APBD
	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	344,574,280.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	2,020,125,780.00	APBD
	Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	3,605,000,260.00	APBD
16	**DINAS PERHUBUNGAN**	**39,377,326,185.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,831,949,350.00	APBD
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	7,454,517,600.00	APBD
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	8,382,560,885.00	APBD dan DAK
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	17,451,287,170.00	APBD

	Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi di bidang Perhubungan	1,257,011,180.00	APBD
17	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**26,042,179,532.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,853,030,012.00	APBD
	Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	16,244,877,630.00	APBD
	Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika	1,333,979,100.00	APBD
	Program pelayananan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	5,988,899,620.00	APBD
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	621,393,170.00	APBD
18	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**	**5,469,983,620.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,420,202,270.00	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	694,262,850.00	APBD
	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	1,681,876,400.00	APBD
	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	673,642,100.00	APBD
19	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**8,330,769,490.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,047,530,440.00	APBD
	Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	196,868,220.00	APBD
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	117,414,900.00	APBD
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	968,955,930.00	APBD
20	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA**	**17,435,771,829.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,890,633,339.00	APBD
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2,197,512,350.00	APBD
	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	526,255,000.00	APBD
	Program Pengembangan Objek, Promosi dan Usaha Pariwisata	3,392,989,760.00	APBD
	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	8,428,381,380.00	APBD

21	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**5,681,065,351.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,213,421,666.00	APBD
	Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan	2,384,755,194.00	APBD
	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	434,999,360.00	APBD
	Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan	647,889,131.00	APBD
22	**DINAS PERIKANAN**	**39,682,100,390.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,903,246,279.00	APBD
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam	324,106,180.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan produksi perikanan Budidaya	36,890,147,856.00	APBD dan DAK
	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	564,600,075.00	APBD dan DAK
23	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**32,173,513,699.77**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,138,527,328.77	APBD
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal	5,796,034,030.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta pendapatan pasar rakyat	14,573,243,281.00	APBD dan DBHCHT
	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	4,665,709,060.00	APBD dan DBHCHT
24	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**12,942,017,161.00**	
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	1,179,677,940.00	APBD
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	841,417,400.00	APBD
	Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	2,184,878,100.00	APBD
	Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1,153,574,800.00	APBD
	Program perencanaan pembangunan daerah	2,820,790,830.00	APBD
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,761,678,091.00	APBD
25	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**10,009,563,206.00**	

	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,245,310,096.00	APBD
	Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3,056,589,410.00	APBD
	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,074,644,700.00	APBD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1,633,019,000.00	APBD
26	**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**	**9,893,695,167.00**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,762,010,517.00	APBD
	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	2,048,054,900.00	APBD
	Program Penetapan Pajak Daerah.	2,064,674,900.00	APBD
	Program Pengendalian Pajak Daerah	1,018,954,850.00	APBD
27	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**8,852,578,865.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,826,227,894.00	APBD
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	559,078,520.00	APBD
	Program Pengembangan ASN	1,216,931,000.00	APBD
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	1,150,922,081.00	APBD
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2,099,419,370.00	APBD
28	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**9,561,386,200.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,904,637,300.00	APBD
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4,212,682,200.00	APBD
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1,545,417,400.00	APBD
	Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	898,649,300.00	APBD
29	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**15,819,806,874.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,072,158,994.00	APBD
	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	8,422,677,980.00	APBD
	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	2,319,740,100.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1,005,229,800.00	APBD
30	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	**574,895,657,671.75**	
	Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	574,895,657,671.75	BLUD dan APBD

31	**KECAMATAN SIDOARJO**	**20,338,084,482.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,757,766,820.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	203,699,900.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,598,632,730.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	16,777,985,032.00	APBD
32	**KECAMATAN CANDI**	**1,986,435,023.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,317,801,023.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	632,034,000.00	APBD
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	36,600,000.00	APBD
33	**KECAMATAN BUDURAN**	**2,673,193,550.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,912,857,820.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	723,464,930.00	APBD
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	36,870,800.00	APBD
34	**KECAMATAN GEDANGAN**	**2,253,632,065.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,586,035,341.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	626,521,424.00	APBD
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	41,075,300.00	APBD
35	**KECAMATAN SEDATI**	**2,524,324,440.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,513,673,040.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	923,915,200.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	86,736,200.00	APBD
36	**KECAMATAN WARU**	**4,761,729,670.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,443,549,570.00	APBD

	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,318,180,100.00	APBD
37	**KECAMATAN TAMAN**	**14,972,721,566.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,380,229,790.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	248,000,000.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	948,098,920.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	11,396,392,856.00	APBD
38	**KECAMATAN SUKODONO**	**4,737,367,480.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,524,131,332.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	768,438,348.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	444,797,800.00	APBD
39	**KECAMATAN WONOAYU**	**1,766,360,500.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,317,490,900.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	438,249,800.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	10,619,800.00	APBD
40	**KECAMATAN KRIAN**	**8,678,750,710.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,558,200,110.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,365,803,790.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	3,754,746,810.00	APBD
41	**KECAMATAN BALONGBENDO**	**1,982,416,850.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,300,581,950.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	525,562,600.00	APBD

	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	156,272,300.00	APBD
42	**KECAMATAN TARIK**	**1,947,205,200.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,498,875,100.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	448,330,100.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	APBD
43	**KECAMATAN TULANGAN**	**1,975,046,300.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,143,707,500.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	827,388,800.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	3,950,000.00	APBD
44	**KECAMATAN PRAMBON**	**2,342,220,635.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,746,727,175.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595,493,460.00	APBD
45	**KECAMATAN KREMBUNG**	**1,910,370,774.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,296,690,124.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595,978,650.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	17,702,000.00	APBD
46	**KECAMATAN TANGGULANGIN**	**2,169,382,750.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,812,806,470.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	356,576,280.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	APBD
47	**KECAMATAN JABON**	**2,607,201,574.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,966,599,550.00	APBD

	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	628,555,924.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	12,046,100.00	APBD
48	**KECAMATAN PORONG**	**12,592,630,733.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,940,548,141.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	8,785,582,142.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	135,898,800.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	730,601,650.00	APBD
	J U M L A H	**2,562,349,662,607.76**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

A. CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pengemban amanah masyarakat Sidoarjo melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, maka ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Gambar Infografis Pemetan Misi, Tujuan dan Sasaran

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PER MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

MISI 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan

Dalam mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator sasaran.

TUJUAN 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan

1. Indeks Good Governance

Untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan transparan sebagai prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan penilaian kinerja pemerintahan dengan mengukur indeks good governance. Tujuan menghitung indeks good governance adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang lebih akurat tentang kapasitas Pemda
2. Menjadi informasi bagi Pemda dalam mengukur daya saing dan keunggulan daerah
3. Menjadi salah satu bentuk dari pertanggung jawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah terhadap stakeholders di daerah
4. Menjadi informasi bagi pihak swasta dalam membangun kerjasama dan atau kerjasama di daerah
5. Menjadi salah satu indikasi makro keberhasilan pembangunan yang dapat dikomparasi dengan daerah lainya

Pengukuran indikator indeks good governance yang diterapkan menggunakan indikator dari delapan prinsip good governance yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, diantaranya :

1. Taat Hukum;
2. Partisipasi
3. Daya Tanggap
4. Transparansi

5. Akuntabilitas
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Visi Strategis

Tabel III-1.1

Tabel Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo

Indikator Kinerja Sasaran	Indeks Reformasi Birokrasi
Target Tahun 2016	65,35
Realisasi Tahun 2016	65,35
Target Tahun 2017	66,31
Realisasi Tahun 2017	63,96
Target Tahun 2018	67,33
Realisasi Tahun 2018	69,19
Target Tahun 2019	69,32
Realisasi Tahun 2019	74,24
Target Tahun 2020	**69,55**
Realisasi Tahun 2020	**77,78**
Target Tahun 2021	70,76

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan digunakan indikator Indeks Good Governance seperti digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III-1.2

Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Good Governance	69,55	77,78	111,83

Sumber data :Kementerian PANRB 2020

Tabel III-1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Good Governance	69,55	65,35	63,96	69,19	74,24	77,78

Sumber data :Kementerian PANRB

Tabel III-1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerinta han Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Good Governance	70,76	77,78	Melampui

Sumber data :Kementerian PANRB

Tabel III-1.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	RealisasiTh 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerinta han Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Good Governance	77,78	-	-

Sumber data :Kementerian PANRB

Berikut perkembangan Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III-1.A

Indeks Good Governance

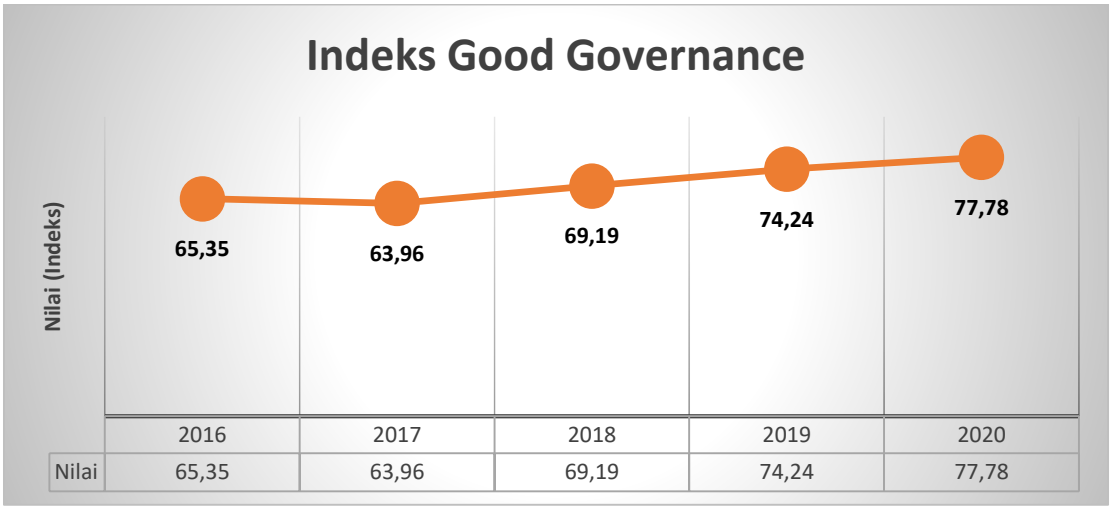

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo sudah lebih akuntabel. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 69,55 maka tercapai hingga 111,83%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang senilai 74,24, maka kenaikan sebesar 4,77%.

Nilai Indeks Good Governance 77,78 menggambarkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Baik. Berikut range / skala kategori dari Indeks Good Governance:

Tabel III-1.6

Kategorisasi Penilaian Indeks Good Governance

Nilai	Kategori
40,00 – 59,99	Buruk
60,00 – 79,99	Baik
80,00 – 100,00	Sangat Baik

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan

korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mengelola setiap 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada road map atau peta jalan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo perlu di lakukan upaya-upaya strategis manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh pimpinan unit kerja dan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Khususnya di perangkat daerah yang langsung memberikan pelayanan publik, termasuk di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel III-1.7

Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	C	B	B	B	B
Realisasi	C	B	B	B	-

Indikator Kinerja Sasaran	Indeks Reformasi Birokrasi
Target Tahun 2016	C
Realisasi Tahun 2016	C
Target Tahun 2017	B
Realisasi Tahun 2017	B
Target Tahun 2018	B

Realisasi Tahun 2018	B
Target Tahun 2019	B
Realisasi Tahun 2019	B
Target Tahun 2020	**B**
Realisasi Tahun 2020	**-**
Target Tahun 2021	B

Tabel III-1.8

Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	-	

Sumber data :Kementerian PANRB

Tabel III-1.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	C	B	B	B	-

Sumber data :Kementerian PANRB

Tabel III-1.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerinta han Yang	Indeks Reformasi Birokrasi	B	-	-

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Akuntabel, Inovatif, dan Transparan				

Sumber data :Kementerian PANRB

Tabel III-1.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	RealisasiTh 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerinta han Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	-	-

Sumber data :Kementerian PANRB

Sebagaimana tabel diatas, realisasi capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 belum bisa dilaporkan karena sampai laporan ini disusun belum ada release dari Kementerian PAN RB. Sedangkan pada tahun sebelumnya, nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2019 adalah 65,77 atau katagori ”B”, demikian hal nya pada tahun 2018 nilainya sudah berkatagori ”B” yaitu dengan nilai 65,58. artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai tersebut telah mengalami peningkatan 0,29%..

Berikut perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III-1.B

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo

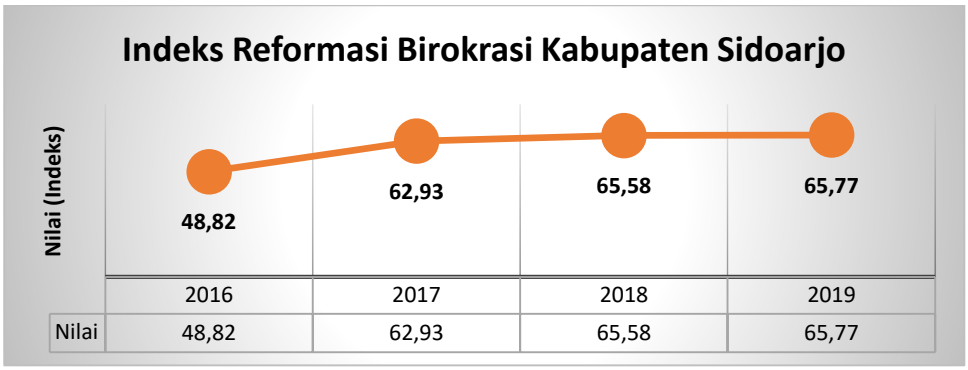

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Adapun rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2019, telah ditindaklanjuti secara bertahap dengan data sebagai berikut :

No	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	PENDUKUNG
1	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi, yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam rencana aksi yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing PD, termasuk juga hasil pemantauan terhadap pelaksanaan *quick win* reformasi birokrasi, agar dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik. Pemantauan hendaknya dilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan yang cukup, dengan keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan PD yang secara aktif dan berkelanjutan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;	1. Sudah dilaksanakan FGD dengan agen perubahan dan tim Kabupaten di Vila Pemda, 2. Pertemuan berkala sekitar 3 bulan di Ruang otoda bagian Organisasi Setda Kab Sidoarjo 3. Penetapan Program Kerja 2020	Terlampir: 1. Surat undangan 2. Notulen 3. Daftar Hadir 4. Program kerja
2	Meningkatkan kebijakan 'agen perubahan' untuk lebih mendorong terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh PD	1. Sudah menetapkan agen perubahan 2020 dengan menunjuk personal yang berkompen 2. Intensifkan FGD/Komunikansi dalam group WA/virtual	Terlampir: 1. SK Agen Perubahan 2. Undangan 3. Daftar Hadir 4. Screanshoot WA Group
3	Melakukan identifikasi/pemetaan keharmonisan terhadap keseluruhan peraturan perundangan yang masih berlaku, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang sebaiknya dilakukan secara berkala. Evaluasi atas efektivitas keberhasilan pelaksanaannya hendaknya dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundangan yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum	1. Sudah dilaksanakan pembagian kerja di Sekretariat daerah optimalsiasi peran asinten dan Bagian sesuai dengan fungsi koordinasi dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi pertauran perundang-undnagan serta kebijakan sebagaimana tertuang dalam IKU Sekretaris daerah 2. Bagian hukum melaksanakan kajian dan evaluasi produk hukum(2020= kajian 1 Perda dan 1 Perbup; 2019 = 3 Perda dan 2 Perbup)	Terlampir: 1. Undangan 2. Notulen 3. Draft Perbup 4. 7 dokumen kajian dari bagian hukum
4	Menjadikan kinerja yang akan diwujudkan dalam RPJMD sebagai dasar dalam menyusun proses bisnis, sehingga program-kegiatan yang dilaksanakan adalah alternatif yang paling efektif dan efisien sebagai upaya mencapai kinerja. Reviu proses bisnis diikuti dengan reviu SOP yang menjadi rincian atas pelaksanaan proses bisnis	1. Telah dibentuk Surat Keputusan Bupati penyusunan proses bisnis 4 Nopember 2019 2. Dilakukan Evaluasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	Terlampir: 1. Undangan Evaluasi 2. SK Bupati

5	Setelah melakukan evaluasi kelembagaan yang menghasilkan *performance based organization,* diteruskan dengan reviu standar kompetensi pegawai SOM yang didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan organisasi dapat berjalan dengan baik sebagai upaya mencapai kinerja	1. Sudah melaksanakan evaluasi kelembagaan yang sudah ditindaklanjuti 10 OPD (Bappeda, DPMPTSP, Sekretariat Daerah, PUBM, secretariat DPRD, Perkim P2CKTR, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Inspektorat, RSUD) 2. SKJ disusun masih dalam JPT, ke depan akan dikembangkanke jabatan administrator, dan jabatan pengawas	Terlampir : 1. Surat Undangan SOTK 2. Notulen 3. PERBUP SOTK 4. Verval PERBUP SOTK
6	Menyelaraskan indikator kinerja individu dengan kinerja organisasi, termasuk yang dituangkan dalam SKP, serta menjadikan kinerja individu tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment,* termasuk dijadikan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja	1. Pada tahun 2020 Pemberian penghargaan yang nilai SAKIP nya A (ada 13 OPD) 2. Mulai tahun 2015 SKP sebagai dasar dala pemberian TPP (presensi dan aktivitas SKP); mulai tahun 2017 Tunjangan prestasi kinerja berdasarkan pada (serapan anggaran, kinerja keuangan, penilaian 360/atasan dan bawahan, rekankerja) 3. Proses penyelarasan Indikator kinerja Organisasi dan Indikator kinerja Individu on proses oleh salah satu agen perubahan tahun 2020 ini.	TERLAMPIR : 1. FC DPA 13 OPD 2. Screen shoot SKP
7	Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan hasil asesmen pegawai, dan identifikasi rencana serta kebutuhan pengembangan kompetensi tersebut, dengan dukungan anggaran yang mencukupi	1. Sudah dilaksanakan dengan adanya Perbup no 85 tahun 2017, dan disempurnakan oleh Perbup no 25 tahun 2018 tentang pengembanagn kompetensi di lingkungan kabupaten sidoarjo	1. PERBUP 85 TAHUN 2017
8	Menindaklanjuti hasil survei terhadap pegawai, dengan melakukan upaya penyegaran terhadap pegawai berupa pelatihan dan sebagainya, selain untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilannya, juga untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai, serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai	1. Sudah dilaksanakan mulai 2017 sampai dengan saat ini untuk peminatan kompetensi dilaksnkaan melalui komunitas pintar ASN (SCCD) oleh BKD 2. Adanya Pedoman Teknis Penyusunan Peta Talenta *(Talent Pool)* Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Sidoarjo	Perbup No 57 Th 2017 Tentang P edoman Teknis Penyusunan Peta Talenta *(Talent Pool)* Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Sidoarjo
9	Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan hasil asesmen pegawai dan identifikasi rencana serta kebutuhan pengembangan kompetensi, dengan dukungan anggaran yang mencukupi	1. 2018-2019 telah melaksanakan penilaian kompetensi bagi jabatan fungisonal umum sesuai dengankelas jabatan, sebagai dasar dalam kesesuaian jabatan dan gap kompetensi, oleh BKD 2. Uji kompetensi calon jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. 3. 2020 telah menyediakan anggaran untuk 40 orang dalam program	1. Hasil rekomendasi penilaian kompetensi 2. SK Penempatan sesuai dengan kompetensinya 3. Peningkatankompetensi melalui pelatihan

		corporate dengan perguruan tinggi S-1 Akuntansi dan S-1 TIK, oleh BKD	4. DPA BKD penganggaran pembiayayan sekolah S-1
10	Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja yang telah dibangun agar terintegrasi, dan penerapannya dilakukan pada seluruh PD	Sudah dilaksanakan dengan aplikasi E-Kinerja (SKP) sebagai bentuk akuntabilitas dalam bekerja	- E-Buddy - Aplikasi SKP
11	Memperkuat penerapan sistem integritas dengan mengimplementasikan kebijakan penerapan WBS dan penanganan benturan kepentingan. terutama implementasinya di berbagai PD, serta melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM terhadap unit kerja pelayanan, dengan dukungan kompetensi APIP yang memadai	1. Secara berkelanjutan mengusulkan OPD untuk mengikuti WBK, maupun meningkatkan ke WBBM 2. Tahun 2020 mengusulkan 3 OPD menuju WBBM (RSUD, DPMPTSP, Kec. Sukodono), dan 5 OPD menuju WBK (BKD, Dinas tenaga Kerja, PKM Sidoarjo, Baaan Pelayanan Pajak Daerah,	1. PERBUP No 56 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2. PERBUP No 38 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintah
12	Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengawasan, sebagai upaya peningkatan integritas pegawai dan upaya pencegahan korups, melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan *whistle blowing system,* dan penanganan benturan kepentingan, terutama implementasinya di berbagai PD, serta melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM terhadap unit kerja pelayanan, dengan dukungan kompetensi APIP yang memadai. Upaya-upaya tersebut dilakukan unruk lebih meningkatkan indeks persepsi anti korupsi	1. Membuka layanan e-konsulting oleh inspektorat 2. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi ASN	• PERBUP No 38 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintah • Perbup no 74 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
13	Mengimplementasikan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar, untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan	1. Sudah dilaksanakan punish and reward pada beberapa OPD akan dikembangkan ke seluruh OPD 2. Pemberian reward berupa pengembangan kompetensi	1. SK Reward and punishment 2. SK Tim Reward and Punishment
14	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki SOP pelayanan yang lebih memudahkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi	1. Sudah melaksanakan pendampingan dalam penyusunan SOP OPD, dan sudah terintegrasi di bagian Organisasi	1. SOP SETDA 2. Probis Setda 3. SK Bupati Peta Bisnis Proses

	informasi yang dilakukan sesuai standar pelayanan		4. SK SOP Setda
15	Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholders* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga *stakeholders* dapat mengetahui hasil perbaikan.	1. Sudah dilaksanakan dengan mengoptimalkan Bidang rendalev Litbang Bappeda berdama bagian Organisasi untuk pengembangan Inovasi daerah, serta mengikutkan dalam kompetensi inovasi pelayanan public Tk Propinsi/Naisonal. 2. Bekreasana denga Kominfo selaku pengembang aplikasi daerah	1. Dokumen calisline 2. Dokumen inovasi lainnya (data base di bagian organisasi 3. SS WEB SETDA 4. SS LPSE PBJ 5. SS BAGIAN PEMBANGUNAN 6. SS P3M PENGADUAN

Berdasarkan hasil suvey persepsi pelayanan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan indeks 3,81 dalam skala 4. Hasil Survei tahun 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,31. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan secara bertahap memberikan dampak positif. Kesenjangan harapan pengguna layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima, berangsur-angsur mengecil.

Hasil survey persepsi anti korupsi menunjukkan indeks 3,95 dalam skala 4. Hasil Survei tahun 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,60. Upaya pembangunan integritas telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan hasilnya mulai dirasakan penerima layanan. Upaya peningkatan ini tetap dilaksanakan secara konsisten dan transparan.

Sedangkan untuk hasil survei internal terhadap 1095 orang responden ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas integritas jabatan menunjukkan 21,88% tidak memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan kinerjanya. Sebanyak 59,38% telah memahami tugas fungsi namun tidak tahu ukuran keberhasilan kinerjanya, serta 18,75% yang telah memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Secara keseluruhan, hasil survei ini mengalami kenaikan positif dari tahun 2018, yang dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

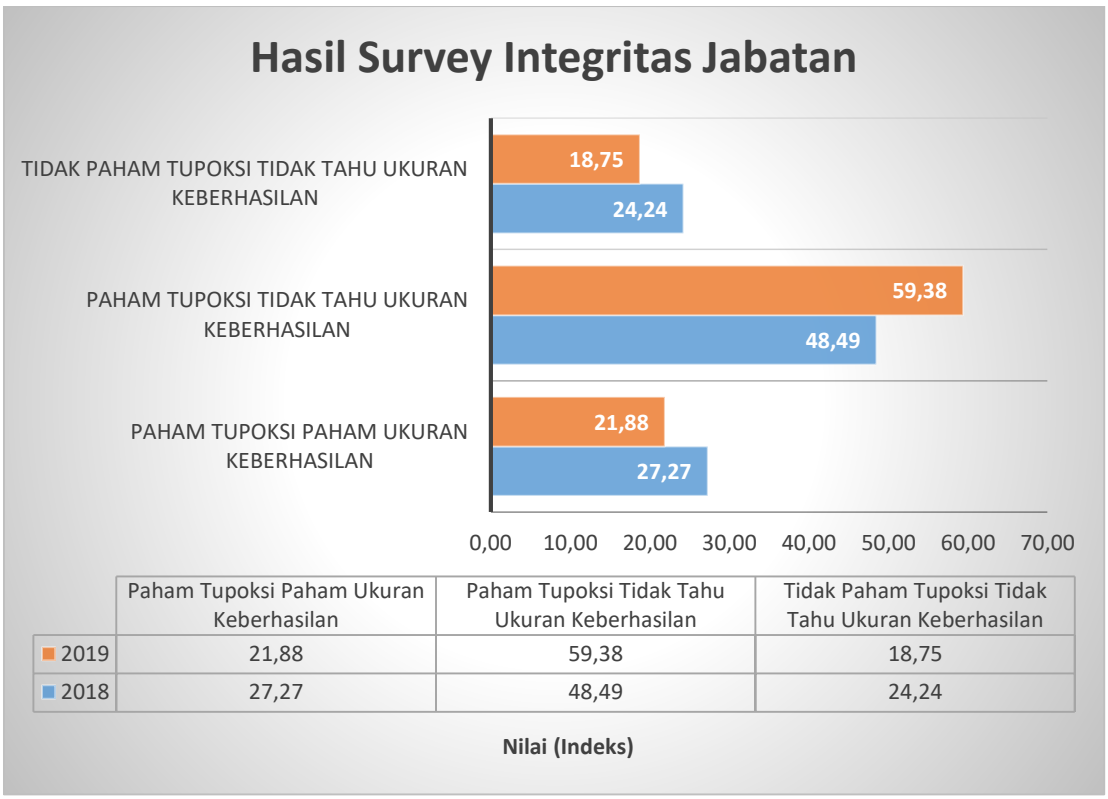

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi KEMENPAN & RB 2019

Sedangkan untuk survei integritas organisasi menunjukkan indeks 3.44 dalam skala 0 – 4. Hasil Survei tahun 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,37 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Indeks
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3.27
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3.55
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3.53
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3.41
Indeks Integritas Organisasi		**3.44**

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan digunakan indikator kinerja :

- Opini atas audit BPK

- Nilai SAKIP Kabupaten
- Status Kinerja EKPPD
- Tingkat Maturitas SPIP

yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-1.12

Pencapaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK	WTP	-	-
	Nilai SAKIP Kabupaten			
	Status Kinerja EKPPD			
	Tingkat Maturitas SPIP			

Tabel III-1.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	-
	Nilai SAKIP Kabupaten	B	BB	A	BB	-
	Status Kinerja EKPPD	ST	ST	ST	ST	-
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	-

Sumber data :Bappeda

Tabel III-1.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK		-	
	Nilai SAKIP Kabupaten		-	
	Status Kinerja EKPPD		-	
	Tingkat Maturitas SPIP		-	

Sumber data : .....

Tabel III-1.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK		..	
	Nilai SAKIP Kabupaten		..	
	Status Kinerja EKPPD			
	Tingkat Maturitas SPIP	-	..	

1. Opini Atas Audit BPK

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Sasaran	Opini Atas Audit BPK
Baseline Tahun 2015	WTP
Target Tahun 2016	WTP
Realisasi Tahun 2016	WTP
Target Tahun 2017	WTP
Realisasi Tahun 2017	WTP
Target Tahun 2018	WTP
Realisasi Tahun 2018	WTP
Target Tahun 2019	WTP
Realisasi Tahun 2019	WTP
Target Tahun 2020	**WTP**
Realisasi Tahun 2020	***)**
Target Tahun 2021	WTP

Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya yaitu pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIKSDA menjadi terintegrasi dengan RDS (*Regional Development Sistem*), serta penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 09 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :

a. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
b. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasinal Kabupaten Sidoarjo), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
d. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
e. Optimalisasi tatakelola barang pakai habis berbasis akrual.

Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik. Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III-1.16

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2020	(Masih dalam tahap penilaian)

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 sampai dengan 2015 laporan keuangan Kabupaten Sidoarjo dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 opini BPK atas pemeriksaan LKPD naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni tanpa paragraph penjelasan, dan untuk tahun 2020 masih dalam proses penilaian.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan mengambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan.

Upaya pencapaian target WTP tahun 2020 ini didukung oleh 4 (empat) program prioritas dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

   Program ini diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

   a. Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 OPD telah tepat dalam menentukan kode rekening pada RKA OPD.
   b. Seluruh dokumen penganggaran pada 48 OPD (100%) telah dipublikasikan melaui media publik.
   c. Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 OPD telah memenuhi ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan PAPBD).
   d. Seluruh Perangkat Daerah telah tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP (Akrual).
   e. 95,7% Perangkat Daerah tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan.

f. Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 OPD telah memenuhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD).

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah. Program ini diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
   a. Prosentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD berjumlah 31% dari target 30,94%.
   b. Seluruh proses pemindahtanganan BMD telah dilaksanakan melalui lelang umum.
   c. Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 OPD telah tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD.
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

   Program ini diampu oleh Inspektorat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
   a. Seluruh Perangkat Daerah telah memiliki Nilai SAKIP dengan minimal B. 10 % OPD bahkan telah memperoleh predikat A dan diberikan insentif anggaran tambahan sebagai reward.
   b. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara telah menurun menjadi hanya 4,08%. Hal ini memberikan arti bahwa seluruh OPD telah bekerja keras untuk taat administrasi penyelenggraan keuangan daerahny masing-masing.
   c. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo didapati predikat Terdefinisi. Hal ini juga didukung berbagai upaya 48 OPD dalam meningkatkan kematangan SPIP di wilayah kerjanya.
   d. Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara menurun menjadi 0.93%. hal ini menunjukkan bahwa semua desa telah menuju target desa bebas temuan administrasi dan kematangan pengelolaan keuangan desa.
   e. Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti mencapai 96% untuk tahun 2020 ini. Sedikit yang

belum dapat ditindaklanjuti salah satunya dikarenankan harus melibatkan pihak eksternal lain di pemkam Sidoarjo, sehingga fungsi koordinasi menjadi sedikit terkendala.

f. Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat yang ditindaklanjuti oleh OPD meningkat menjadi 75%.

g. Seluruh kasus/pengaduan yang datang baik dari individu maupun instansi telah ditindaklanjuti secara proporsional dan professional.

4. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Program ini diampu oleh Sekretariat DPRD. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan kegiatan Banggar, KUA, KUPA, APBD dan PAPBD ,dan juga kegiatan BK, Komisi, dan Monev telah dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Tidak ditemui kendala atau hambatan dalam opersional pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga outputnya dapat diselesaikan dengan baik.

b. Penyelenggaraan kegiatan dialog dan jaring aspirasi masyarakat data terlaksana dengan baik. Terdapat 450 kegiatan aspiratif ini dengan tingkat kehadiran rata-rata 80% dari jumlah undangan yang telah disusun.

2. Nilai SAKIP Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

Indikator Kinerja Sasaran	Indeks Reformasi Birokrasi
Baseline Tahun 2015	B
Target Tahun 2016	B
Realisasi Tahun 2016	B
Target Tahun 2017	B
Realisasi Tahun 2017	BB
Target Tahun 2018	BB
Realisasi Tahun 2018	A

Target Tahun 2019	BB
Realisasi Tahun 2019	BB
Target Tahun 2020	**A**
Realisasi Tahun 2020	***)**
Target Tahun 2021	A

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 masih dalam tahap penilaian. Target Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 adalah A (Memuaskan), meskipun di tahun 2019 memperoleh BB (Sangat Baik), hal ini tidak menyurutkan motivasi dan semangat seluruh komponen pemerintahan untuk berkinerja secara akuntabel menuju nilai SAKIP A (Memuaskan) di tahun 2020 seperti kategori yang pernah diraih di tahun 2018.

Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2012, sebagaimana grafik :

Grafik III-1.C

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo

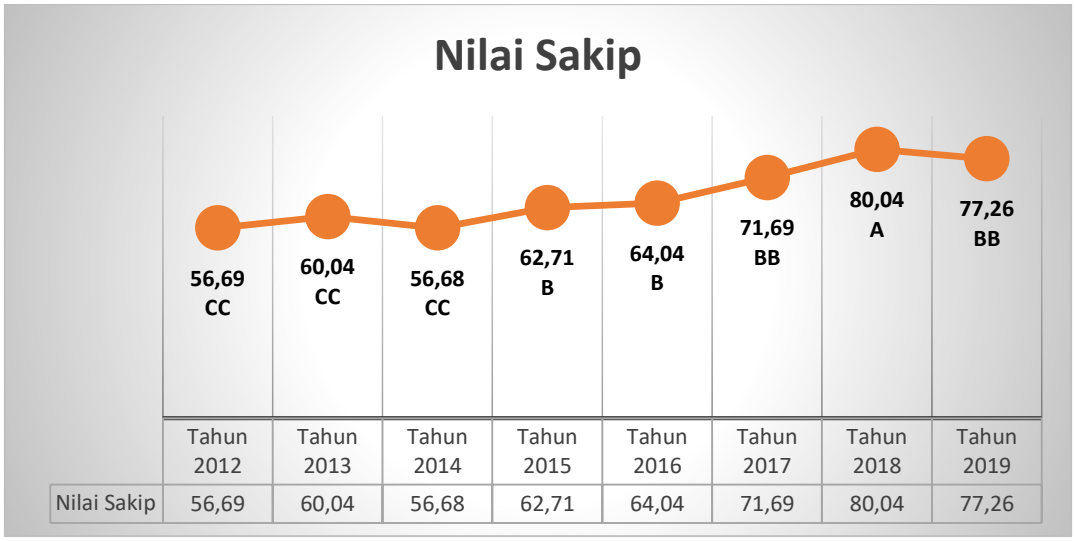

Sumber Data : LHE SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerapan SAKIP ini sehingga mampu mendorong penerapan budaya kinerja sejak proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di tahun 2020, sebagai berikut :

- Dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD mempertimbangkan fungsi – fungsi yang terkait, bukan OPD yang terkait, sehingga dapat dianalisa fungsi – fungsi yang kurang efektif.
- Mereviu kembali penyusunan peta proses bisnis dengan mempertimbangkan langkah strategis pencapaian kinerja mulai level Kabupaten, OPD, hingga level individu dengan mengadakan asistensi yang didampingi evaluator nasional
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja, serta mereviu kembali aspek – aspek yang mempengaruhi tunjangan kinerja dengan mengacu pada kualitas manajemen kinerja OPD
- Menyusun Analisa Resiko seluruh Kegiatan OPD bersamaan dengan penyusunan KAK pada saat penyusunan Renja OPD
- Setiap Laporan Kinerja OPD, sebelum diupload pada aplikasi milik Kementerian PAN dan RB, terlebih dahulu direview oleh Tim APIP
- Pengembangan aplikasi e-monev yang tidak hanya mengevaluasi kinerja output, tetapi juga kinerja outcome
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja
- Pelaksanaan Evaluasi SAKIP ke seluruh OPD dengan menghadirkan Tim evaluator Nasional sebagai pengarah
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja

Selain itu, langkah strategis diatas juga didukung dengan upaya melalui 3 program proritas sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

   Program ini diampu oleh Sekretariat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

   a. Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan telah Disusun Tepat Waktu. Format dan substansi telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, laporan kinerja juga telah direview dan dilakukan audit internal oleh Inspektorat Daerah.
   b. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah berjumlah 48 OPD telah disusun sesuai dengan dokumen Perencanaan diatasnya. Hal ini untuk menggambarkan rangkaian pohon kinerja agar arah pembangunan untuk mencapai misi dapat optimal tercapai.

2. Program perencanaan pembangunan daerah

   Program ini diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 diantaranya adalah melalui konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah. dari total 48 OPD yang ada, tidak kurang dari 75% jumlahnya telah melaksanakan konsistensi dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dengan dukungan penganggaran yang tepat akan menghasilkan *outcome* yang *outstanding*.

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

   Program ini diampu oleh Inspektorat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

   a. Seluruh Perangkat Daerah telah memiliki Nilai SAKIP dengan minimal B. 10 % OPD bahkan telah memperoleh predikat A dan diberikan insentif anggaran tambahan sebagai reward.
   b. Seluruh kasus/pengaduan yang datang baik dari individu maupun instansi telah ditindaklanjuti secara proporsional dan professional.

3. Nilai Kinerja EKPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Indikator Kinerja Sasaran	Nilai Kinerja EKPPD
Baseline Tahun 2015	ST
Target Tahun 2016	ST
Realisasi Tahun 2016	ST
Target Tahun 2017	ST
Realisasi Tahun 2017	ST
Target Tahun 2018	ST
Realisasi Tahun 2018	ST
Target Tahun 2019	ST
Realisasi Tahun 2019	ST
Target Tahun 2020	**ST**
Realisasi Tahun 2020	***)**
Target Tahun 2021	ST

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 memperoleh nilai (score) 3,5491 dengan status kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan mendapat peringat ke-2 se-Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo sudah pernah mendapatkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI tahun 2017 yang diselenggarakan di Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo, serta Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tahun 2015. Sehubungan dengan telah berhasilnya Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan tersebut, maka Kabupaten Sidoarjo harus tetap dapat mempertahankan prestasi kebanggannya.

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

Grafik III-1.D

Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo

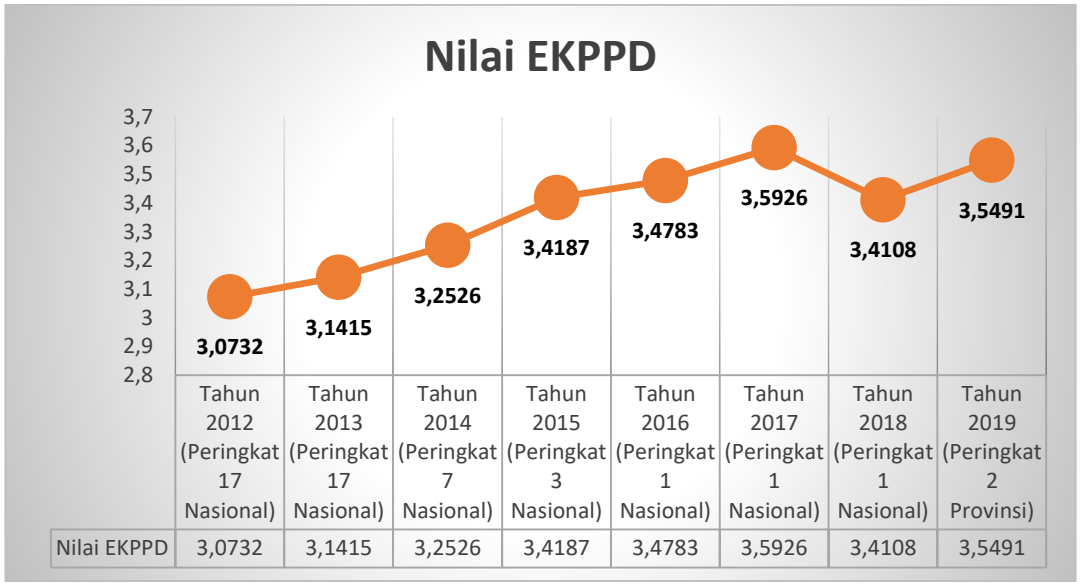

Sumber Data : Hasil EKPPD Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019

Upaya yang dilakukan adalah membuat kebijakan satu OPD satu Inovasi, sehingga kinerja OPD menjadi sangat tinggi dan memiliki nilai lebih. Selain itu, untuk menjaga tren Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan beberapa program prioritas pendukung sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

   Program ini diampu oleh Sekretariat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

   a. Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) sebenarnya telah berjalan baik, namun dengan terbitnya Permengadri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permengadri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian didetailkan pada Permendari Nomor 77 Tahun 2020, seluruh Pemda wajib menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) milik Kemendagri. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai

bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kabupaten Sidoarjo telah 100% menerapkan SIPD dalam proses pembangunan daerah.

b. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan target mencapai 87% dari total. Nilai pencapaian ini masih dapat ditingkatkan lagi melalui pendampingan dan pemahaman proses penganggaran dan perencanaan target kerja di masing-masing perangkat daerah.

2. Program perencanaan pembangunan daerah

Program ini diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

a. Usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD mencapai 95%. Angka capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mendasarkan perencanaannya pada analisis kebutuuhan atau urgensi. Dengan demikian hasil pembangunan diharapkan dapat secara langsung dirasakan masyarakat.

b. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah di masing masing perangkat daerah yag berjumlah 48, mengalami peningkatan hingga menjadi 90%. Angka ini sebenarnya masih diharapkan lebih mengingkat apalagi didukung dengan upaya sinkronisasi-sinkronisasi antar dokumen perencanaan.

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini diampu oleh Inspektorat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

a. Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti mencapai 96% untuk tahun 2020 ini. Sedikit yang belum dapat ditindaklanjuti salah satunya dikarenankan harus melibatkan pihak eksternal lain di pemkam Sidoarjo, sehingga fungsi koordinasi menjadi sedikit terkendala.

b. Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat yang ditindaklanjuti oleh OPD meningkat menjadi 75%. Tingkat

kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi menunjukkan bahwa pemahaman pelaksanaan administrasi keuangan berjalan baik dan menjadi budaya berkinerja.

4. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Sasaran	Tingkat Maturitas SPIP
Baseline Tahun 2015	N/A
Target Tahun 2016	N/A
Realisasi Tahun 2016	N/A
Target Tahun 2017	N/A
Realisasi Tahun 2017	Level 2 (terdefinisi)
Target Tahun 2018	Level 3 (terdefinisi)
Realisasi Tahun 2018	Level 3 (terdefinisi)
Target Tahun 2019	Level 3 (terdefinisi)
Realisasi Tahun 2019	Level 3 (terdefinisi)
Target Tahun 2020	**Level 3 (terdefinisi)**
Realisasi Tahun 2020	**Level 3 (terdefinisi)**
Target Tahun 2021	Level 3 (terdefinisi)

Sebagaimana dalam target RPJMN bahwa di tahun 2020 tingkat kematangan harus sudah menunjukkan level 3 (terdefinisi), berdasarkan laporan quality assurance (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPKP bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,09. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada

seluruh kegiatan dan sudah memenuhi target sebagaimana diamanatkan pada RPJMN.

Tabel III-1.17

Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Level Kematangan
1	2015	Level 2 (Berkembang)
2	2016	Level 2 (Berkembang)
3	2017	Level 3 (Terdefinisi)
4	2018	Level 3 (Terdefinisi)
5	2019	Level 3 (Terdefinisi)
6	2020	Level 3 (Terdefinisi)

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Upaya untuk meningkatkan kematangan dalam pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan melalui program prioritas sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

   Program ini diampu oleh Inspektorat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

   a. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara telah menurun menjadi hanya 4,08%. Hal ini memberikan arti bahwa seluruh OPD telah bekerja keras untuk taat administrasi penyelenggraan keuangan daerahny masing-masing.

   b. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo didapati predikat Terdefinisi. Hal ini juga didukung berbagai upaya 48 OPD dalam meningkatkan kematangan SPIP di wilayah kerjanya.

   c. Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara menurun menjadi 0.93%. hal ini menunjukkan bahwa semua desa telah menuju target desa bebas temuan administrasi dan kematangan pengelolaan keuangan desa.

2. Program Pengembangan ASN.

   Program ini diampu oleh Badan Kepegawaian Daerah. Capaian program ini pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

a. BKD telah melaksanakan program Talent Pool bagi ASN dengan capaian 525 orang untuk tahun 2020. Peningkatan profesionalitas pegawai, salah satu tujuannya akan menghasilkan ASN dengan kompetensi / *skill* yang sesuai kebutuhan dan bertindak sesuai prosedur tanpa melanggar/ mengenyampingkan peraturan yang berlaku (bertindak *on the track*).

b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dilaksanakan melalui pengembangan karir dan evaluasi kinerja individu. Seluruh pegawai telah dilakukan evaluasi kinerja baik secara hirarki maupun model sampling oleh BKD kepada seluruh ASN. Tidak kurang dari 76% evaluasi kinerja ASN telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Angka ini diharapkan dapat lebih meningkat dengan upaya Talent Pool, pendampingan dan kediklatan.

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Indikator Kinerja Sasaran	Indeks Pelayanan Publik
Baseline Tahun 2015	N/A
Target Tahun 2016	N/A
Realisasi Tahun 2016	N/A
Target Tahun 2017	N/A
Realisasi Tahun 2017	N/A
Target Tahun 2018	Baik

Realisasi Tahun 2018	Baik
Target Tahun 2019	Baik
Realisasi Tahun 2019	Baik
Target Tahun 2020	**Baik**
Realisasi Tahun 2020	**Sangat Baik**
Target Tahun 2021	Baik

Tujuan dari dilaksanakannya Evaluasi Pelayanan Publik, adalah :

- Sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat

Metodologi evaluasi dan penilaian adalah sebagai berikut :

Indikator dan Range Nilai Evaluasi Pelayanan Publik dengan menggunakan Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (DC)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (DC)
1,51 – 2,00	D	Buruk
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
0 – 1,00	F	Gagal

Gambar Metodologi Evaluasi Penilaian Pelayanan Publik

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Bapak Bupati Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu SIPPADU Aplikasi Perijinan Terpadu (TOP 33), SIMANIES Aplikasi untuk mencegah kematian ibu melahirkan (TOP 99), dan SIPEKAT Aplikasi kenaikan pangkat paperless (TOP 99).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 111 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel III-1.18

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo

No.	Unit Pelayanan Yang di Sampling	Nilai (Indeks)	Konversi
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**4,55**	**Pelayanan Prima (A)**
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,98	Baik (B)
		4,27	**Sangat Baik (A-)**

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Tahun 2021

Pembangunan Mal Pelayanan Publik, Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Kelompok Budaya Kerja (KBK) mendorong tercapainya kualitas pelayanan publik yang Sangat Baik. Diharapkan di tahun 2020 akan semakin banyak unit pelayanan yang mendapatkan sampling dan memiliki inovasi yang efektif, sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik juga semakin meningkat.

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik di Tahun 2019 dengan nilai 4,16 maka terdapat peningkatan nilai sebesar 0,11. Hal ini membuktikan bahwa seluruh rekomendasi tahun 2019 sedang ditindaklanjuti secara bertahap di tahun 2020. Dan setiap tahunnya juga dilaksanakan

evaluasi mandiri untuk penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing perangat daerah.

Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Berkaitan dengan hal itu, untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah.

Berdasarkan SK Mendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020, didapati hasil indeks inovasi daerah tahun 2020 adalah 3,983 dengan predikat **Sangat Inovatif** dan urutan ke-29 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat serius dilaksanakan. Secara berkelanjutan, seluruh perangkat daerah diintruksikan untuk memperbaiki kualitas layanan, melakukan penyederhanaan prosedur dan persyaratan serta memberikan jiwa hospitality yang ramah dan baik.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE.

Indikator Kinerja Sasaran	Indeks SPBE
Baseline Tahun 2015	N/A
Target Tahun 2016	N/A
Realisasi Tahun 2016	N/A
Target Tahun 2017	N/A
Realisasi Tahun 2017	N/A
Target Tahun 2018	2,55
Realisasi Tahun 2018	2,55
Target Tahun 2019	2,6
Realisasi Tahun 2019	3,13
Target Tahun 2020	**2,65**
Realisasi Tahun 2020	**3,13**
Target Tahun 2021	2,7

Tujuan Evaluasi SPBE antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi pusat dan Pemerintah daerah;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Grafik III-1.E

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo

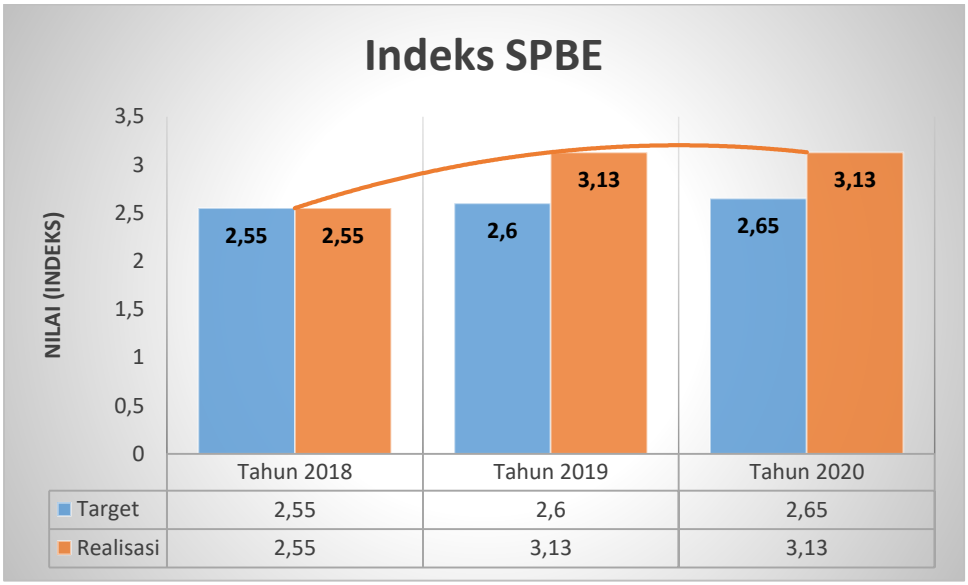

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Hasil Capaian Indeks Smart City pada tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019, hasilnya yaitu **3,13** dengan predikat **Baik.** Hasil ini dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada 2020 ini nilai indeks SPBE tidak mengalami kenaikan atau penurunan karena Kabupaten Sidoarjo tidak terpilih dalam evaluasi eksternal yang dilaksanakan Kemenpan. Salah satu penyebab tidak terpilihnya adalah karena kondisi pandemi dan pemerataan kematangan SPBE di seluruh wilayah Indonesia terutama yang indeksnya masih di bawah rata-rata nasional. Dengan target indeks SPPB nasional sebesar 2,6, Kabupaten Sidoarjo dengan 3,13 diartikan mengalami kenaikan positif sebesar 120,38%.

Dalam masa pandemi covid-19 di tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo melaksanakan suatu terobosan baru terkait sistem aplikasi elektronik pendamping kerja pegawai. Sistem dimaksud disebut dengan E-buddy. E-buddy merupakan integrasi dari sistem aplikasi yaitu e-surat, e-disposisi, e-meeting, e-presensi dan e-kinerja. Sistem ebuddy dengan berbasis web dan

android terbukti mampu menjaga produktifitas kinerja ASn dan Non ASN utamanya di era pandemi dan pemberlakuan sistem kerja Wok From Home (WFH).

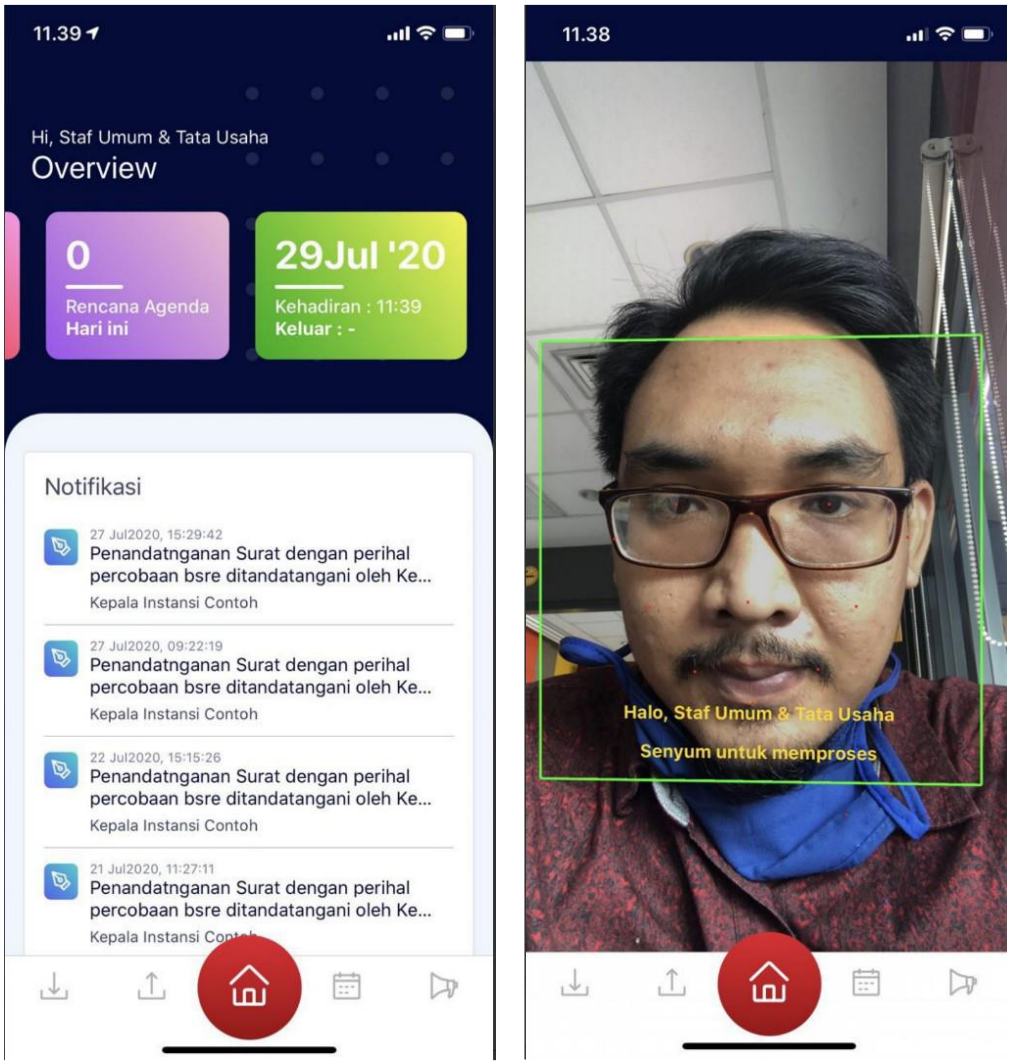

E-Buddy pada ponsel Android

Gambar diatas adalah salah satu penggunaa e-buddy untuk pengelolaan naskah dinas elektronik dan presensi pegawai. E-buddy telah menerapkan tanda tangan elektronik dengan bekerjasama Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga validitas naskah dinas memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan surat manual.

Pengunaan ebuddy telah mencakup seluruh unit kerja pemerintah yang diataranya adalah 48 OPD, 29 Kelurahan, 26 Puskesmas, 322 Desa, 470 Sekolah Dasar Negeri dan 46 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Dengan demikian proses penyusunan konsep, pengesahan dan distribusi naskah dinas dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini juga dapat dilakukan tanpa terbatas tempat dan waktu bekerja. Efektifitas dan efisiensi cara bekerja pegawai, menjadi nilai penting dari implementasi e-buddy di Kabupaten Sidoarjo. Dampaknya seluruh pekerjaan administrative dapat dilaksanakan tanpa perlu datang ke kantor atau WFH. Seluruh pejabat pimpinan instansi telah memiliki sertifikat elektronik untuk melakukan penandatanganan/pengesahan naskah dinas di e-buddy.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
D a r i : Asisten Administrasi Umum
Tanggal : 10 Agustus 2020
Nomor : 065/5107/438.1.3.1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Dalam rangka kegiatan **Sosialisasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**, bersama ini mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah untuk memberikan pengarahan kebijakan tata naskah dinas dalam kegiatan dimaksud. Adapun kegiatan akan dilaksanakan secara online pada :

hari : Kamis
tanggal : 13 Agustus 2020
waktu : 12.00 – 14.00 WIB
tempat : *zoom meeting.*

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Ditandatangani secara elektronik oleh
SRI WITARSIH, SH., MH
NIP. 196112011991032003
SRI WITARSIH, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 199103 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Contoh naskah dinas menggunakan Tanda Tangan Elektronik

MISI 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan. 2 indikator tujuan. 2 sasaran dan 4 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel III-2.1
Tingkat Keberhasilan Misi 2

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	TIDAK BERHASIL
2.	Indeks GINI	-
Sasaran : Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat		
3.	Pendapatan Perkapita	-
Sasaran : Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat		
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	KURANG
5.	Tingkat Kemiskinan	SANGAT BERHASIL
6.	Persentase Desa Maju	SANGAT BERHASIL

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Pandemi *Virus Corona Disease* (COVID-19) yang muncul di awal tahun 2020 memberikan dampak terhadap sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. khususnya pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Sehubungan dengan hal tersebut target dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo juga mengalami perubahan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berikut uraian hasil dan analisis pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan

nasional. Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah, Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK 2010 mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan,

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III-2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	**1,4 - 2,5*)**	**-3,68**	**-262,86**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah -3,68% dari target yang diharapkan adalah 2,5%. Dari hasil realisasi maka capaiannya turun sebesar 262,86% dari target.

Tabel III-2.3
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 - 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi (%)				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	**2,5*)**	5,51	5,80	6,02	5,99	**-3,68**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar 5,99 % maka pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami **penurunan** sebesar **161,44 %**

Tabel III-2.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	**-3,68**	**-2,19**	**68%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
Infografis Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia rilis 5 Feb 2021

Data pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV Tahun 2020 pada -2.19. Pertubumhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dengan selisih 1,49 atau sebesar 68% dari capaian nasional.

Tabel III-2.5
Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dengan Target 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021 (%)	Realisasi 2020 (%)	Ket.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	5,85	**-3,68**	**259%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dengan target pertumbuhan ekonomi pada masa akhir RPJM sebesar 5,85% perbaikan ekonomi harus meningkat sebesar 259% dari realisasi tahun ini.

2. INDEKS GINI

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan. Tinggi jika koefisien gini bernilai 0.50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0.36-0.49 dan rendah jika kurang dari 0.36.

Realisasi dan perbandingan Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III-2.6
Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Indeks GINI	**0.34-0,35*)**	****)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020
**) Data belum dirilis

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kisaran rendah, dimana telah dilakukan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk Sidoarjo wilayah barat dan wilayah timur, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan yaitu Rumah Sakit di wilayah barat. Selain itu juga pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan penghubung, sehingga usaha ekonomi masyarakat di semua wilayah di Kabupaten Sidoarjo dapat terhubung dengan baik, untuk mengurangi angka kesenjangan.

Tabel III-2.7
Realisasi Indeks GINI Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi (%)				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Indeks GINI	**0.34-0,35*)**	0,37	0,34	0,35	0,31	****)**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020
**) Data belum dirilis

Untuk capaian tahun 2020 berdasarkan angka sementara mencapai kisaran 0,34 sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0,31 maka capaian di tahun 2020 sudah memenuhi target. Upaya peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal dan terluar sudah diupayakan untuk pemerataan pendapatan.

Tabel III-2.8
Perbandingan Indek GINI Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020		Ket.
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Indeks GINI	****)**	**0.381**[1]	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
**) Data belum dirilis

Indeks GINI Nasional pada Maret 2020 adalah sebesar 0.381 termasuk kategori

[1] BPS, 2020, *Berita Resmi Statistik-Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2020*, No. 57/07/Th. XXIII 15 Juli 2020, Jakarta, dilihat 24 Februari 2021, https://ppukab.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/98/-nasional--gini-ratio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-381.html.

rendah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo maka capaian tahun 2021 terbilang masih dalam proporsi yang lebih baik.

Tabel III-2.9
Perbandingan Realisasi Indeks GINI Tahun 2020
dengan Target 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Indek GINI	0,37	**)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
**) Data belum dirilis

SASARAN : Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

3. PDRB PERKAPITA

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak bisa secara langsung diartikan meningkat pula kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut harus bisa dipastikan dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan relatif kurang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat jika pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Salah satu indikator yang dianggap bisa lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita. Dengan definisi PDRB perkapita adalah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. dianggap bahwa tiap penduduk juga ikut merasakan peningkatan atau hasil pertumbuhan jika terjadi peningkatan PDRB perkapita di suatu daerah.

Dalam rangka penguatan pendapatan perkapita masyarakat terdapat program proiritas pada Perangkat Daerah meliputi :

1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
   - Program penumbuhan dan pengembangan IKM
   - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan

pedagang informal

- Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat

2) Dinas Pemuda dan Olah Raga
   - Program Pengembangan Objek, promosi dan usaha pariwisata
3) Dinas Pangan dan Pertanian
   - Program Program Pengembangan Objek, promosi dan usaha pariwisata
   - Program Peningkatan Produksi Peternakan/ Kehewanan dan Hasil Hewan
   - Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
4) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
   - Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi
   - Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
5) Dinas Perikanan
   - Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam
   - Program Peningkatan produksi perikanan budidaya
   - Program Pengolahan kesehatan ikan dan lingkungan
6) Badan Pengelolaan Pajak Daerah
   - Program Pendataan, Peningkatan & Pengembangan Pajak Daerah
7) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
   - Program Pendataan, Peningkatan & Pengembangan Pajak Daerah
   - Peningkatan kualitan Kelembagaan Koperasi

Adapun realisasi PDRB Perkapitan Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III-2.10
PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		(ribu rupiah)		
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	PDRB perkapita	**86.801**	****)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
**) Data belum dirilis

PDRB Perkapita perkapita Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 adalah sebesar…..dibandingkan dengan target sebesar …. Maka capaian PDRB perkapita mengalami peningkatan/ penurunan sebanyak…… Peningkatan/ Penurunan ini di dominasi oleh sektor……

Tabel III-2.11
Realisasi PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
		ribu rupiah					
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	PDRB perkapita	**86.801**	74.411	79.810	85.385	90.015	****)**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
**) Data belum dirilis

Dari data 5 tahun terakhir terlihat bahwa terdapat peningkatan besaran PDRB Perkapita. Pada periode 5 tahun terakhir, PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo adalah 74,41 juta rupiah (2016); 79,81 juta rupiah (2017); 85,38 juta rupiah (2018); 90,01 juta rupiah (2019) dan ….. juta rupiah (2020).

Tabel III-2.12
Perbandingan Realisasi PDRB Perkapita Tahun 2020
dengan Target 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
		ribu rupiah		
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	PDRB perkapita	**91.061**	**)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
**) Data belum dirilis

Untuk dapat mencapai target PDRB perkapita sebesar 91,06 juta rupiah pada tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo didukung oleh program kegiatan :……

SASARAN : Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Adapun program prioritas pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mendukung pelaksanaanya meliputi :

1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
   - Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
2) Dinas Tenaga Kerja
   - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
   - Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan penyelenggaraan Transmigrasi
   - Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III-2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		(%)		
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,82-6,47*)	10,97	30,45

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah 10,97 lebih tinggi dari target RPJMD yaitu 5,82-6,47, dengan demikain capaian TPT adalah sebesar 30,45%. Kenaikan presentase pengangguran terutama disominasi oleh sektor industri sebagai dampak efisiensi di masa pandemi

COVID-19.

Tabel III-2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi (%)				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,82-6,47*)	6,12	4,97	4,73	4,72	**10,97**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, presentase TPT tahun ini adalah paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berbagai program kegiatan dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka di tahun 2020 ini telah dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Tabel III-2.15
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**10,97**	**7,07**[2]	155%

[2] BPS, 2020, *Berita Resmi Statistik-Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*, No.86/11/Th. XXIII 05 November 2020, Jakarta, dilihat 24 Februari 2021, https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Data Tingkat Pengangguran Nasional (TPT) pada bulan Agustus 2020 berada pada presentase 7,07. Dibandingkan dengan TPT Kabupaten Sidoarjo maka berada pada posisi **dibawah** TPT Nasional dengan capaian sebesar 155%.

Tabel III-2.16
Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
		%		
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**5,19**	**10,97**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Untuk mencapai target TPT di tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan beberapa program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

4. TINGKAT KEMISKINAN

Konsep yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan didasarkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo di dukung oleh program prioritas yang terdapat pada Dinas Sosial meliputi :

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

tpt--sebesar-7-07-persen.html

Tabel III-2.17
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		(%)		
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	**7,16-8,58*)**	**5,59**	121,93%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan proyeksi pasca COVID-19 sesuai dokumen RKPD perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Realisasi tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 adalah sebesar 5,59 berada di bawah target RPJMD pada kisaran 7,16-8,58 dengan presentase capaian sebesar 121,93%. Dengan capaian sebesar 5,59% maka jumlah penduduk miskin di Sidoarjo mencapai 127,05 ribu jiwa.

Tabel III-2.18
Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi (%)				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	**7,16-8,58*)**	6,39	6,23	5,69	5,32	**5,59**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan proyeksi pasca COVID-19 sesuai dokumen RKPD perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin menurun, dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 masih mencapai 6,39, kemudian turun berturut-turut hingga menjadi 5,32% di tahun 2019, dan naik pada 5,59% di tahun 2020. Kenaikan pada tahun 2020 ini masih di bawah angka kemiskinan di tahun 2017 dan di bawah target yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD 2020. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 127,05 ribu jiwa (5,59 persen), bertambah 7,76 jiwa dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 119,29 ribu jiwa

Tabel III-2.19
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	**5,59**	**9,78**[3]	57,56%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Pada Maret 2020 presentase penduduk miskin secara nasinal berada pada 9,78, jika dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo maka berada pada posisi lebih baik dari pada presentase nasional. BPS menghimpun bahwa secara nasional presentase penduduk miskin di wilayah perkotaan mengalami kenaikan dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Tabel III-2.20
Perbandingan Realisasi Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
		(%)		
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,34	**5,59**	**-**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Target tingkat kemiskinan tahun 2021 adalah sebesar 6,34, dengan realisasi tahun ini sebesar 5,59 maka Kabupaten Sidoarjo optimis realisasi tahun 2021 di bawah target yang ditetapkan. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi,

[3] BPS, 2020, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2020*, Katalog 3205022, p.9, Jakarta, dilihat 24 Februari 2021, https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/84ae76716e5c727c36884cae/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2020.html

stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor potensial daerah, dan mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

5. PERSENTASE DESA MAJU

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju,

Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa,

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

a. komponen Indeks Desa Membangun;
b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun,

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaa, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa. Salah satu input (fokus) dalam

perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Program yang mendukung pelaksanaan Desa Maju di Kabupaten Sidarjo yaitu :

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
   - Program Peningkatan Kaberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
2) Kecamatan
   - Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan

Berikut merupakan perkembangan Desa Maju dan Indek Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020, sebagai berikut :

Tabel III-2.21
Presentase Desa Maju Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		(%)		
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Presentase Desa Maju	**31,68**	**42,55%**	134%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Target Presentase Desa Maju untuk tahun 2020 dalam RJMD adalah sebesar 31,68, dengan realisasi presentase sebesar 42,55. Realisasi ini tercapai dengan presentase sebesar 134%.

Tabel III-2.22
Indek Desa Maju (IDM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020

No	Tahun	Status Desa					Total
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1.	2016	0	57	189	71	5	322
		0%	17,70%	58,70%	22,04%	1,55%	100%
2.	2017	0	66	207	48	1	322
		0%	20,49%	64,29%	14,91%	0,31%	100%
3.	2018	0	41	278	1	2	322
		0%	12,73%	86,34%	0,31%	0,62%	100%
4.	2019	2	106	211	2	1	322
		0,62%	32,92%	65,53%	0,62%	0,31%	100%
5.	**2020**	**2**	**137**	**180**	**2**	**1**	**322**
		0,62%	**42,55%**	**55,90%**	**0,62%**	**0,31%**	**100%**

Di lihat dari jumlah Desa yang ditargetkan masuk status Desa Maju pada tahun 2020 adalah sebanyak 102 desa dengan realisasi yang dicapai sebanyak 137 desa. Tahun 2019 sebanyak 106 desa dalam status Desa maju, pada tahun 2020 bertambah 31 desa. Dua desa dalam status desa mandiri yaitu Desa Bungurasih Kecamatan Waru dan Desa Bangah Kecamatan Gedangan. Kedua desa mandiri dapat menjadi contoh untuk peningkatan status desa maju menjadi mandiri. Sedangkan 2 Desa yang masih dalam status Tertinggal yaitu Desa Renokenongo Kecamatan Porong dan Desa Besuki Kecamatan Jabon, dan 1 Desa dalam status sangat tertinggal adalah Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin. Ketiga Desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal merupakan desa terdampak Lumpur Lapindo. Pemerintah telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menggabungkan desa-desa ini ke wilayah desa terdekat.

Tabel III-2.23
Perbandingan Realisasi Presentase Desa Maju Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
		(%)		
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Presentase Desa Maju	36,65	42,55	-

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Target presentase desa maju di Tahun 2021 adalah sebesar 36,65, dengan capaian di tahun 2020 yang sudah melampaui target tahun berikutnya maka diharapkan presentase desa maju akan lebih besar dari realisasi tahun ini.

MISI 3. Meningkatkan Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	SANGAT BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	SANGAT BERHASIL
2.	Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)	BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
1.	Angka Harapan Hidup	SANGAT BERHASIL

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak ke segala sector kehidupan, salah satunya berpengaruh pula terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pembangunan sektor-sektor yang terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kab Sidoarjo dalam kurun waktu satu dasa warsa ini, telah tertata dengan baik. Contohnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Hasilnya telah menunjukkan, IPM Kab Sidoarjo mulai tahun 2010 hingga 2019 lalu, terus melaju naik. Pada tahun 2010 yang 73.75, pada tahun 2019 lalu menjadi 80.05. Namun karena Pandemi COVID-19 nilai peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) cenderung tipis. Berikut uraian hasil dan analisa pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran pada misi 3 :

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah ratarata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berikut merupakan nilai Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) pada Kabupaten Sidoarjo:

Tabel III-3.1
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	**79,96**	**80,29**	**100,41%**

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Tabel III-3.2
Rekapitulasi Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Sidoarjo

Indeks Pembangunan Manusia	**2015 (Baseline)**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Target	77,43	78,17	78,61	78,84	79,51	**79,96**	80,57
Realisasi		78,17	78,80	79,50	80,05	**80,29**	-

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

UNDP menggunakan IPM ini sejak tahun 1990. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2. Pengetahun (*knowledge*)

   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

   a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

   b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent dtandard of living*)

   Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu satu dasa warsa ini, telah tertata dengan baik. Misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Hasilnya telah menunjukkan, IPM Kab Sidoarjo mulai tahun 2010 hingga 2019 lalu, terus melaju naik. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III-3.A
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

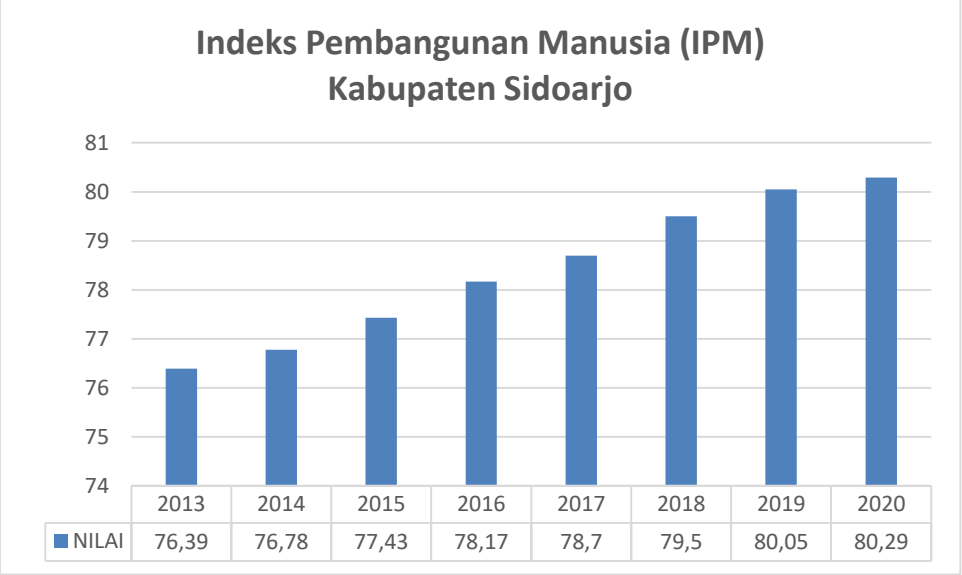

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angka IPM di kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dari 76.39 tahun 2013 menjadi 80.29 tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target

tahun 2020 sebesar 78,84-79,5, maka capaian tahun 2020 mencapai 100,41% dari target, serta meningkat 0,3% dari capaian tahun 2019 yang mencapai angka 80,05% Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Dengan melihat capaian masingmasing komponen, diharapkan Pemerintah Daerah pada Kota/Kabupaten mendapatkan input untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel III-3.3
Nilai Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

INDIKATOR	**SKOR**
- Angka Harapan Hidup (tahun)	**74.04**
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	**14,93**
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	**10,50**
- Pengeluaran perkapita riiel disesuaikan (Rp.000)	**14.458**

Sumber : BPS Provinsi Jawa TImur Tahun 2020

Jika dilihat lebih mendalam, meningkatnya pembangunan manusia di Jawa Timur setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya angka harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Tabel III-3.4
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Prov. Jawa Timur	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	**80,29**	**71, 71**	**0,89%**

Sumber : BPS Provinsi Jawa TImur Tahun 2020

Pada Tahun 2020 IPM memang dapat dibilang mengalami kenaikan nilai yang tipis dibanding tahun sebelumnya. Namun Kabupaten Sidoarjo menempati ranking 4 skor IPM se-Jawa Timur sekaligus mengungguli capaian IPM Provinsi Jawa Timur yang memiliki skor 71.71 atau tumbuh 0,89%.

Tabel III-3.5
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Kab. Sidoarjo		Keterangan
		Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	**80,29**	**80,57**	**0,34%**

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dengan target nilai Indeks Pembangunan Manusia pada masa akhir RPJM sebesar 80,57 maka nilai IPM harus meningkat sebesar 0.34% dari realisasi tahun ini. Peningkatan nilai IPM didukung oleh program - program yang meliputi:

SASARAN : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel III-3.6
Tabel Rekapitulasi Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2016 - 2021

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	**2015 (Baseline)**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Target	13,69 tahun	14 tahun	14,25 tahun	14,25 tahun	14,35 tahun	**14,45 tahun**	14,55 tahun
Realisasi		14,13 tahun	14,34 tahun	14,25 tahun	14,91 tahun	**14,93 tahun**	-

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk angka harapan lama sekolah sampai dengan di tahun 2021 sebesar 14,55 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar 14,93 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 103,32%. Dibandingkan pada tahun 2019 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 14,91 tahun. Hal tersebut bisa dikategorikan ada kenaikan sebesar 0,02 tahun.

Dengan realisasi angka 14,93 tahun tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD sekarang di Kabupaten Sidoarjo punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan Diploma II (DII).

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebagai berikut :

Grafik III-3.B

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah

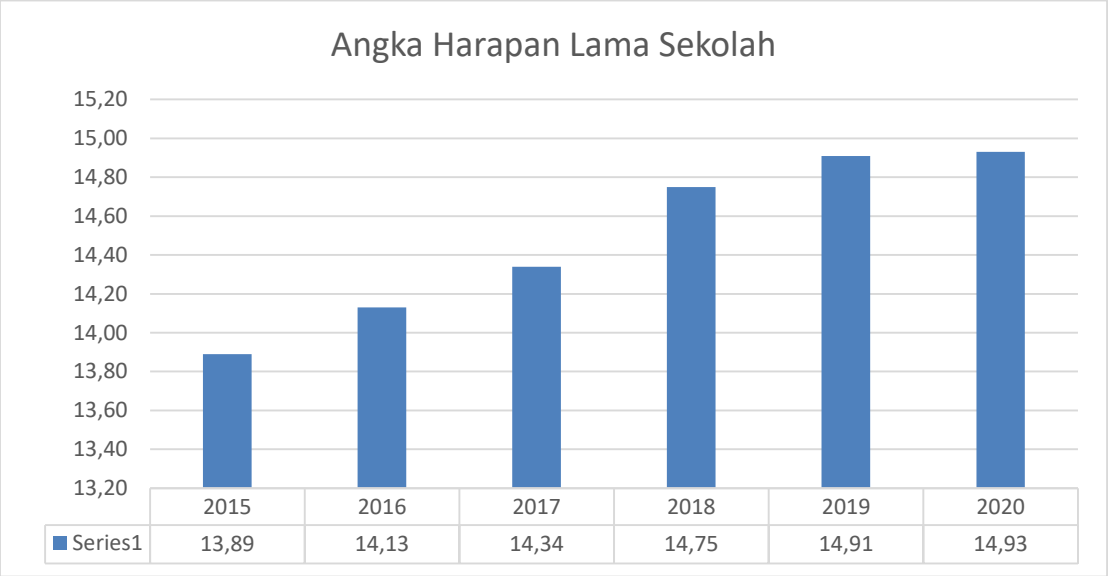

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada Kabupaten Sidoarjo angka harapan lama sekolah selalu mengalami peningkatan semenjak Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Di tahun 2020, harapan lama sekolah di Jawa Timur telah mencapai 14,93 tahun yang berarti bahwa anak- anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan angka harapan lama sekolah, antara lain:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- Memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.

2. Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan.

Tabel III-3.7
Tabel Rekapitulasi Target dan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Tahun 2016

Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)	**2015 (Baseline)**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Target	10,1 tahun	10,5 tahun	10,7 tahun	10,75 tahun	10,75 tahun	**10,8 tahun**	10,8 tahun
Realisasi		10,22 tahun	10,23 tahun	10,75 tahun	10,25 tahun	**10,50 tahun**	-

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk rata-rata lama sekolah sampai dengan di tahun 2021 sebesar 14,55 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar 10,50 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 97,22%. Dibandingkan pada tahun 2019 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 10,25 tahun.

Dengan realisasi angka 10,50 tahun tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 Tahun, pemenuhannya sebesar 1,5 tahun akan kita intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Grafik III-3.B
Perkembangan Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

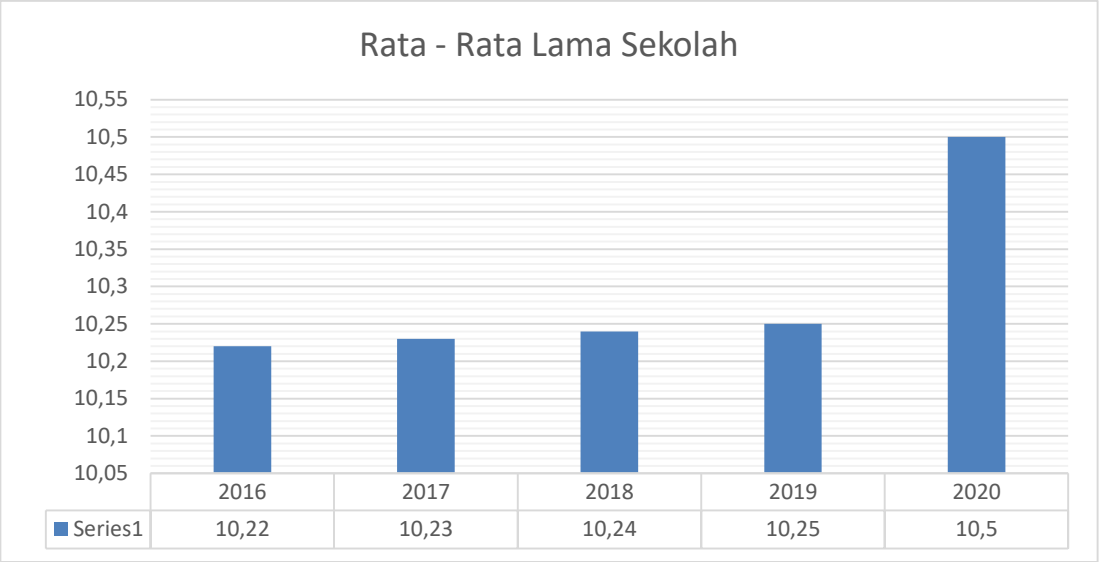

Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Semenjak Tahun 2016 , Rata - Rata Lama Sekolah pada Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami pertumbuhan. Bahkan terjadi pertumbuhan pesat pada Tahun 2020 yaitu sebesar 100,24%. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

<u>SASARAN : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</u>

1. **Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup waktu lahir *(expectation of life at birth)* yang biasanya dilambangkan dengan simbol eo dan sering disingkat dengan AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Angka Harapan Hidup	**2015 (Baseline)**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Target	73,63 tahun	73,73 tahun	73,83 tahun	73,68 tahun	73,68 tahun	**73,69 tahun**	73.69 tahun
Realisasi		73,67 tahun	73,71 tahun	73,83 tahun	73,98 tahun	**74,04 tahun**	-

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 73,67. Levelnya terus naik menjadi 73,71 di tahun 2017; 73,83 di tahun 2018; 73,98 di tahun 2019 dan 74,04 di tahun 2020.

Tabel III-3.8
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2020

Nilai	Realisasi Tahun 2020		Keterangan
	Kab. Sidoarjo	Prov. Jatim	
Angka Harapan Hidup	**74,04 tahun**	**71, 30 tahun**	**0.96%**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Pada grafik diatas digambarkan bahwa dibanding dengan angka Propinsi Jawa Timur, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kecukupan gizi dan budaya ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakatnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan dari sisi sistem dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang

kesehatan. Selama periode 2019 hingga 2020, komponen kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 74,04 tahun,meningkat 0,99 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,98 tahun, meningkat 0,99 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,50 tahun meningkat 0,97 tahun. Hanya komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang turun, dari Rp. 11,74 juta (2019), menjadi Rp. 11,60 juta (2020) atau turun Rp. 138 ribu akibat pandemi Covid-19.

INDIKATOR	SKOR
- Angka Harapan Hidup (tahun)	**74.04**
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	**14,93**
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	**10,50**
- Pengeluaran perkapita riiel disesuaikan (Rp.000)	**14.458**

Grafik III-3.C
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020

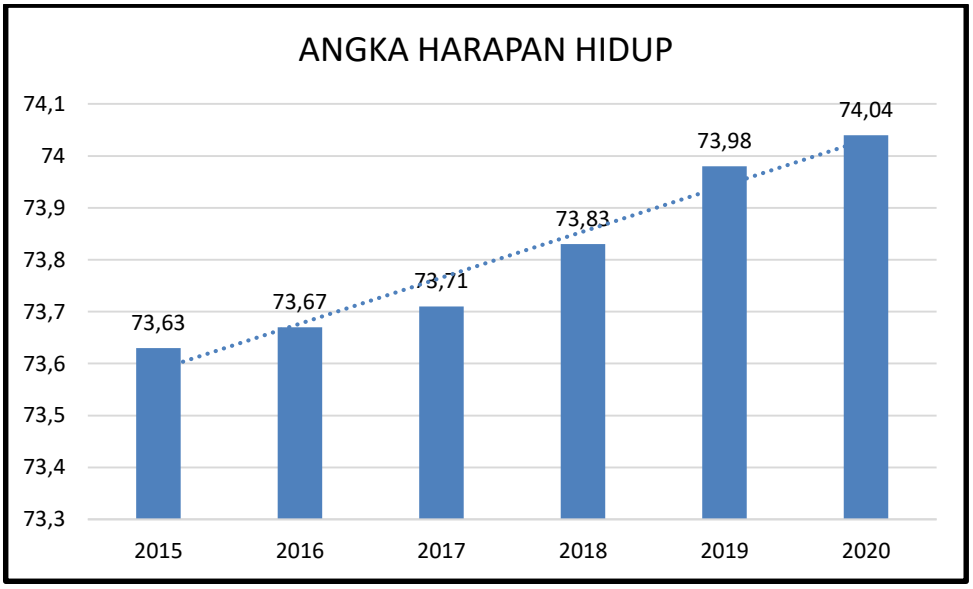

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari 73.67 pada tahun 2016 menjadi 74.04 pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2020 dengan umur 73,69 tahun, maka di tahun 2020 ini sudah mencapai 100,47% dan meningkat 0,08% dari capaian tahun 2019.

MISI 4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Tujuan - Sasaran – Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan		
1.	Indeks Kebahagiaan	KURANG
Sasaran : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan		
1.	Indeks Rasa Aman	CUKUP
2.	Indeks Resiko Bencana	RESIKO TINGGI
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	KURANG

No	Tujuan - Sasaran – Indikator	Tingkat Capaian/ keberhasilan
Tujuan : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan		**CUKUP**
1.	Indeks Kebahagiaan	82,81%
Sasaran : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan		***)**
1.	Indeks Rasa Aman	98,91%
2.	Indeks Resiko Bencana	67,27%
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	BPS belum rilis

*) Belum dapat disimpulkan

Uraian hasil dan analisa pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan

Tabel III-4.1

Indeks Kebahagiaan

Tahun	Target	Realisasi
2015	*)	N/A
2016	77,11	77,11
2017	77,65	78,58
2018	78,23	79,37
2019	79,83	80,28
2020	**80,47**	**66,64**
2021	81,14	-

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan digunakan indikator kinerja *Indeks Kebahagiaan* yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III-4.2
Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2020

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	Indek Kebahagiaan	80,47	66,64	82,81

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2020 adalah 66,64 dari target yang diharapkan sebesar 80,47. Dari hasil realisasi maka capaiannya sebesar 82,81%.

Tabel III-4.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Dengan Tahun Sebelumnya

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	Indek Kebahagiaan	77,11	78,58	79,37	80,28	66,64

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yaitu 66,64%.

Tabel III-4.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	Indek Kebahagiaan	81,14	66,64	82,13%

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan sampai dengan akhir periode RPJMD dapat dicapai 66,64 dari target 81,14%. Dan mengalamin tingkat kemajuan 82,13%.

Tabel III-4.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	Indek Kebahagiaan	66,64	-	-

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya,

semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap :

1) kesehatan,
2) pendidikan,
3) pekerjaan,
4) pendapatan rumah tangga,
5) keharmonisan keluarga,
6) ketersediaan waktu luang,
7) hubungan sosial,
8) kondisi rumah dan aset,
9) keadaan lingkungan, dan
10) kondisi keamanan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo dituangkan program untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan mengukur kebahagiaan dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kebahagian (IKH). Pengukuran indeks kebahagiaan (IKH) ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo baik secara umum maupun indeks kebahagiaan menurut kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keharmonisan keluarga.
2. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut variabel hubungan sosial, lingkungan, ketersediaan waktu luang, kondisi rumah dan aset, serta kondisi keamanan.
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan indeks kebahagiaan penduduk Kabupaten Sidoarjo

   Berikut perkembangan Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III-4.A
Indeks Kebahagiaan Kabupaten

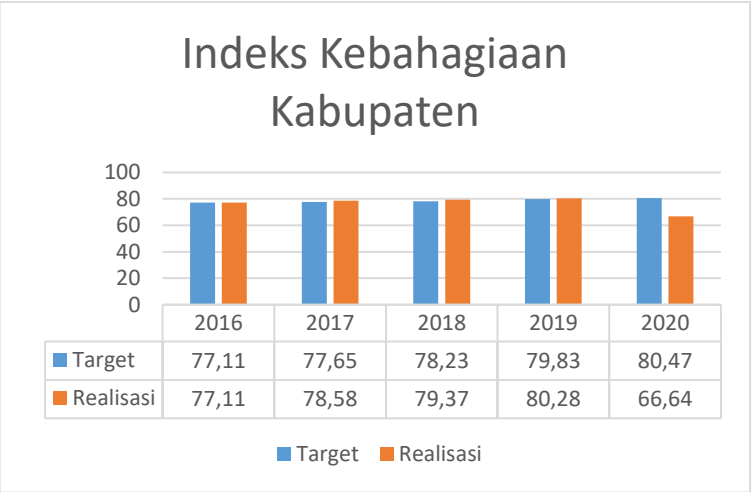

Sumber Data : Policy Brief IKH Kabupaten Sidoarjo 2020

Selama tiga tahun berturut-turut terlihat Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. (2017-2019). Bahkan pada tahun 2019 mencapai 80,28 melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 79,83. Sedangkan pada tahun 2020 menurun 16,99% menjadi 66,64.

Menurunnya tingkat kebahagiaan pada tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor. Ketidaknyamanan akibat adanya Pandemi Covid. Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir segala sektor kehidupan manusia, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, sampai ke aspek psikologis seperti kecemasan terkena covid-19,, kesepian, kejenuhan akibat terhambatnya akses berpergian, terlalu lama dirumah maupun hilangnya mata pencaharian pokok yang selama ini menghidupi keluarga yang semuanya itu berdampak terhadap menurunnya kebahagiaan individu dan dapat mengakibatkan stres.

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kebahagiaan penduduk di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

- membekali masyarakat akan pengetahuan tentang covid-19 terutama pencerdasan masyarakat bahwa tidak perlu merasa tertekan dan cemas akan adanya covid-19 namun tetap waspada dan melaksanakan anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19, menggencarkan himbauan himbauan untuk mematuhi

protokol kesehatan,dan memberikan dukungan-dukungan positif bahwasannya masyarakat dapat melalui pandemi covid-19 dan pandemi ini akan berakhir melalui videotron, banner maupun radio.

- menyediakan pelatihan pelatihan yang sedang diminati saat ini dan tentunya berpotensi serta dibutuhkan oleh banyak orang sehingga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat.
- Selain itu, untuk mempersiapkan generasi yang unggul di masa depan dapat mempertahankan program pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan juga memfasilitasi internet gratis (bagi penduduk Sidoarjo untuk belajar dan mengakses informasi) yang tersebar di kecamatan dengan memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) dari pihakswasta yang ada di Sidoarjo.
- menciptakan lapangan kerja lain dalam lingkup kecamatan sehingga pengangguran dapat ditampung kembali dan mendapatkan pekerjaan, selain itu pemerintah dapat menggencarkan penyebaran informasi lowongan tenaga kerja sehingga membantu pengangguran cepat mendapatkan pekerjaan, dan pemerintah dapat melakukan kerjasama degan perusahaanperusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar menerapkan kuota penyerapan tenaga asal Kabupaten Sidoarjo
- menyediakan pelatihan pelatihan untuk pelaku usaha agar dapat mempertahankan usahanya, tips berwirausaha di tengah pandemi, memasarkan produk secara efektif, dan pelatihan lainnya. Selain itu juga perlunya diimbangi dengan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku usaha untuk memantau perkembangan usaha tersebut.
- Guna meningkatkan kebahagiaan penduduk Kabupaten Sidoarjo dengan pemenuhan fasilitas publik, perlunya meningkatkan fasilitas publik di beberapa daerah meliputi : fasilitas penerangan jalan umum (PJU), perbaikan jalan rusak berat, dan penanganan masalah sungai yang menyebabkan banjir.

SASARAN : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan

Tabel III-4.6
Indeks Rasa Aman

Tahun	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A
2016	N/A	N/A
2017	72,44	72,44
2018	73,89	73,77
2019	75,37	76,01
2020	**76,87**	**76,03**
2021	76,87	-

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan digunakan indikator kinerja :

- Indeks Rasa Aman
- Indeks Resiko Bencana
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III-4.7
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	Indeks Rasa Aman	76,87	76,03	98,91
	Indeks Resiko Bencana	85	112,82	67,27
	Indeks Pembangunan Gender	94,65	94,13	99,45

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Realisasi untuk indeks rasa aman yaitu 76,03 dengan capaian 98,91% dalam artian sudah melebihi target yang ditentukan sebesar 76,87. Untuk Indek Resiko Bencana realisasinya adalah 112,82 berarti sudah mencapai target yang diberikan sedangkan Indeks Pembangunan Gender belum mencapai targetnya.

Tabel III-4.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	Indeks Rasa Aman	N/A	72,44	73,77	76,01	76,03
	Indeks Resiko Bencana	N/A	126,75	128,6	117,95	112,82
	Indeks Pembangunan Gender	N/A	93,33	93,33	93,33	94,13

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Tabel III-4.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	Indeks Rasa Aman	76,87	76,03	
	Indeks Resiko Bencana	75	112,82	
	Indeks Pembangunan Gender	94,75	94,13	

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Tabel III-4.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	Indeks Rasa Aman	76,03	..	
	Indeks Resiko Bencana	112,82	..	
	Indeks Pembangunan Gender	94,13	..	

Sumber data : Bappeda Tahun 2020

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Target yang ditetapkan di tahun 2020 dalam RPJMD untuk indeks rasa aman adalah 76,87% , sedangkan capaian tahun 2020 adalah 76,03%, sehingga tercapai 98,91 %. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia salah satunya yaitu kebutuhan akan ketentraman.

Mendasari definisi rasa aman diatas, indeks rasa aman dalam hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk angka sebagai tolak ukur untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Pada tahun 2020 telah dilakukan survey/pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo, dengan responden jumlah sampel yang akan di ambil adalah 400 orang. Jumlah tersebut akan di sebar merata ke 18 kecamatan (masing-masing kurang lebih 22 - 23 kuesioner) memperoleh hasil Nilai Indeks Rasa Aman 76,03 % dengan kategori Rasa Aman Cukup.

Upaya yang telah dilakukan dengan adanya beberapa program meliputi :

1. Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Program Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Perundang-Undangan Darah
3. Program Perlindungan Masyarakat
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
6. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Berikut perkembangan Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 hingga tahun 2020 :

Grafik III-4.B
Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo

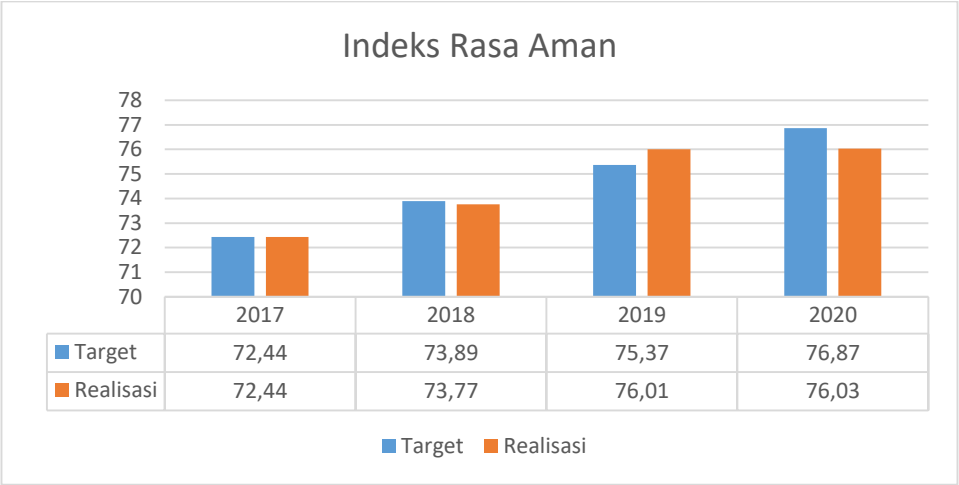

	2017	2018	2019	2020
Target	72,44	73,89	75,37	76,87
Realisasi	72,44	73,77	76,01	76,03

Sumber Data : Policy Brief IRA 2020 Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Dengan capaian tersebut masih dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang aman dari konflik. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 76,87 maka tercapai 98,91 %.

Indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019) mengalami peningkatan hingga 0,02%, dan masih berada pada range tinggi (60 s.d 80).

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Capaian Indeks Rasa Aman

1. Terjadinya Bencana, Selain bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, bencana juga dapat disebabkan oleh wabah penyakit dan bencana sosial

2. Kesejahteraan Sosial meliputi :

Kondisi ekonomi, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan

2. Peristiwa Politik meliputi:

Tingkat Korupsi, Kondusifitas Pemilu dan pro kontra kebijakan/peraturan

3. Toleransi menunjukkan bahwa persepsi, sikap, dan kerja sama dalam interaksi sosial antar umat beragama dan antar etnis

Indeks toleransi sebesar 77,62. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang 75,19 maka terdapat kenaikan 2,43 poin, dan capaian ini telah melampaui target yang

ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yakni sebesar 76,67 dengan peningkatan 0,95 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa persepsi, sikap, dan kerja sama dalam interaksi sosial antar umat beragama dan antar etnis di Kabupaten Sidoarjo sudah berlangsung secara kondusif. Sampel berdasarkan jumlah penganut agama dan perbedaan suku. Dilakukan survei untuk tokoh-tokoh agama dan tokoh adat pada lokasi yang disurvei yaitu di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah sampel masyarakat Kabupaten sidoarjo yang difungsikan sebagai responden kuisioner sebanyak 414 orang.

Dampak pandemi dan peristiwa politik berpengaruh secara signifikan terhadap capaian Indeks Rasa Aman, sehingga hanya naik 0,2 poin saja. Meskipun ada kenaikan, tapi tidak banyak, bisa jadi jika tidak ada pandemi, capaian indeks rasa aman, bisa lebih tinggi lagi.

Untuk mewujudkan rasa aman masyarakat memberdayakan 3 pilar; Babinsa, Lurah atau kepala desa serta yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Masyarakat bersama-sama dengan aparat desa atau kelurahan melakukan pengamanan secara swadaya.

Selain bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, bencana juga dapat disebabkan oleh wabah penyakit dan bencana sosial. Berkaitan dengan covid sebagai bencana non alam, perhatian terhadap penanganan munculnya pandemi Covid-19, sebagai bencana non-alam masih terbatas. Mempertimbangkan bahwa dampak bencana non-alam bersifat multi-aspek, maka dibutuhkan strategi terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu, Penduduk perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan memilki risiko bencana tinggi. Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi economic loss yang besar, maka diperlukan suatu kebijakan, seperti:

- Memperkuat Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat melalui peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat & aparat (Desa Tangguh Bencana).
- Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, terutama untuk ancaman bencana kesehatan seperti peningkatan kapasitas APD dan rumah sakit.

- Menyusun Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama kejadian bencana di wilayah rawan terdampak seperti pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan. Dibutuhkan kebijakan yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi, seperti:
- Stimulus pemodalan terutama bagi industri sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM,
- Optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal daerah ,
- Bantuan untuk sektor non informal

Untuk rasa aman akan pemenuhan kebutuhan sosial, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di butuhkan kebijakan seperti : Belanja Bantuan Sosial Daerah , Menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah ,Validasi data penduduk miskin dan rentan miskin untuk berbagai skema bantuan,Pengawalan program Bantuan Sosial Pusat dan peningkatan cakupan melalui Bantuan Sosial Daerah

Pemerintah harus meningkatkan perannya dalam menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga toleransi bermasyarakat antar umat beragama dan etnis, dengan upaya sebagai berikut:

- Pemerintah perlu meningkatkan dalam menfasilitasi pembangunan rumah peribadatan dengan baik.
- Pemerintah juga perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang aturan pendirian rumah peribadatan dengan baik.
- Pemerintah perlu meningkatkan dalam menfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan forum kesukuan dengan baik.
- Pemerintah perlu meningkatkan jaminan hak yang sama dalam prosedur perijinan pendirian sarana peribadatan.
- Pemerintah perlu meningkatkan mekanisme prosedur perijinan pendirian sarana peribadatan dengan konsisten kepada semua pemeluk agama.

Perlu adanya tambahan konsep kegiatan yang menonjolkan karakter berbudaya dari berbagai etnis dan agama yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan secara bersama yang merupakan ciri khas yang dapat di

gemakan suaranya baik secara nasional maupun internasional dan melibatkan siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan variabel persepsi dalam toleransi, masih perlu sebagai berikut :

a. Adanya program yang dapat meningkatkan kerjasama antar umat beragama agar dapat terjalin dengan baik.
b. Para tokoh agama perlu lebih meningkatkan kembali kinerja dalam menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga toleransi umat beragama dan antar etnis.
c. Organisasi keagamaan harus meningkatkan potensinya dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga toleransi umat beragama dan antar etnis.
d. Pemerintah perlu meningkatkan dalam menfasilitasi dialog antar umat beragama dan antar komunitas etnis bangsa dengan baik.
e. Pemerintah perlu meningkatkan dalam mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai agama dan etnis bangsa. Dikarenakan pandemi covid-19, tidak ada kegiatan seni dan budaya
f. Pemerintah perlu meningkatkan dalam bersikap tegas ketika menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama dan etnis bangsa.
g. Pemerintah perlu meningkatkan sikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama
h. Pemerintah perlu meningkatkan dalam melindungi kebebasan beribadah tiap-tiap pemeluk agama.

1. Indeks Resiko Bencana

Tabel III-4.11
Indeks Resiko Bencana

Tahun	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A
2016	N/A	N/A
2017	140,6	126,75
2018	131,65	128,6
2019	105	117,95
2020	**113,7**	**112,82**
2021	75	-

Dalam Arahan dan Strategi Penanggulangan Bencana RPJMN Nasional 2020 –2024 kabupaten Sidoarjo termasuk dalam 136 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam kategori daerah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau aglomerasi yang rawan bencana yang menjadi prioritas nasional dan atau termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota di Jawa

Timur. Selain itu, Sidoarjo juga dikenal luas di seluruh pelosok negeri bahkan dunia dengan peristiwa atau kejadian bencana yang populer dengan sebutan 'Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi)' yang menunjukkan bahwa ancaman bencana di Sidoarjo tidak dapat dipandang dengan sebelah mata dan penangananannya harus dilakukan secara kolaboratif, antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.dan merujuk kepada Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB) 2015-2019. Dalam Rangka Pengukuran Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagaimana dinyatakan dalam dokumen RPJMD 2016--2021, BPBD Kabupaten Sidoarjo merumuskan Indeks Resiko Bencana merujuk pada Dokumen JAKSTRA PB 2015-2019. Dalam Dokumen tersebut dinyatakan bahwa target penurunan dalam 5 tahun ke depan adalah 30%. Sehingga untuk Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2021 maka target penurunan indeksnya adalah sebagai berikut:

Tabel III-4.12
Indeks Realisasi Resiko Bencana 5 Tahunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra	Data awal (2016)	Target					Skor Akhir yang diharapkan
		2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana	149.6	6%	12%	18%	24%	30%	104.72

Pada hakikatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah menurunkan indeks risiko bencana. Penurunan indeks risiko tersebut. sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen

Gambar III-4.1
bahaya/ancaman, komponen kerentanan dan komponen kapasitas

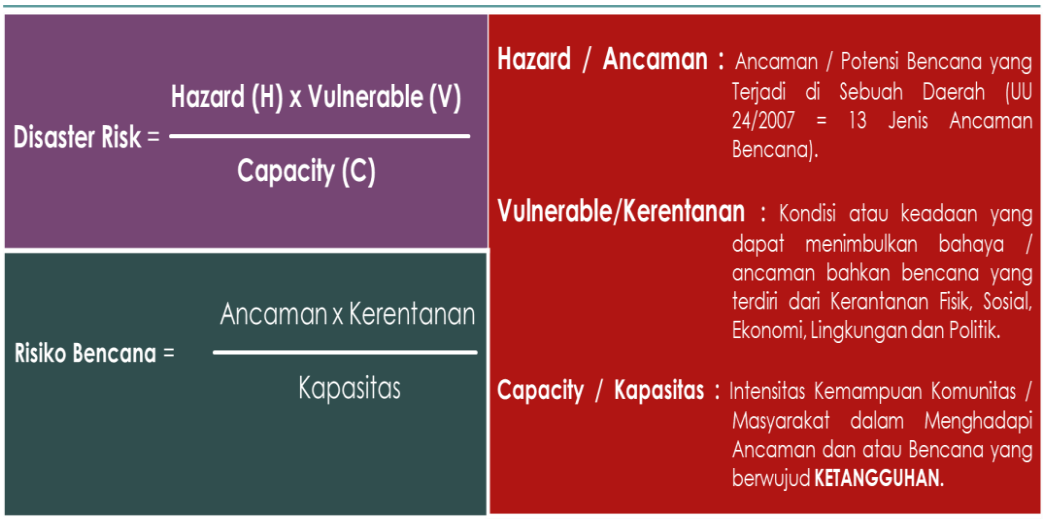

.

Risiko (R), bahaya (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C) saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Risiko dapat ditimbulkan karena tingginya tingkat bahaya dan kerentanan, sedangkan didukung oleh rendahnya tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Semakin tinggi tingkat kerentanan daerah dan semakin rendahnya kapasitas membuat semakin tingginya risiko terhadap bencana

Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui **peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas)**. Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah **komponen *coping capacities* dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun**(2016-2021). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

Perhitungan IRB Tahun 2020 pada Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan menyelengarakan Focus Group Discussion (FGD), dengan berbagai pihak terkait yang berkompeten dengan kegiatan perhitungan Indeks Risiko Bencana, baik dengan kelompok pakar (perguruan tinggi/NGO), kelompok dinas/instansi pemerintah, dan pihak swasta / masyarakat lainnya (1 kali pelaksanaan).
Perhitungan untuk skor Indeks Risiko Bencana tahun 2020 didasarkan atas kalkulasi Indeks Ketahahan Daerah (IKD) yang terdiri dari 7 (tujuh) fokus prioritas dan 16 (enam belas) sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Dari pencapaian 71 indikator tersebut, diperoleh nilai ketahanan daerah dengan rentang nilai ketahanan antara 1 s/d 5, dimana nilai 1 (satu) paling rendah, 5 (lima) paling tinggi.

Adapun makna nilai ketahanan adalah sebagai berikut :

1. Level 1,belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan / menghasilkannya;
2. Level 2,hasil / penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standard;
3. Level 3,tersedia / terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh;
4. Level 4,telah dirasakan manfaatnya secara optimal, dan
5. Level 5,manfaat dari hasil / penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka

panjang

Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2020, maka dapat diperoleh skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 yakni dengan skor sebesar 112,82, seperti yang terlihat pada histogram dibawah ini :

Grafik III-4.D
Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo

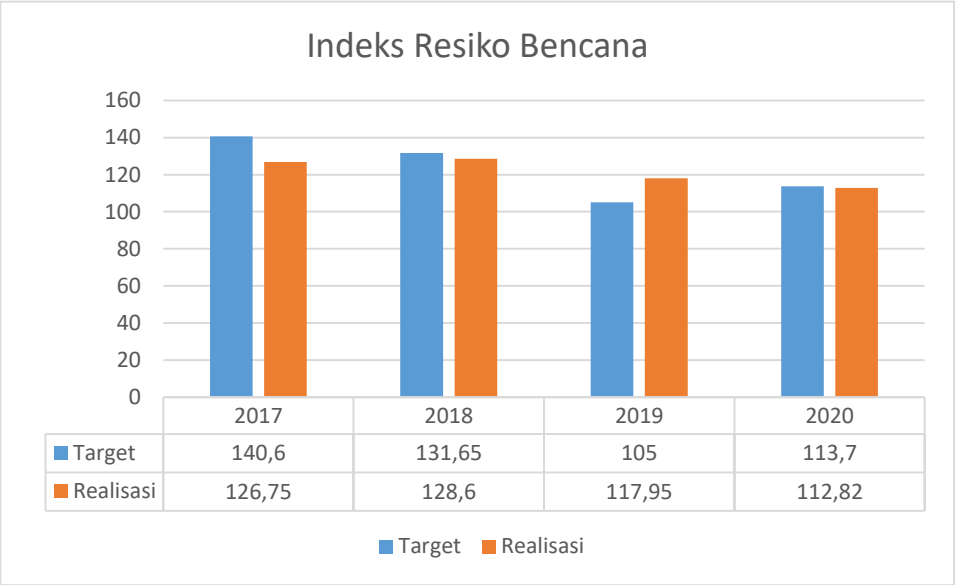

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan IKD 2020

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai IRB Kabupaten Sdioarjo adalah sebesar **112,82** atau turun **5,13 poin** dari baseline 117,95. Apabila dibandingkan dengan target 113,7 poin maka tercapai sebesar 99,23 %. Sedangkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 5,13 poin atau 4,35 %.

Klasifikasi kelas risiko bencana:

SKOR	KATEGORI
<13	Rendah
13 - 144	Sedang
>144	Tinggi

Terkait pencegahan dan mitigasi secara umum dapat disebutkan bahwa permasalahannya terletak pada upaya sinkronisasi program penanggulangan bencana

pada OPD terkait yang tidak mudah dilakukan. Berbedanya bentuk, tujuan dan sasaran program menjadi penghalang dalam upaya sinergitas program di lapangan, sehingga masih banyak program serumpun terkait kebencanaan yang belum dapat disinergikan. pada aspek penanganan darurat, meskipun sudah terdapat Peraturan Kepala BNPB tentang SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) namun dalam pelaksanaannya tidak mudah, khususnya dalam hal koordinasi dan atau komando dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam dokumen RENAS PB 20152019,

secara nasional juga dinyatakan bahwa salah satu isu pokok tentang penanggulangan bencana adalah belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, dan hal tersebut salah satunya terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat.

Adapun Tantangan lain terkait dengan manajemen bencana di daerah adalah (i) kuantitas dan kualitas sumber-daya manusia terbatas, (ii) fasilitas yang terbatas. Dari BPBD yangsudah terbentuk sebagian besar belum punya kantor. Sebagian besar belum memiliki Pusdalops 24/7, (iii) logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan, (iv) politik lokal dukungan legislatif sangat minim, (v) fleksibelitas sumberdaya manusia yang tinggi sehingga mudah dimutasi, (vi) luasnya cakupan wilayah yang rawan bencana dan akses terbatas.Benturan aturan pendukung yang bersifat teknis mengakibatkan temapenanggulangan bencana belum menjadi “mandat pokok” pendanaan, sehinggapendanaan PB di daerah tidak masuk dalam prioritas utama. Dampak lain akibatbenturan aturan tersebut terlihat dari belum seluruh daerah kabupaten/kota yangmemiliki BPBD. Selain itu juga terlihat bahwa walaupun penanggulangan bencanamenjadi sebuah rencana prioritas pembangunan, namun mayoritas daerah belum menjadikan tema ini sebagai prioritas di daerahnya masing-masing.

Upaya upaya pemerintah untuk mengurangi indeks risiko bencana sebagai berikut :

1. PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN melalui:
   - Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
   - Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD
   - Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB

- Optimalisasi Penerapan Aturan danMekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
- Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
- Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
- Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD
- Pembentukan dan atau Penguatan Forum PRB
- Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah

2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU
   - Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
   - Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan Aturan Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan Aturan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. PENGEMBANGAN DIKLAT DAN LOGISTIK
   - Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah
   - Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
   - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga
   - Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
   - Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional
   - Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
   - Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan
   - Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
   - Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
   - Peningkatan akuntabilitaspemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana

- Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
- Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana

4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA
   - Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
   - Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana
   - Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
   - Penguatan 4 Modul Safety Hospital pada Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana pada Daerah Berisiko
   - Pembangunan Desa Tangguh Bencana
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
   - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
   - Pengurangan Frekuensi dan DampakBencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
   - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
   - Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB
   - Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir

6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANANDARURAT BENCANA
   - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
   - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah
   - Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
   - Operasi Tanggap Darurat Bencana
   - Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana
   - Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis Penguatan Kebijakan dan Mekanisme
   - Perbaikan Darurat Bencana

- Penguatan Kebijakan dan MekanismePengerahan bantuan Kemanusiaankepada Masyarakat Terdampak Bencana
- Penguatan Mekanisme PenghentianStatus Darurat Bencana

7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
   - Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
   - Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana
   - Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana
   - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme
   - Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel III-4.13
Indeks Pembangunan Gender

Tahun	Target	Realisasi
2015	94,28	94,28
2016	94,2	N/A
2017	94,35	93,33
2018	94,45	93,33
2019	94,55	93,33
2020	**94,65**	**N/A**
2021	94,75	-

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPG) digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) komponen pendukungnya disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dengan nilai minimum dan maksimum.

Perkembangan IPG adalah sebagai berikut :

Grafik III-4.E
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidoarjo

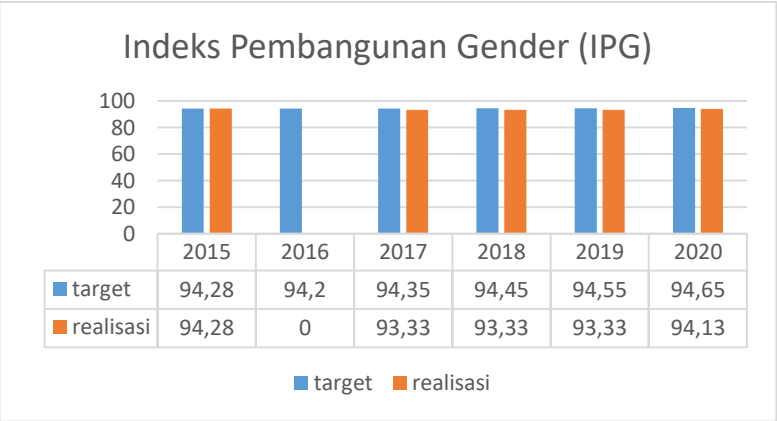

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indek Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat bahwa pencapaian Indek Pembangunan Gender tahun 2019 sebesar 93,33% atau tercapai 98,71% dari target IPG tahun 2019 sebesar 94,55%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 93,33%, maka capaian masih sama atau cenderung stabil. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data BPS untuk tahun 2020 adalah 94,13 atau tercapai 99,45 dari target 94,65.

MISI 5. Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan. 2 indikator tujuan. 2 sasaran dan 5 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel III-5.1

Tingkat Keberhasilan Misi 5

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup		
1.	Indeks Infrastruktur	TERCAPAI
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	TERCAPAI
Sasaran : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah		
3.	Persentase Jalan Kondisi Mantap	TERCAPAI
4.	Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir	TERCAPAI
.		
5.	Indeks Kualitas Air	SANGAT TERCAPAI
6.	Indeks Kualitas Udara	TERCAPAI
7.	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	SANGAT TERCAPAI

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Pandemi *Virus Corona Disease* (COVID-19) yang muncul di awal tahun 2020 memberikan dampak terhadap sektor infrastruktur. Khususnya pada perbaikan jalan, dan perbaikan area rawan genangan banjir. Sehubungan dengan hal tersebut target dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo juga mengalami perubahan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berikut uraian hasil dan analisis pencapaian masing-masing

tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup

1. INDEKS INFRASTRUKTUR

Infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan khalayak umum guna mendukung kegiatan dan kehidupan kesehariannya. Infrastruktur juga dapat disimpulkan sebagai segala fasilitas, termasuk dalam bentuk fisik dan non-fisik yang dibangun pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam ruang lingkupnya yang meliputi sektor dan aspek sosial-ekonomi. Pemenuhan fasilitas fisik yang dimaksud salah satunya meliputi fasilitas umum seperti; jalan raya, bandar udara, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya.

Realisasi Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III-5.2

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	**1,422**	**1,349**	**94,87%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 hanya **94,87%** dari target yang diharapkan yaitu **1,422**. Dari hasil realisasi maka capaiannya turun sebesar **5,13%** dari target.

Tabel III-5.3

Realisasi Indeks Infrastruktur Tahun 2016 - 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	**1,422**	1,406	1,41	1,419	1,417	**1,349**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar 1,417 maka indeks Infrastruktur 2020 mengalami **penurunan** sebesar 6,8%.

Tabel III-5.4

Perbandingan Realisasi Infrastruktur Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	**1,349**	***)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Indeks Infrastruktur Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Tabel III-5.5

Perbandingan Realisasi Infrastruktur Tahun 2020 dengan Target 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	1,426	**1,349**	**94,60%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dengan target Infrastruktur pada masa akhir RPJM sebesar 1,426, maka perbaikan infrastruktur hanya sebesar **94,60%** dari target tahun ini.

2. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi Instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

Realisasi dan perbandingan IKLH Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III-5.6

IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53.01	**65.30**	**123%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo sudah berada dalam kisaran tinggi.

Tabel III-5.7

Realisasi IKLH Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**53.01**	49.26	48.79	55.10	61.03	**65.30**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar 61.03 maka IKLH 2020 mengalami **peningkatan** sebesar **427%** maka capain ditahun 2020 sudah memenuhi target. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan / vegetasi.

Tabel III-5.8

Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020		Ket.
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**65.30**	***)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Tabel III-5.9

Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2020 dengan Target 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.26	65.30	**120%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Grafik III-5.A

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

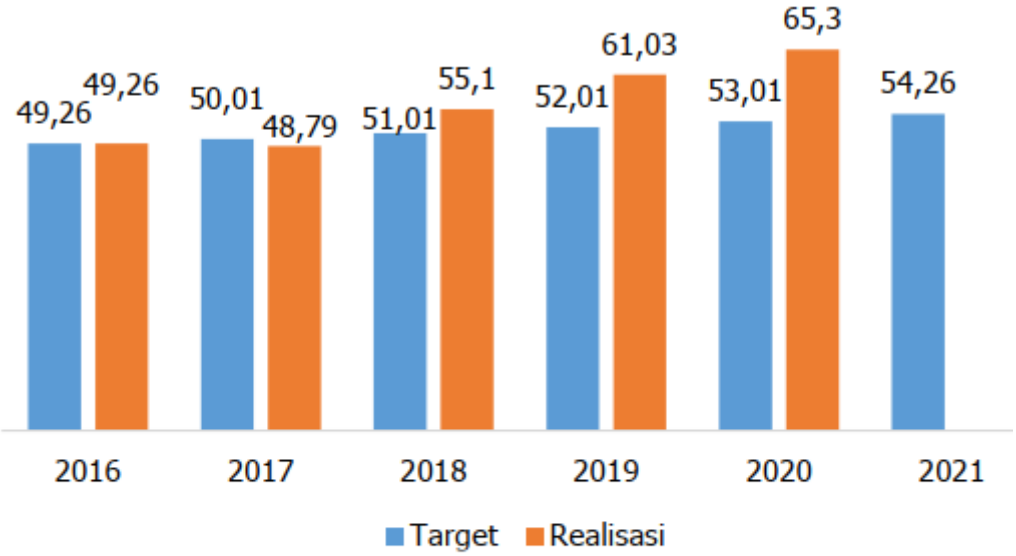

Kriteria IKLH:
90-100 = sangat baik
70-89,9 = Baik
50-69,9 = Sedang
25-49,9 = Buruk
0-24,9 = Sangat Buruk

Dengan target IKLH pada masa akhir RPJM sebesar 54.26, maka Kualitas Lingkungan Hidup meningkat sebesar **120%** dari target tahun ini. Program yang telah dilakukan dalam peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup antara lain :

1. Mendesain regulasi perumahan/ permukiman dan industri/ usaha yang pro lingkungan
2. Kampanye (social media maupun konvensional) dan pendampingan ke UMKM/IKM dan rumah tangga terkait pentingnya IPAL
3. Meningkatkan pelayanan UKL-UPL dan perizinan lainnya untuk merubah mindset pelaku usaha, bahwa kepengurusan UKL-UPL mudah
4. Mengoptimalkan pembangunan IPAL Komunal
5. Memberikan penyuluhan kepada petani untuk menggunakan system pertanian yang ramah lingkungan
6. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembersihan sungai
7. Meningkatkan pelayanan Uji KIR untuk angkutan penumpang dan barang

8. Membangun sistem transportasi massal yang nyaman dan aman untuk mengurangi kendaraan pribadi
9. Menambah frekuensi dan memperluas jangkauan car free day dan uji emisi
10. Memperbanyak RTH perkotaan (bisa dengan green building)
11. Meningkatkan TPST skala desa dengan melibatkan BUMDes
12. Memperluas kegiatan penanaman hutan kota (merubah taman pasif menjadi taman aktif) di Kab. Sidoarjo
13. Memberikan penyuluhan kepada rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk biopori, hidroponik dan urbanfarming

SASARAN : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

1. **Persentase Jalan Kondisi Mantap**

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2020 sepanjang ....km. Adapun Jalan Mantap itu sendiri adalah jalan dengan kondisi konstruksi yang mana untuk penanganannya hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap konstruksi ditetapkan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dengan besar IRI < 6 m/km *(Parameter kerataan jalan atau International Roughness Index)*. Sedangkan Jalan Tak Mantap Konstruksi adalah jalan dengan kondisi di luar koridor mantap yang mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi.

Berikut adalah capaian jalan kondisi mantap pada tahun 2020 :

Tabel III-5.10

Presentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Presentase Jalan Kondisi Mantap	90%	**82%**	**91.11%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Peningkatan Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 hanya **91.11%** dari target yang diharapkan yaitu **90%**. Dari hasil realisasi maka capaiannya turun sebesar **8%** dari target.

Tabel III-5.11

Realisasi Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi (%)				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Presentase Jalan Kondisi Mantap	**90**	**95.3**	**95.9**	**93.06**	**91.48**	**82**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar 91.48% maka indeks Infrastruktur 2020 mengalami **penurunan** sebesar 9.48%.

Tabel III-5.12

Perbandingan Realisasi Jalan Kondisi Mantap Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Presentase Jalan Kondisi Mantap	**82%**	***)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Presentase Jalan Kondisi Mantap belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Jalan Kondisi Mantap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Tabel III-5.13

Perbandingan Realisasi Jalan Kondisi Mantap Tahun 2020 dengan Target 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021 (%)	Realisasi 2020 (%)	Ket.
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Presentase Jalan Kondisi Mantap	**95%**	82%	**86.32**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dengan target Presentase Jalan Kondisi Mantap pada masa akhir RPJM sebesar 90%, maka Presentase Jalan Kondisi Mantap pada tahun ini **-8%** dari target.

SASARAN : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

2. Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir

Area Rawan banjir dapat diidentifikasi melalui peta kerawanan banjir dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis Kabupaten Sidoarjo dengan metode skoring dan pembobotan pada setiap parameter. Parameter banjir yang digunakan curah hujan, jenis tanah, ketinggian, landuse, kelas sungai, dan intensitas banjir.

Presentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III-5.14

Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		(%)		
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangn Banjir	65%	61.61%	94.78%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA

Kab. Sidoarjo 2020

Presentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah 6.61% lebih **rendah** dari target RPJMD yaitu 65% , dengan demikain capaian Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir hanya sebesar 94.78%.

Tabel III-5.15

Realisasi Luas Area Rawan Genangan Banjir Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi (%)				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangn Banjir	**65%**	40	42	50	53.30	61.61

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar 53.30% maka indeks Infrastruktur 2020 mengalami kenaikan sebesar 8.31%.

Tabel III-5.16

Perbandingan Realisasi Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangn Banjir	**61.61**	***)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Presentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Tabel III-5.17

Perbandingan Realisasi Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
		%		
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir	**70%**	**61.61%**	**88.01%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dengan target Presentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir pada masa akhir RPJM sebesar 65%, maka Presentase Jalan Kondisi Mantap pada tahun ini **-3.39%** dari target.

3. INDEKS KUALITAS AIR

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Indeks kualitas air adalah ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melakukan pemantauan kualitas air sungai di 3 (tiga) sungai yakni Sungai Buntung, Sungai Kedunguling dan Sungai Pucang. Masingmasing sungai diambil 7 (tujuh) pos pengambilan sample air. Selama tahun 2020 ini, total DLHK melakukan pengambilan sampel sebanyak 5 (lima) kali. Sehingga total pengamatan pada tahun 2020 adalah sebanyak 105 pengamatan.

Parameter yang dinilai dalam pengukuran Indeks Kualitas Air adalah derajat keasaman (pH), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD); Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Nitrat (No3-N). Fosfat, Fecal Coli. Parameter ini sedikit berbeda dengan parameter pada tahun sebelumnya yakni TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-5.18

Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	49.05	**51.52**	**105.04**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sebesar 51,52. Nilai ini meningkat signifikan jika dibanding dengan tahun 2019 yakni sebesar 49,05, mengalami peningkatan sebesar 2,47 poin. Jika dibandingkan dengan target Indeks kualitas air yang ditetapkan yakni sebesar 49,05, realisasi tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 105,04%

Grafik III-5.B

Realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

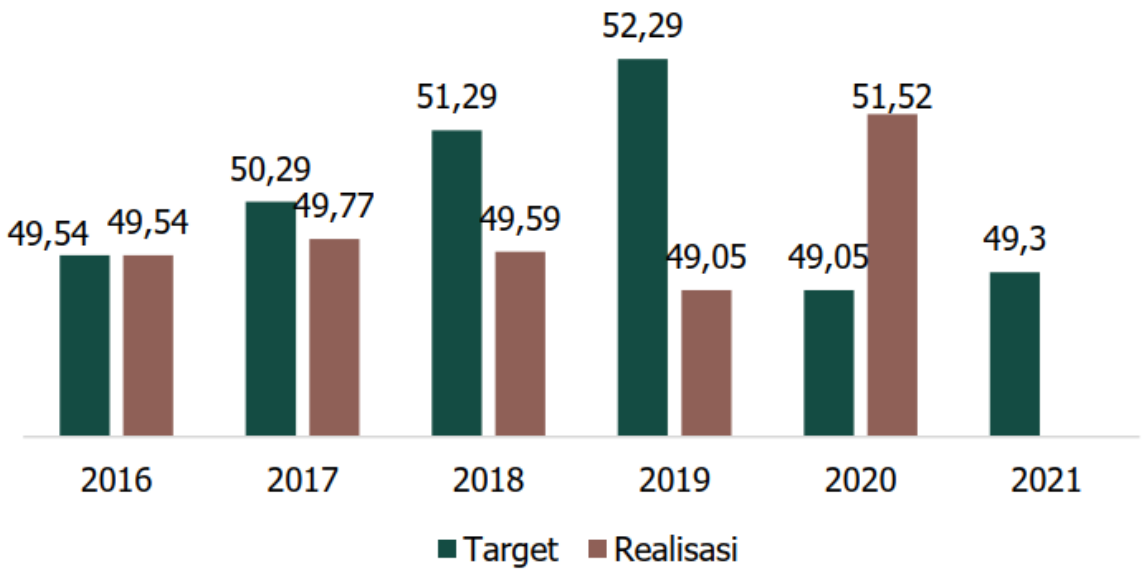

Tabel III-5.19

Peningkatan Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	**49.05**	**49.54**	**49.77**	**49.59**	**49.05**	**51.52**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Persentase kualitas air di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya, serta mengalami penurunan pada tahun 2019, tetapi kemudian naik secara signifikan pada tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar 49.05% maka Indeks Kualitas Air 2020 mengalami **peningkatan** sebesar **95%**

Tabel III-5.20

Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	**51.52**	***)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Realisasi Indeks Kualitas Air Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Indeks Kualitas Air Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Tabel III-5.21

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	54.54	51.52	**94%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid- 19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dengan target Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 sebesar 49.05, maka Indeks Kualitas Air pada tahun ini -2.47% dari target. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis dapat meningkatkan target Kualitas Air menjadi 54.54 dengan beberapa program yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi “Geo Lingkungan” Yang Menggambarkan Berbagai Sumber Pencemar Air Sungai Di Kabupaten Sidoarjo
2. Memasang Alat Pemantauan Kualitas Air Secara Online (Onlimo) Dengan Hasil Berupa Status Mutu Air
3. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air Bagi UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK
4. Sosialisasi Bagi Masyarakat Di Sepanjang Sungai
5. Sosialisasi Bagi Pelaku Usaha Yang Berpotensi Menghasilkan Air Limbah
6. SBH
7. Zero Waste Academy
8. Pembinaan Sekolah Adiwiyata
9. Pembinaan Desa Berseri
10. Sidoarjo Green Industry
11. Sidoarjo Green School
12. Pembuatan Taman Di Sempadan Sungai
13. Pengawasan Terhadap Kegiatan Industri Dan Kegiatan/Usaha
14. Patroli Air
15. Aksi Bersih-Bersih Sungai

4. Indeks Kualitas Udara

Pengukuran indeks Kualitas Udara parameter yang digunakan adalah SO2 (µg/Nm3) dan NO2 (µg/Nm3). Pengambilan sampel untuk uji kualitas udara ini dilakukan sebanyak 2 kali selama tahun 2020. Lokasi pengambilan sampel harus mewakili zona/kawasan yang telah ditentukan yakni kawasan transportasi, industri/agro industri, permukiman, perkantoran/komersial. Lokasi pengujian untuk kawasan transportasi berada di komplek terminal larangan, kawasan industri/agro industri di komplek PT. Japfa Comfeed. Selanjutnya untuk kawasan permukiman pengujian dilakukan di komplek perumahan Pondok Jati dan terakhir kawasan perkantoran/permukiman di komplek Sun City

Berikut merupakan hasil pengujian di masing-masing lokasi beserta reratanya:

Tabel III-5.22

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

No.	Zona / Kawasan	Lokasi	SO_2 (µg/Nm³)		Rerata SO2	NO_2 (µg/Nm³)		Rerata NO2
			Semester 1	Semester 2		Semester 1	Semester 2	
1	Transportasi	Komplek Terminal Larangan	13,47	13,46	13,47	14,60	13,67	14,14
2	Industri/ Agro Industri	Komplek PT. Japfa Comfeed	5,33	3,27	4,30	10,50	10,77	10,64
3	Pemukiman	Komplek Perumahan Pondok Jati	7,84	-	7,84	11,05	-	11,05
4	Perkantoran/ Komersial	Komplek Sun City	6,04	5,56	5,80	19,28	18,62	18,95
Rerata					**7,85**			**13,69**

Selanjutnya hasil rerata yang telah didapat dibandingkan dengan baku mutu masing-masing parameter. Untuk parameter NO2 baku mutu sebesar 40 dan untuk parameter SO2 baku mutu sebesar 20. Setelah dilakukan perbandingan hasil uji dengan baku mutu, selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata dari kedua parameter:

$$IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$$

Dimana:

IPU : Indeks Pencemaran Udara

IP NO2 : Indeks Pencemar NO2

IP SO2 : Indeks Pencemar SO2

Hasilnya kemudian dimasukkan dalam rumus perhitungan indeks kualitas udara:

Indeks kualitas udara = 100-{50/0.9 x (Ipu – 0.1)}

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-5.23

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	86.26	**85.14**	**98.70%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Realisasi Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah 85.14, yang artinya kurang dari 1.3% dari target 2020 sebesar 86. Dengan demikain capaian Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 98.70%.

Grafik III-5.C

Realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2020

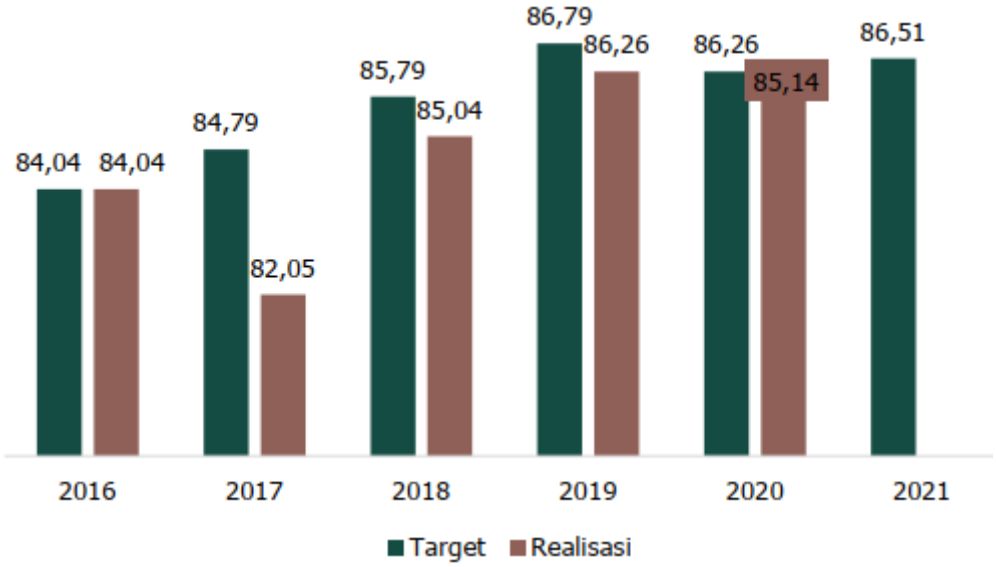

Tabel III-5.24

Peningkatan Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	**86.26**	84.04	82.05	85.04	86.26	85.14

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Indeks kualitas udara di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya, serta mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2020. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar 86.26 maka Indeks Kualitas Udara 2020 mengalami penurunan sebesar 1.12%. Adapun program yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memasang alat pemantau kualitas udara Air Quality System (AQS) di area Kantor Sekretariat Daerah

2. monitoring kualitas udara ambien berkala
3. pembinaan/pelatihan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat
4. pemantauan kualitas udara pada saat Car Free Day
5. pengujian emisi kendaraan bermotor
6. Penghijauan
7. pengawasan terhadap kegiatan industri dan kegiatan/usaha lainnya dalam pengendalian pencemaran udara

Tabel III-5.25

Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	**85.14**	***)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Realisasi Indeks Kualitas Udara Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Indeks Kualitas Udara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Tabel III-5.26

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	89.04	85.14	**96%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid- 19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab.

Dengan target Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 sebesar 85.14, maka Indeks Kualitas Udara pada tahun ini **-1.12%** dari target.

5. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Sidoarjo didapat berdasarkan data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Jenis tutupan lahan yang diinventarisasi di Kabupaten Sidoarjo antara lain hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, jalur hijau, alun-alun, hutan kota, kebun/perkebunan, ladang, lapangan, makam, pekarangan, taman, sawah dan tegalan.

Luas hutan Kabupaten Sidoarjo seluas 2.817,37 Ha dengan rincian hutan mangrove primer seluas 110,69 Ha dan hutan mangrove sekunder seluas 2.706,68 Ha. Sedangkan luas lahan vegetasi lainnya selain hutan seluas 33.938,21 dengan rincian didalam tabel 5.13 dibawah ini.

Tabel III-5.27

Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis tutupan Lahan Bervegetasi	Luas (ha)	Prosentase (%)
1	Hutan Mangrove Primer	110,69	0,30
2	Hutan Mangrove Sekunder	2.706,68	7,36

Sumber data :LKJiP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab, Sidoarjo 2020

Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-5.28

Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	31.04	**52.26**	**168.36%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sebesar 52,26. Nilai ini mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2019 yakni sebesar 51,09. Atau meningkat sebesar **1,17** dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Indeks kualitas Tutupan Lahan yang ditetapkan yakni sebesar 31,04, realisasi tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar **168,36%.**

Grafik III-5.D

Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

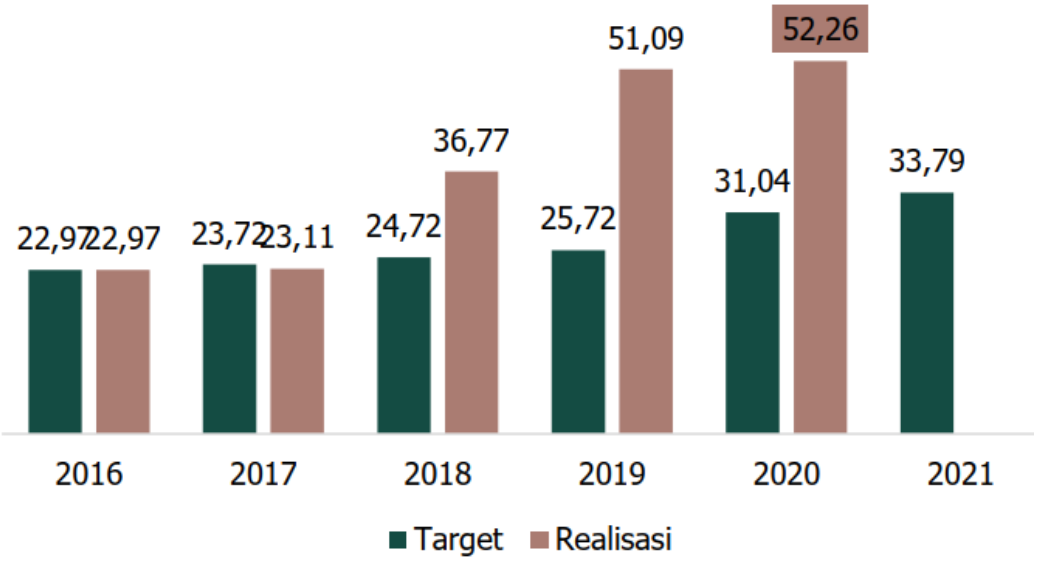

Tabel III-5.29

Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Tahun 2016-2020

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	**2020**
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	**31.04**	22.97	23.11	36.77	51.09	52.26

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Indeks kualitas tutupan lahan / vegetasi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 – tahun 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya, serta mengalami penurunan pada tahun 2019. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar 25.75 maka Indeks Kualitas Udara 2020 mengalami kenaikan sebesar 97.76%. Adapun program yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi Tutupan Lahan/ Vegetasi Secara Periodik
2. Monitoring Dan Evaluasi Kualitas Tanah Untuk Mengetahui Tingkat Kerusakan Tanah Di Lahan Kering
3. Penghijauan
4. Pelatihan Hidroponik
5. Sekolah Adiwiyata
6. Desa Berseri,
7. Sidoarjo Bersih Dan Hijau (Sbh)
8. Memanfaatkan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Yang Belum Dimanfaatkan Untuk Digunakan Sebagai Lahan Penanaman Tanaman Keras.

Tabel III-5.30

Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan/ Vegetasi Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	**52.26**	***)**	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Tabel III-5.31

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Ket.
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	27.97	52.26	**187%**

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid- 19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dengan target Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi pada tahun 2020 sebesar 52.26, maka Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi pada tahun 2020 meningkat **187%** dari target 2021.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Derah

Realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 *(unaudited)* adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Aanggaran 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	**PENDAPATAN**	**4.058.099.090.414,00**	**4.422.599.399.218,15**	**108,98**	**(364.500.308.804,15)**
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.531.360.832.030,00**	**1.809.832.433.911,15**	**118,18**	**(278.471.601.881,15)**
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	849.455.000.000,00	929.261.529.986,45	109,40	(79.806.529.986,45)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	55.980.517.525,00	58.931.135.490,00	105,27	(2.950.617.965,00)
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.626.054.550,00	37.626.054.550,00	100	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	588.299.259.955,00	784.013.713.884,70	133,27	(195.714.453.929,70)
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.694.744.640.648,00**	**1.711.271.242.511,00**	**100,98**	**(16.526.601.863,00)**
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	143.199.349.000,00	173.396.948.566,00	121,09	(30.197.599.566,00)
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.157.958.587.000,00	1.149.801.473.000,00	99,30	8.157.144.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	393.586.704.648,00	388.072.820.945,00	98,60	5.513.883.703,00
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**831.993.617.736,00**	**901.495.722.796,00**	**108,35**	**(69.502.105.060,00)**
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	166.463.900.000,00	162.996.436.500,00	97,92	3.467.463.500,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	264.780.496.236,00	339.339.055.996,00	128,16	(74.558.559.760,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Daerah Lainnya				
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	387.744.706.000,00	386.155.714.800,00	99,59	1.588.991.200,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.004.515.500,00	13.004.515.500,00	100,00	0,00
5	**BELANJA**	**5.182.074.462.157,57**	**4.441.673.370.394,65**	**85,71**	**740.401.091.762,92**
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.619.724.799.549,81**	**2.349.232.579.995,94**	**89,67**	**270.492.219.553,87**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.403.510.590.886,30	1.286.795.633.705,61	91,68	116.714.957.180,69
5.1.3	Belanja Subsidi	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	290.233.862.550,00	258.000.874.222,00	88,89	32.232.988.328,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	92.385.453.000,00	86.331.775.000,00	93,45	6.053.678.000,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa	92.771.858.152,00	92.531.238.338,00	99,74	240.619.814,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500.265.955.180,18	493.492.244.936,00	98,65	6.773.710.243,58
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	240.307.079.781,33	132.080.813.793,73	54,96	108.226.265.987,60
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**2.562.349.662.607,76**	**2.092.440.790.398,71**	**81,66**	**469.908.872.209,05**
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	293.025.497.180,60	274.672.203.103,64	93,74	18.353.294.076,96
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.967.754.184,95	1.298.515.715.895,60	86,69	199.452.038.289,35
2 . 2 . 3	Belanja Modal	771.356.411.242,21	519.252.871.399,47	67,32	252.103.539.842,74

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.123.975.371.743,57)**	**(19.073.971.176,50)**	**95,93**	**(1.104.901.400.567,07)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	1.123.975.371.743,57	1.125.220.244.892,32	99,03	(1.244.873.148,75)
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.136.075.371.743,57**	**1.131.115.244.892,32**	**99,56**	**4.960.126.851,25**
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.128.475.371.743,57	1.128.475.371.743,57	100,00	0,00
3 . 1 . 6	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	7.600.000.000,00	2.639.873.148,75	34,74	4.960.126.851,25
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**12.100.000.000,00**	**5.895.000.000,00**	**48,72**	**6.205.000.000,00**
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.100.000.000,00	5.895.000.000,00	48,72	6.205.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**1.123.975.371.743,57**	**1.125.220.244.892,32**	**99,03**	**(1.244.873.148,75)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**1.106.146.273.715,82**	**96,27**	**(1.106.146.273.715,82)**

Lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 7.

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan

Jumlah anggaran pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.562.349.662.608,00 telah dialokasikan pada masing-masing Sasaran sebagai berikut:

Tabel III.3
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran2020

Sasaran				Anggaran	
Uraian		Indikator Kinerja		Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1	Opini atas Audit BPK	359.097.601.601,37	14,01
		1.2	Nilai SAKIP		
		1.3	Status Kinerja EKPPD		
		1.4	Tingkat Maturitas SPIP		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	2.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	38.871.164.583,00	1,52
		2.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
3	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	3.1	PDRB Per kapita	86.508.603.407,00	3,38
4	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	42.338.478.915,00	1,65
		4.2	Tingkat Kemiskinan		
		4.3	Persentase Desa Maju		
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	5.1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	427.765.952.184,00	16,69
		5.2	Rata-rata Lama Sekolah (RTLS)		
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6.1	Angka Harapan Hidup	917.784.548.373,39	35,82
7	Meningkatnya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	7.1	Indeks Rasa Aman	35.356.380.849,00	1,38
		7.2	Indeks Resiko Bencana		
		7.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
8	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	8.1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	484.583.852.029,00	18,91
		8.2	Persentase penurunan luas wilayah rawan		

Sasaran				Anggaran	
Uraian		Indikator Kinerja		Anggaran (Rp)	%
			genangan banjir		
9	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	9.1	Indeks Kualitas Air	170.043.080.666,00	6,64
		9.2	Indeks Kualitas Udara		
		9.3	Indeks Tutupan Lahan/ Vegetasi		
			Jumlah	**2.562.349.662.608,00**	**100,00**

Dari tabel tersebut mencerminkan alokasi anggaran terbesar terdapat pada Sasaran Pembangunan yaitu Meningkatknya Derajat Kesehatan Masyarakat sebesar 35,82 % diikuti Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah sebesar 18,91 % dan Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat sebesar 16,69 %.

3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja terhadap 9 (sembilan) Sasaran Pembangunan dianggarkan sebesar Rp.2.562.349.662.608,00 dan terealisir sebesar Rp.2.092.440.790.398,71 atau 81,66 % dari jumlah anggaran. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 6.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

o.	Uraian Sasaran	aian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	fisiensi (%)
..	ingkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	..	75,71	
2.	ingkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	112,43	83,70	28,74
3.	ingkatnya pendapatan perkapita masyarakat	99,57	90,49	9,07
4.	ingkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	95.56	86,12	9,44
5.	ingkatnya kualitas pendidikan masyarakat	100,27	94,89	5,38
6.	ingkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100,47	90,34	10,13
7.	ingkatnya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	99,71	86,82	-20,37
8.	ingkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	92,95	56,64	36,31
9.	ingkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	124,03	78,25	45,78
	Rata-rata Efisiensi			15,56

Dari tabel III-... tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 terjadi efisiensi anggaran. Terhadap 9 (sembilan) sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang sudah dapat diukur tingkat efisiensi anggarannya sebanyak 8 (delapan) sasaran pembangunan, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sasaran belum dapat dihitung tingkat efisiensi anggarannya, disebabkan indikator kinerja sasaran dimaksud belum ada rilis resmi dari BPS dan Kementerian terkait

Tingkat efisiensi anggaran 8 (delapan) sasaran pembangunan berkisar antara sebesar 10 % s.d. 20 % atau dengan rata-rata sebesar 15,56%.

BAB IV
PENUTUP DAN KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada capaian kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama pada sektor perekonomian. Hasil analisis pencapaian indikator tujuan terhadap 5 (lima) tujuan dengan 8 (delapan) indikator kinerja, 2 indikator belum dapat diukur karena belum ada rilis oleh kementerian lembaga terkait, sehingga hanya 6 (enam) indikator yang diukur. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, diketahui bahwa 3 (tiga) indikator atau 50% dinilai Sangat Berhasil, 1 (satu) indikator atau 16,6% dinilai Berhasil, 1 (satu) indikator atau 16,6% dinilai Cukup dan 1 (satu) indikator atau 16,6% dinilai Kurang.

Sedangkan hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 9 (sembilan) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, diketahui bahwa 8 (delapan) indikator atau 44,4 % dinilai Sangat Berhasil, 9 (sembilan) atau 50% dinilai Berhasil, satu indikator dinilai Kurang dan 3 (tiga) indikator belum ada rilis dari kementerian lembaga terkait. Jadi ada 5 (lima) indikator belum ada realisasinya dan 2 (dua) indikator kinerja yang mendapatkan nilai Kurang akibat pandemi Covid-19, yaitu Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Pengangguran Terbuka. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 minus 3,69%, Provinsi Jawa Timur minus 2,39 dan Nasional minus 2,07. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar 10,97%, dibandingkan dengan Tahun 2019 meningkat sebesar 6,25% dari realisasi capaian Tahun 2019 sebesar 4,72%. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020 telah melakukan Re-Focussing anggaran yang sangat signifikan untuk penangan pandemi Covid-19. Sedangkan upaya terkait dalam mengatasi menurunya Pertumbuhan Ekonomi serta melonjaknya Tingkat Pengangguran Terbuka akibat pandemi Covid-19 tersebut, antara lain :

1. Mendorong kembali usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo;
2. Mengembangkan perekonomian melalui UKM;
3. Pengembangan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan gairah UKM dengan mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif;
5. Meningkatkan manajerial koperasi agar kondisi koperasi lebih berkembang dan sehat;
6. Peningkatan kualitas produk-produk khas dan unggulan Kabupaten Sidoarjo;;
7. Mendorong iklim investasi, terutama investasi domestic;
8. Mendorong ekspor Kabupaten Sidoarjo;
9. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah;

BAB V

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. 13 Januari 2020 : Menerima Penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik Peringkat III tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 oleh Gubernur Jawa Timur, di Surabaya.
2. 16 Oktober 2020 : Meraih Penghargaan LPPD tahun 2018 Status Kinerja Sangat Tinggi oleh Gubernur Jatim, di Surabaya.
3. 19 Okotber 2020 : Meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Tahun 2019 dari Kemenkeu diberikan oleh Gubernur Jatim, di Surabaya.
4. 03 November 2020 : Meraih Pengelolaan Manajemen ASN Baik dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Sidoarjo.
5. 02 November 2020 : Meraih Kategori RSUD sebagai RS dengan Kesiapsiagaan Terbaik Menghadapi Pandemi Covid-19 dari Persi Golden Award 2020 Pramakarya Dharmartha Husada di Sidoarjo.
6. 13 November 2020 : Meraih Penghargaan Top 30 Kovablik Calisline SMPN 4 Sidoarjo dari Gubernur Jatim, di Batu, Malang.
7. 10 November 2020 : Pj. Bupati Hudiyono Meraih Penghargaan sebagai Mitra Kreatif dari Memorandum, di Surabaya.
8. 14 Desember 2020 : Meraih Penghargaan Kab / Kota Peduli HAM (KKPHAM) dari Kemenkumham, di Surabaya.
9. 18 Desember 2020 : meraih Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif “Innovatife Government Award 2020” dari Kemendagri, di Jakarta.
10. 22 Desember 2020 : Meraih Top Digital Awards 2020 oleh Kemenkominfo, di Jakarta.

Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Dr. HUDIYONO, M.Si**
Jabatan	:	**Pj. BUPATI SIDOARJO**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja perubahan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sidoarjo, November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO

Dr. HUDIYONO, M.Si.

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan"		
	Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	**Indeks Good Governance**	**69.55**
		Indeks Reformasi Birokrasi	**B**
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK	WTP
		Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Status Kinerja EKPPD	ST
		Tingkat Maturitas SPIP	terdefinisi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.65
	Misi 2 : "Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat"		
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	**Pertumbuhan Ekonomi**	**1,4% - 2,5%**
		Indeks GINI	**0.343 - 0.35**
3.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	86.801
4.	Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,82% - 6,47%
		Tingkat Kemiskinan	7,16% - 8,58%
		Persentase Desa Maju	31.68%
	Misi 3 : "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		
	Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**78.84 - 79.50**
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.45 Tahun
		Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10.8 Tahun
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73.69 Tahun
	Misi 4 : "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"		
	Tujuan 4 : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	**Indeks Kebahagiaan**	**80.47**
7.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Indeks Rasa Aman	76.87
		Indeks Resiko Bencana	113.7
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.65
	Misi 5 : "Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan"		
	Tujuan 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kelestarian Lingkungan Hidup	**Indeks Infrastruktur**	**1.422**
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**53.01**
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Jalan Kondisi Mantap	90%
		Persentase penurunan Luas wilayah Rawan Genangan	65%
9.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	49.05
		Indeks Kualitas Udara	86.26
		Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	31.04

Sidoarjo, November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO

Dr. HUDIYONO, M.Si

Lampiran 3

ANGGARAN TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	**SEKRETARIAT DAERAH**	**41,541,608,299.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	12,645,660,184.00	APBD
	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pertanian dan BUMD	866,647,090.00	APBD
	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	776,852,080.00	APBD
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	1,126,938,660.00	APBD
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	1,972,143,386.00	APBD
	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1,268,766,145.00	APBD
	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	9,776,601,570.00	APBD
	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	2,575,185,304.00	APBD
	Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	10,532,813,880.00	APBD
2	**SEKRETARIAT DPRD**	**92,285,134,614.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	17,462,784,075.00	APBD
	Program Penganggaran dan Pengawasan	40,995,292,898.00	APBD
	Program Fasilitasi Persidangan dan Perundang - Undangan	27,134,879,651.00	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6,692,177,990.00	APBD
3	**INSPEKTORAT**	**6,269,890,250.00**	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,070,921,300.00	APBD
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,198,968,950.00	APBD
4	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**418,976,328,110.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,642,446,610.00	APBD
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	136,111,121,230.00	APBD
	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	620,087,680.00	APBD
	Program perluasan dan aksesibiltas pendidikan	84,141,293,020.00	APBD
	Program Pendidikan Sekolah Dasar	6,468,939,125.00	APBN dan DAK
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,370,693,080.00	APBN dan DAK
	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	13,577,600.00	APBD
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1,828,822,150.00	APBD
	Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	175,779,347,615.00	APBN dan DAK
5	**DINAS KESEHATAN**	**336,245,035,610.24**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,940,782,507.60	APBD
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31,601,241,702.00	APBD dan DAK
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7,054,972,060.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	81,204,163,595.00	APBD dan DAK

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	100,210,968,634.00	APBD
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	108,232,907,111.64	APBD dan BLUD
6	**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**	**252,022,707,095.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,381,146,432.00	APBD
	Program Penyusunan Perencanan Teknis dan Pengelolaan Data ke-PU-an	5,162,081,951.00	APBD
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	186,136,974,854.00	APBD dan DAK
	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir	54,342,503,858.00	APBD dan DAK
7	**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**	**207,699,965,194.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,303,050,663.00	APBD
	Program Penataan Bangunan	136,714,780,383.00	APBD
	Program Pengawasan Bangunan	1,199,913,360.00	APBD
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	56,765,805,488.00	APBD dan DAK
	Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	9,716,415,300.00	APBD
8	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**21,107,040,645.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,054,350,915.00	APBD
	Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	13,574,965,700.00	APBD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	948,500,300.00	APBD
	Program Perlindungan Masyarakat	529,223,730.00	APBD
9	**DINAS SOSIAL**	**33,101,625,209.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,762,567,019.00	APBD
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	23,038,015,650.00	APBD
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,418,731,200.00	APBD
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,882,311,340.00	APBD
10	**DINAS TENAGA KERJA**	**8,404,101,810.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,575,430,055.00	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,959,810,980.00	APBD
	Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1,393,438,220.00	APBD
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Penyelenggaraan Transmigrasi	475,422,555.00	APBD
11	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**18,458,272,824.00**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,514,173,486.00	APBD
	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,885,716,739.00	APBD dan DBHCHT

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12,864,487,599.00	APBD
	Program Pengendalian Kependudukan	1,193,895,000.00	APBD
12	**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**16,824,201,785.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,790,265,450.00	APBD
	Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	894,570,400.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	761,243,620.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan	1,456,665,800.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan	2,676,703,940.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan	5,244,752,575.00	APBD dan DAK
13	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**	**174,411,520,989.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,368,440,323.00	APBD
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	40,083,242,187.00	APBD
	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	2,306,776,390.00	APBD dan DBHCHT
	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	1,847,503,700.00	APBD dan DBHCHT
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan	125,805,558,389.00	APBD
14	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**10,782,787,100.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,165,380,530.00	APBD
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	828,821,050.00	APBD
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,618,232,960.00	APBD
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	924,994,760.00	APBD
	Program pelayanan pencatatan sipil	245,357,800.00	APBD
15	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**15,832,953,530.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	8,662,204,560.00	APBD
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,201,048,650.00	APBD
	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	344,574,280.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	2,020,125,780.00	APBD
	Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	3,605,000,260.00	APBD
16	**DINAS PERHUBUNGAN**	**39,377,326,185.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,831,949,350.00	APBD
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	7,454,517,600.00	APBD
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	8,382,560,885.00	APBD dan DAK
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	17,451,287,170.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi di bidang Perhubungan	1,257,011,180.00	APBD
17	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**26,042,179,532.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,853,030,012.00	APBD
	Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	16,244,877,630.00	APBD
	Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika	1,333,979,100.00	APBD
	Program pelayananan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	5,988,899,620.00	APBD
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	621,393,170.00	APBD
18	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**	**5,469,983,620.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,420,202,270.00	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	694,262,850.00	APBD
	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	1,681,876,400.00	APBD
	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	673,642,100.00	APBD
19	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**8,330,769,490.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,047,530,440.00	APBD
	Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	196,868,220.00	APBD
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	117,414,900.00	APBD
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	968,955,930.00	APBD
20	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA**	**17,435,771,829.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,890,633,339.00	APBD
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2,197,512,350.00	APBD
	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	526,255,000.00	APBD
	Program Pengembangan Objek, Promosi dan Usaha Pariwisata	3,392,989,760.00	APBD
	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	8,428,381,380.00	APBD
21	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**5,681,065,351.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,213,421,666.00	APBD
	Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan	2,384,755,194.00	APBD
	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	434,999,360.00	APBD
	Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan	647,889,131.00	APBD
22	**DINAS PERIKANAN**	**39,682,100,390.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,903,246,279.00	APBD
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam	324,106,180.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan produksi perikanan Budidaya	36,890,147,856.00	APBD dan DAK

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	564,600,075.00	APBD dan DAK
23	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**32,173,513,699.77**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,138,527,328.77	APBD
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal	5,796,034,030.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta pendapatan pasar rakyat	14,573,243,281.00	APBD dan DBHCHT
	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	4,665,709,060.00	APBD dan DBHCHT
24	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**12,942,017,161.00**	
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	1,179,677,940.00	APBD
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	841,417,400.00	APBD
	Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	2,184,878,100.00	APBD
	Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1,153,574,800.00	APBD
	Program perencanaan pembangunan daerah	2,820,790,830.00	APBD
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,761,678,091.00	APBD
25	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**10,009,563,206.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,245,310,096.00	APBD
	Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3,056,589,410.00	APBD
	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,074,644,700.00	APBD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1,633,019,000.00	APBD
26	**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**	**9,893,695,167.00**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,762,010,517.00	APBD
	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	2,048,054,900.00	APBD
	Program Penetapan Pajak Daerah.	2,064,674,900.00	APBD
	Program Pengendalian Pajak Daerah	1,018,954,850.00	APBD
27	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**8,852,578,865.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,826,227,894.00	APBD
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	559,078,520.00	APBD
	Program Pengembangan ASN	1,216,931,000.00	APBD
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	1,150,922,081.00	APBD
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2,099,419,370.00	APBD
28	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**9,561,386,200.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,904,637,300.00	APBD
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4,212,682,200.00	APBD
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1,545,417,400.00	APBD
	Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	898,649,300.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
29	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**15,819,806,874.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,072,158,994.00	APBD
	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	8,422,677,980.00	APBD
	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	2,319,740,100.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1,005,229,800.00	APBD
30	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	**574,895,657,671.75**	
	Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	574,895,657,671.75	BLUD dan APBD
31	**KECAMATAN SIDOARJO**	**20,338,084,482.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,757,766,820.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	203,699,900.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,598,632,730.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	16,777,985,032.00	APBD
32	**KECAMATAN CANDI**	**1,986,435,023.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,317,801,023.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	632,034,000.00	APBD
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	36,600,000.00	APBD
33	**KECAMATAN BUDURAN**	**2,673,193,550.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,912,857,820.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	723,464,930.00	APBD
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	36,870,800.00	APBD
34	**KECAMATAN GEDANGAN**	**2,253,632,065.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,586,035,341.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	626,521,424.00	APBD
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	41,075,300.00	APBD
35	**KECAMATAN SEDATI**	**2,524,324,440.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,513,673,040.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	923,915,200.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	86,736,200.00	APBD
36	**KECAMATAN WARU**	**4,761,729,670.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,443,549,570.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,318,180,100.00	APBD
37	**KECAMATAN TAMAN**	**14,972,721,566.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,380,229,790.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	248,000,000.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	948,098,920.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	11,396,392,856.00	APBD
38	**KECAMATAN SUKODONO**	**4,737,367,480.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,524,131,332.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	768,438,348.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	444,797,800.00	APBD
39	**KECAMATAN WONOAYU**	**1,766,360,500.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,317,490,900.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	438,249,800.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	10,619,800.00	APBD
40	**KECAMATAN KRIAN**	**8,678,750,710.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,558,200,110.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,365,803,790.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	3,754,746,810.00	APBD
41	**KECAMATAN BALONGBENDO**	**1,982,416,850.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,300,581,950.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	525,562,600.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	156,272,300.00	APBD
42	**KECAMATAN TARIK**	**1,947,205,200.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,498,875,100.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	448,330,100.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	APBD
43	**KECAMATAN TULANGAN**	**1,975,046,300.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,143,707,500.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	827,388,800.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	3,950,000.00	APBD
44	**KECAMATAN PRAMBON**	**2,342,220,635.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,746,727,175.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595,493,460.00	APBD
45	**KECAMATAN KREMBUNG**	**1,910,370,774.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,296,690,124.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595,978,650.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	17,702,000.00	APBD
46	**KECAMATAN TANGGULANGIN**	**2,169,382,750.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,812,806,470.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	356,576,280.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	APBD
47	**KECAMATAN JABON**	**2,607,201,574.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,966,599,550.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	628,555,924.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	12,046,100.00	APBD
48	**KECAMATAN PORONG**	**12,592,630,733.00**	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,940,548,141.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	8,785,582,142.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	135,898,800.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	730,601,650.00	APBD
	J U M L A H	**2,562,349,662,607.76**	

Sidoarjo, November 2020 Pj. BUPATI SIDOARJO

Dr. HUDIYONO, M.Si

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2020

VISI :Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realiasasi 2020	Capaian	Tingkat Keberhasilan	Keterangan
	MISI 1	:	**Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.**						
	TUJUAN 1	:	**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan**						
	Indikator Tujuan	**1**	**Indeks Good Governance**	**Angka**	**69.55**	**77.78**	**111.83%**		
		2	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**B**	**-**	**-**		Belum dirilis oleh Kemenpan RB
1	***Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan***	1	Opini Atas Audit BPK	Opini	WTP	-	-		Belum dilakukan audit oleh BPK
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB (Sangat Baik)	-	-		Belum dirilis oleh Kemenpan RB
		3	Status Kinerja EKPPD	Kategori	ST (Sangat Tinggi)	-	-		Belum dirilis oleh Kemendagri
		4	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100.00%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 1						**Belum dapat diukur**	
2	***Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi***	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	Baik (3,51 - 4,00)	Sangat Baik (4,27)	106.75%		
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2.65	3.13	118.11%		Belum ada Penilaian Kembali (Realisasi 2019)
		Tingkat Pencapaian Sasaran 2					**112.43%**	**Sangat Berhasil**	
	MISI 2	:	**Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat**						
	TUJUAN 2	:	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing**						
	Indikator Tujuan	**1**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**1,4 - 2,5**	**-3.69**	**- 263.57%**		
		2	**Indeks GINI**	**Indeks**	**0.343 - 0.35**	**-**			Belum dirilis oleh BPS
3	***Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat***	1	PDRB perkapita	Rupiah (juta/tahun)	86.801	86.425	99.57%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 3					**99.57%**	**Berhasil**	

4	*Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat*	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.82- 6,47	10.97	30.45%		BPS
		2	Tingkat Kemiskinan	%	7,16 - 8,58	5.59	121.93%		BPS
		3	Persentase Desa Maju	%	31.68	42.55	134.31%		DPMD
		Tingkat Pencapaian Sasaran 4					**95.56%**	**Berhasil**	
	MISI 3	**:**	**Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan**						
	TUJUAN 3	**:**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**						
	Indikator Tujuan	**1**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**78,84 - 79,50**	**80.29**	**100.99%**		**BPS Prov.Jatim 2020**
5	*Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat*	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.45	14.93	103.32%		BPS Prov.Jatim 2020
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	Tahun	10.8	10.5	97.22%		BPS Prov.Jatim 2020
		Tingkat Pencapaian Sasaran 5					**100.27%**	**Sangat Berhasil**	
6	*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73.69	74.04	100.47%	-	BPS Prov.Jatim 2020
		Tingkat Pencapaian Sasaran 6					**100.47%**	**Sangat Berhasil**	
	MISI 4	**:**	**Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban**						
	TUJUAN 4	**:**	**Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun,**						
	Indikator Tujuan	**1**	**Indeks Kebahagiaan**	**Indeks**	**80.47**	**66.64**	**82.81%**	**Cukup**	
7	*Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan*	1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76.87	76.03	98.91%	Berhasil	
		2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	113.7	112.82	99.23%	Berhasil	
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.65	94.13	99.45%	Berhasil	
		Tingkat Pencapaian Sasaran 7					**99.19%**	**Berhasil**	
	MISI 5	**:**	**Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**						
	TUJUAN 5	**:**	**Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup**						
	Indikator Tujuan	**1**	**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**1.422**	**1.349**	**94.87%**	**Berhasil**	**-**
		2	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Indeks**	**53.01**	**65.3**	**123.18%**	**Sangat Berhasil**	**-**

8	***Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah***	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	90	82.00	91.11%		-
		2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	%	65	61.61	94.78%		-
		Tingkat Pencapaian Sasaran 8					**92.95%**	**Berhasil**	
9	***Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup***	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	49.05	51.52	105.04%		
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86.26	85.14	98.70%		
		3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	31.04	52.26	168.36%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 9					**124.03%**	**Sangat Berhasil**	

Lampiran 5

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2020

VISI :Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	ANGGARAN	
				Alokasi 2020	Anggaran
	MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif Aspiratif Partisipasif dan Transparan		
	TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif		
1	*Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan*	1	Opini Atas Audit BPK	Rp 359,097,601,601.37	14.01%
		2	Nilai SAKIP Kabupaten		
		3	Status Kinerja EKPPD		
		4	Tingkat Maturitas SPIP		
2	*Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi*	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Rp 38,871,164,583.00	1.52%
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
	MISI 2	:	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan pertanian perikanan pariwisata UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat		
	TUJUAN 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing		
3	*Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat*	1	Pendapatan perkapita	Rp 86,508,603,407.00	3.38%
4	*Meningkatnya pemerataan distribusi*	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp 42,338,478,915.00	1.65%
		2	Tingkat Kemiskinan		

	pendapatan masyarakat	3	Persentase Desa Maju		
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan		
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
5	*Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat*	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rp 427,765,952,184.00	16.69%
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)		
6	*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*	1	Angka Harapan Hidup	Rp 917,784,548,373.39	35.82%
	MISI 4	:	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME serta dapat Memelihara Kerukunan Ketentraman dan Ketertiban		
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Rukun Aman		
7	*Meningkatnya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Umum yang berkeadilan*	1	Indeks Rasa Aman	Rp 35,356,380,849.00	1.38%
		2	Indeks Resiko Bencana		
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan		
	TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup		
8	*Meningkatnya Kuantitas dan*	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	Rp 484,583,852,029.00	18.91%

	Kualitas Infrastruktur Daerah	2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir		
9	*Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup*	1	Indeks Kualitas Air	Rp 170,043,080,666.00	6.64%
		2	Indeks Kualitas Udara		
		3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi		

Lampiran 6

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2020

VISI : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					Target 2020	Realiasasi 2020	Capaian	Alokasi 2020 (Rp)	Realiasasi 2020 (Rp)	Capaian
	MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.							
	TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan							
1	*Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan*	1	Opini Atas Audit BPK	Kategori	WTP	-	-	359,097,601,601	271,890,306,727	75.71%
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB (Sangat Baik)	-	-			
		3	Status Kinerja EKPPD	Kategori	ST (Sangat Tinggi)	-	-			
		4	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3	Level 3	100.00%			
2	*Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi*	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	Baik (3,51 - 4,00)	Sangat Baik (4,27)	106.75%	38,871,164,583	32,533,441,103	83.70%
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.65	3.13	118.11%			
	MISI 2	:	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat							
	TUJUAN 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing							
3	*Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat*	1	PDRB perkapita	Rupiah (juta/tahun)	86.801	86.425	99.57%	86,508,603,407	78,284,545,730	90.49%
4	*Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat*	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.82- 6,47	10.97	30.45%	42,338,478,915	36,461,984,867	86.12%
		2	Tingkat Kemiskinan	%	7,16 - 8,58	5.59	121.93%			
		3	Persentase Desa Maju	%	31.68	42.55	134.31%			
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan							
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							

5	*Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat*	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.45	14.93	103.32%	427,765,952,184	405,899,902,159	94.89%
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	Tahun	10.8	10.5	97.22%			
6	*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73.69	74.04	100.47%	917,784,548,373	829,156,707,309	90.34%
	MISI 4	:	**Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME serta dapat Memelihara Kerukunan Ketentraman dan Ketertiban**							
	TUJUAN 4	:	**Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Rukun Aman**							
7	*Meningkatnya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Umum yang berkeadilan*	1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76.87	76.03	98.91%	35,356,380,849	30,697,940,385	86.82%
		2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	113.7	112.82	99.23%			
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.65	94.13	99.45%			
	MISI 5	:	**Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**							
	TUJUAN 5	:	**Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup**							
8	*Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah*	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	90	82	91.11%	484,583,852,029	274,449,228,432	56.64%
		2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	%	65	61.61	94.78%			
9	*Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup*	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	49.05	51.52	105.04%	170,043,080,666	133,066,733,687	78.25%
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86.26	85.14	98.70%			
		3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	31.04	52.26	168.36%			

Lampiran 7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2020

VISI : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	MISI 1	:	**Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.**			
	TUJUAN 1	:	**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan**			
1	***Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan***	1	Opini Atas Audit BPK	-		
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	-		
		3	Status Kinerja EKPPD	-		
		4	Tingkat Maturitas SPIP	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 1		**0**	**75.71**	**-**
2	***Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi***	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	106.75		
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	118.11		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 2		**112.43**	**83.70**	**28.74**
	MISI 2	:	**Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat**			
	TUJUAN 2	:	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing**			
3	***Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat***	1	Pendapatan perkapita	99.57		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 3		**99.57**	**90.49**	**9.07**
4	***Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat***	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	30.45		
		2	Tingkat Kemiskinan	121.93		
		3	Persentase Desa Maju	134.31		

Activate V

		Tingkat Pencapaian Sasaran 4		95.56%	86.12%	9.44%
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan			
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
5	*Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat*	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	103.32%		
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	97.22%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 5		100.27%	94.89%	5.38%
6	*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*	1	Angka Harapan Hidup	100.47%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 6		100.47%	90.34%	10.13%
	MISI 4	:	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban			
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun			
7	*Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan*	1	Indeks Rasa Aman	98.91%		
		2	Indeks Resiko Bencana	0.99%		
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99.45%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 7		66.45%	86.82%	-20.37%
	MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan			
	TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup			
8	*Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah*	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	91.11%		
		2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	94.78%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 8		92.95%	56.64%	36.31%
9	*Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup*	1	Indeks Kualitas Air	105.04%		
		2	Indeks Kualitas Udara	98.70%		
		3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	168.36%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 9		124.03%	78.25%	45.78%

Lampiran 8

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM PER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2020

VISI : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**SEKRETARIAT DAERAH**	**41,541,608,299.00**	**33,442,290,012.00**	**80.50%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	12,645,660,184.00	9,928,751,611.00	78.52%
	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pertanian dan BUMD	866,647,090.00	701,798,857.00	80.98%
	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	776,852,080.00	689,612,501.00	88.77%
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	1,126,938,660.00	883,322,550.00	78.38%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	1,972,143,386.00	1,825,756,271.00	92.58%
	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1,268,766,145.00	1,248,906,996.00	98.43%
	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	9,776,601,570.00	7,934,210,359.00	81.16%
	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	2,575,185,304.00	2,129,806,091.00	82.70%
	Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	10,532,813,880.00	8,100,124,776.00	76.90%
2	**SEKRETARIAT DPRD**	**92,285,134,614.00**	**48,957,192,658.00**	**53.05%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	17,462,784,075.00	13,499,032,994.00	77.30%
	Program Penganggaran dan Pengawasan	40,995,292,898.00	21,414,989,994.00	52.24%
	Program Fasilitasi Persidangan dan Perundang - Undangan	27,134,879,651.00	12,425,272,010.00	45.79%
	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6,692,177,990.00	1,617,897,660.00	24.18%
3	**INSPEKTORAT**	**6,269,890,250.00**	**4,754,032,832.00**	**75.82%**
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,070,921,300.00	929,450,000.00	86.79%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,198,968,950.00	3,824,582,832.00	73.56%

4	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**418,976,328,110.00**	**399,550,252,274.00**	**95.36%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,642,446,610.00	3,621,702,659.00	78.01%
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	136,111,121,230.00	131,885,194,065.00	96.90%
	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	620,087,680.00	583,000,000.00	94.02%
	Program perluasan dan aksesibiltas pendidikan	84,141,293,020.00	80,640,395,747.00	95.84%
	Program Pendidikan Sekolah Dasar	6,468,939,125.00	4,670,206,486.00	72.19%
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,370,693,080.00	8,887,732,468.00	94.85%
	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	13,577,600.00	13,225,600.00	97.41%
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1,828,822,150.00	1,484,949,475.00	81.20%
	Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	175,779,347,615.00	167,763,845,774.00	95.44%
5	**DINAS KESEHATAN**	**336,245,035,610.24**	**273,115,591,194.16**	**81.23%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,940,782,507.60	6,930,117,995.00	87.27%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31,601,241,702.00	21,943,295,882.00	69.44%
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7,054,972,060.00	5,680,730,153.00	80.52%
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	81,204,163,595.00	63,529,224,538.00	78.23%
	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	100,210,968,634.00	80,760,512,758.00	80.59%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	108,232,907,111.64	94,271,709,868.16	87.10%
6	**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**	**252,022,707,095.00**	**121,370,618,592.00**	**48.16%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,381,146,432.00	4,632,476,357.00	72.60%
	Program Penyusunan Perencanan Teknis dan Pengelolaan Data ke-PU-an	5,162,081,951.00	3,307,568,314.00	64.07%
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	186,136,974,854.00	69,819,056,412.00	37.51%
	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir	54,342,503,858.00	43,611,517,509.00	80.25%
7	**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**	**207,699,965,194.00**	**135,743,983,660.00**	**65.36%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,303,050,663.00	2,483,235,591.00	75.18%
	Program Penataan Bangunan	136,714,780,383.00	88,760,954,525.00	64.92%
	Program Pengawasan Bangunan	1,199,913,360.00	1,058,368,882.00	88.20%

	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	56,765,805,488.00	34,934,410,341.00	61.54%
	Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	9,716,415,300.00	8,507,014,321.00	87.55%
8	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**21,107,040,645.00**	**19,118,346,139.00**	**90.58%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,054,350,915.00	5,287,569,251.00	87.34%
	Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	13,574,965,700.00	12,556,541,311.00	92.50%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	948,500,300.00	756,388,847.00	79.75%
	Program Perlindungan Masyarakat	529,223,730.00	517,846,730.00	97.85%
9	**DINAS SOSIAL**	**33,101,625,209.00**	**30,865,343,923.00**	**93.24%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,762,567,019.00	2,208,948,931.00	79.96%
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	23,038,015,650.00	21,770,747,375.00	94.50%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,418,731,200.00	2,049,092,697.00	84.72%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,882,311,340.00	4,836,554,920.00	99.06%
10	**DINAS TENAGA KERJA**	**8,404,101,810.00**	**7,333,421,791.00**	**87.26%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,575,430,055.00	3,178,622,338.00	88.90%
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,959,810,980.00	2,825,787,510.00	95.47%
	Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1,393,438,220.00	935,436,627.00	67.13%
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Penyelenggaraan Transmigrasi	475,422,555.00	393,575,316.00	82.78%
11	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**18,458,272,824.00**	**16,410,383,556.00**	**88.91%**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,514,173,486.00	1,959,961,435.00	77.96%
	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,885,716,739.00	1,655,732,546.00	87.80%
	Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12,864,487,599.00	11,669,006,925.00	90.71%
	Program Pengendalian Kependudukan	1,193,895,000.00	1,125,682,650.00	94.29%
12	**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**16,824,201,785.00**	**14,897,721,062.00**	**88.55%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,790,265,450.00	4,799,756,628.00	82.89%
	Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	894,570,400.00	793,144,984.00	88.66%

	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	761,243,620.00	726,781,455.00	95.47%
	Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan	1,456,665,800.00	1,352,003,543.00	92.81%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan	2,676,703,940.00	2,266,062,651.00	84.66%
	Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan	5,244,752,575.00	4,959,971,801.00	94.57%
13	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**	**174,411,520,989.00**	**136,549,732,237.00**	**78.29%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,368,440,323.00	3,482,998,550.00	79.73%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	40,083,242,187.00	26,723,521,226.00	66.67%
	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	2,306,776,390.00	1,888,864,442.00	81.88%
	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	1,847,503,700.00	1,514,786,123.00	81.99%
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan	125,805,558,389.00	102,939,561,896.00	81.82%
14	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**10,782,787,100.00**	**9,801,219,545.00**	**90.90%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,165,380,530.00	6,612,605,999.00	92.29%
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	828,821,050.00	694,909,537.00	83.84%
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,618,232,960.00	1,397,823,033.00	86.38%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	924,994,760.00	872,619,366.00	94.34%
	Program pelayanan pencatatan sipil	245,357,800.00	223,261,610.00	90.99%
15	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**15,832,953,530.00**	**10,671,190,679.00**	**67.40%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	8,662,204,560.00	7,020,400,257.00	81.05%
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,201,048,650.00	998,049,138.00	83.10%
	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	344,574,280.00	331,915,280.00	96.33%
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	2,020,125,780.00	1,668,959,980.00	82.62%
	Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	3,605,000,260.00	651,866,024.00	18.08%
16	**DINAS PERHUBUNGAN**	**39,377,326,185.00**	**28,349,656,250.00**	**71.99%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,831,949,350.00	3,899,318,122.00	80.70%
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	7,454,517,600.00	6,154,555,252.00	82.56%
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	8,382,560,885.00	2,477,774,712.00	29.56%

	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	17,451,287,170.00	14,747,009,920.00	84.50%
	Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma,Standart Prosedur dan Sistem Informasi di bidang Perhubungan	1,257,011,180.00	1,070,998,244.00	85.20%
17	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**26,042,179,532.00**	**24,260,644,674.00**	**93.16%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,853,030,012.00	1,482,136,780.00	79.98%
	Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	16,244,877,630.00	15,726,019,742.00	96.81%
	Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasiteknologi informatika	1,333,979,100.00	1,216,800,092.00	91.22%
	Program pelayananan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	5,988,899,620.00	5,229,144,860.00	87.31%
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	621,393,170.00	606,543,200.00	97.61%
18	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**	**5,469,983,620.00**	**4,864,772,869.00**	**88.94%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,420,202,270.00	2,123,442,809.00	87.74%
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	694,262,850.00	621,473,860.00	89.52%
	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	1,681,876,400.00	1,566,442,900.00	93.14%
	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	673,642,100.00	553,413,300.00	82.15%
19	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**8,330,769,490.00**	**7,126,258,320.00**	**85.54%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,047,530,440.00	5,914,570,818.00	83.92%
	Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	196,868,220.00	185,064,620.00	94.00%
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	117,414,900.00	96,285,600.00	82.00%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	968,955,930.00	930,337,282.00	96.01%
20	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA**	**17,435,771,829.00**	**12,915,106,246.00**	**74.07%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,890,633,339.00	2,501,987,160.00	86.55%
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2,197,512,350.00	1,323,811,937.00	60.24%
	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	526,255,000.00	458,135,760.00	87.06%
	Program Pengembangan Objek, Promosi dan Usaha Pariwisata	3,392,989,760.00	2,660,144,482.00	78.40%
	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	8,428,381,380.00	5,971,026,907.00	70.84%
21	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**5,681,065,351.00**	**5,143,022,089.00**	**90.53%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,213,421,666.00	1,821,072,932.00	82.27%
	Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan	2,384,755,194.00	2,265,868,633.00	95.01%
	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	434,999,360.00	423,870,667.00	97.44%

	Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan	647,889,131.00	632,209,857.00	97.58%
22	**DINAS PERIKANAN**	**39,682,100,390.00**	**38,444,731,844.00**	**96.88%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,903,246,279.00	1,615,660,106.00	84.89%
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam	324,106,180.00	307,030,422.00	94.73%
	Program Peningkatan produksi perikanan Budidaya	36,890,147,856.00	35,975,060,427.00	97.52%
	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	564,600,075.00	546,980,889.00	96.88%
23	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**32,173,513,699.77**	**27,041,997,449.00**	**84.05%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,138,527,328.77	6,632,486,616.00	92.91%
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal	5,796,034,030.00	5,732,775,259.00	98.91%
	Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta pendapatan pasar rakyat	14,573,243,281.00	13,374,583,314.00	91.77%
	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	4,665,709,060.00	1,302,152,260.00	27.91%
24	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**12,942,017,161.00**	**11,261,403,519.00**	**87.01%**
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	1,179,677,940.00	1,125,815,475.00	95.43%
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	841,417,400.00	825,546,905.00	98.11%
	Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	2,184,878,100.00	2,148,011,220.00	98.31%
	Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1,153,574,800.00	1,094,924,440.00	94.92%
	Program perencanaan pembangunan daerah	2,820,790,830.00	2,517,671,140.00	89.25%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,761,678,091.00	3,549,434,339.00	74.54%
25	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**10,009,563,206.00**	**9,064,276,656.00**	**90.56%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,245,310,096.00	3,641,459,411.00	85.78%
	Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3,056,589,410.00	2,917,128,198.00	95.44%
	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,074,644,700.00	984,312,850.00	91.59%
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1,633,019,000.00	1,521,376,197.00	93.16%
26	**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**	**9,893,695,167.00**	**8,913,168,034.00**	**90.09%**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,762,010,517.00	4,393,266,733.00	92.26%
	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	2,048,054,900.00	1,821,406,900.00	88.93%
	Program Penetapan Pajak Daerah.	2,064,674,900.00	1,874,912,033.00	90.81%
	Program Pengendalian Pajak Daerah	1,018,954,850.00	823,582,368.00	80.83%

27	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**8,852,578,865.00**	**7,635,090,699.00**	**86.25%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,826,227,894.00	3,421,833,901.00	89.43%
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	559,078,520.00	468,413,988.00	83.78%
	Program Pengembangan ASN	1,216,931,000.00	1,039,724,000.00	85.44%
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	1,150,922,081.00	976,118,510.00	84.81%
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2,099,419,370.00	1,729,000,300.00	82.36%
28	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**9,561,386,200.00**	**7,612,753,712.00**	**79.62%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,904,637,300.00	2,448,053,043.00	84.28%
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4,212,682,200.00	3,361,210,000.00	79.79%
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1,545,417,400.00	1,124,198,069.00	72.74%
	Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	898,649,300.00	679,292,600.00	75.59%
29	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**15,819,806,874.00**	**12,929,217,854.00**	**81.73%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,072,158,994.00	2,895,713,172.00	71.11%
	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	8,422,677,980.00	7,409,744,311.00	87.97%
	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	2,319,740,100.00	1,826,300,671.00	78.73%
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1,005,229,800.00	797,459,700.00	79.33%
30	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	**574,895,657,671.75**	**549,718,408,774.55**	**95.62%**
	Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	574,895,657,671.75	549,718,408,774.55	95.62%
31	**KECAMATAN SIDOARJO**	**20,338,084,482.00**	**18,297,566,836.00**	**89.97%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,757,766,820.00	1,479,763,862.00	84.18%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	203,699,900.00	161,010,401.00	79.04%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,598,632,730.00	1,211,731,480.00	75.80%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	16,777,985,032.00	15,445,061,093.00	92.06%
32	**KECAMATAN CANDI**	**1,986,435,023.00**	**1,770,735,417.00**	**89.14%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,317,801,023.00	1,172,633,303.00	88.98%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	632,034,000.00	564,721,126.00	89.35%
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	36,600,000.00	33,380,988.00	91.20%
33	**KECAMATAN BUDURAN**	**2,673,193,550.00**	**2,409,288,077.00**	**90.13%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,912,857,820.00	1,709,343,160.00	89.36%

	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	723,464,930.00	663,692,831.00	91.74%
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	36,870,800.00	36,252,086.00	98.32%
34	**KECAMATAN GEDANGAN**	**2,253,632,065.00**	**2,051,624,596.00**	**91.04%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,586,035,341.00	1,423,516,117.00	89.75%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	626,521,424.00	589,304,479.00	94.06%
	Program Penyelengaraan Pelayanan umum	41,075,300.00	38,804,000.00	94.47%
35	**KECAMATAN SEDATI**	**2,524,324,440.00**	**2,142,096,904.00**	**84.86%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,513,673,040.00	1,241,973,855.00	82.05%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	923,915,200.00	816,063,183.00	88.33%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	86,736,200.00	84,059,866.00	96.91%
36	**KECAMATAN WARU**	**4,761,729,670.00**	**2,972,225,723.00**	**62.42%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,443,549,570.00	1,929,523,867.00	56.03%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,318,180,100.00	1,042,701,856.00	79.10%
37	**KECAMATAN TAMAN**	**14,972,721,566.00**	**13,540,819,776.00**	**90.44%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,380,229,790.00	2,088,923,444.00	87.76%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	248,000,000.00	243,621,000.00	98.23%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	948,098,920.00	890,131,055.00	93.89%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	11,396,392,856.00	10,318,144,277.00	90.54%
38	**KECAMATAN SUKODONO**	**4,737,367,480.00**	**3,334,676,174.00**	**70.39%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,524,131,332.00	2,287,672,905.00	64.91%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	768,438,348.00	626,273,054.00	81.50%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	444,797,800.00	420,730,215.00	94.59%
39	**KECAMATAN WONOAYU**	**1,766,360,500.00**	**1,607,681,274.00**	**91.02%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,317,490,900.00	1,175,664,894.00	89.24%

	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	438,249,800.00	421,396,580.00	96.15%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	10,619,800.00	10,619,800.00	100.00%
40	**KECAMATAN KRIAN**	**8,678,750,710.00**	**7,010,263,620.00**	**80.78%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,558,200,110.00	2,332,871,890.00	65.56%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,365,803,790.00	1,230,937,928.00	90.13%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	3,754,746,810.00	3,446,453,802.00	91.79%
41	**KECAMATAN BALONGBENDO**	**1,982,416,850.00**	**1,712,316,705.00**	**86.38%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,300,581,950.00	1,118,137,883.00	85.97%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	525,562,600.00	500,783,237.00	95.29%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	156,272,300.00	93,395,585.00	59.76%
42	**KECAMATAN TARIK**	**1,947,205,200.00**	**1,525,481,850.00**	**78.34%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,498,875,100.00	1,152,941,042.00	76.92%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	448,330,100.00	372,540,808.00	83.10%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	-	#DIV/0!
43	**KECAMATAN TULANGAN**	**1,975,046,300.00**	**1,715,292,337.00**	**86.85%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,143,707,500.00	953,289,479.00	83.35%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	827,388,800.00	758,052,858.00	91.62%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	3,950,000.00	3,950,000.00	100.00%
44	**KECAMATAN PRAMBON**	**2,342,220,635.00**	**1,951,926,003.00**	**83.34%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,746,727,175.00	1,431,896,597.00	81.98%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595,493,460.00	520,029,406.00	87.33%
45	**KECAMATAN KREMBUNG**	**1,910,370,774.00**	**1,546,397,682.00**	**80.95%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,296,690,124.00	1,026,002,040.00	79.12%

	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595,978,650.00	502,792,642.00	84.36%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	17,702,000.00	17,603,000.00	99.44%
46	**KECAMATAN TANGGULANGIN**	**2,169,382,750.00**	**1,851,619,342.00**	**85.35%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,812,806,470.00	1,529,396,225.00	84.37%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	356,576,280.00	322,223,117.00	90.37%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	-	#DIV/0!
47	**KECAMATAN JABON**	**2,607,201,574.00**	**2,104,292,770.00**	**80.71%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,966,599,550.00	1,593,937,502.00	81.05%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	628,555,924.00	502,066,268.00	79.88%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	12,046,100.00	8,289,000.00	68.81%
48	**KECAMATAN PORONG**	**12,592,630,733.00**	**7,034,656,169.00**	**55.86%**
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,940,548,141.00	1,913,290,951.00	65.07%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	8,785,582,142.00	4,467,107,657.00	50.85%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	135,898,800.00	130,221,588.00	95.82%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	730,601,650.00	524,035,973.00	71.73%
	J U M L A H	**2,562,349,662,607.76**	**2,092,440,790,398.71**	**81.66%**

Lampiran 9

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4,058,099,090,414.00**	**4,422,599,399,218.15**	**-364,500,308,804.15**	**108.98**
41	***Pendapatan Asli Daerah***	***1,531,360,832,030.00***	***1,809,832,433,911.15***	***-278,471,601,881.15***	***118.18***
411	**Hasil Pajak Daerah**	**849,455,000,000.00**	**929,261,529,986.45**	**-79,806,529,986.45**	**109.40**
41101	*Pajak Hotel*	*9,700,000,000.00*	*11,104,965,643.00*	*-1,404,965,643.00*	*114.48*
41102	*Pajak Restoran*	*62,000,000,000.00*	*64,616,576,015.00*	*-2,616,576,015.00*	*104.22*
41103	*Pajak Hiburan*	*2,730,000,000.00*	*2,814,119,899.00*	*-84,119,899.00*	*103.08*
41104	*Pajak Reklame*	*14,000,000,000.00*	*14,690,375,957.00*	*-690,375,957.00*	*104.93*
41105	*Pajak Penerangan Jalan*	*313,000,000,000.00*	*305,298,678,427.45*	*7,701,321,572.55*	*97.54*
41107	*Pajak Parkir*	*15,000,000,000.00*	*15,821,168,400.00*	*-821,168,400.00*	*105.47*
41108	*Pajak Air Tanah*	*2,025,000,000.00*	*2,575,219,356.00*	*-550,219,356.00*	*127.17*
41112	*Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*	*211,000,000,000.00*	*229,810,879,995.00*	*-18,810,879,995.00*	*108.92*
41113	*Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*	*220,000,000,000.00*	*282,529,546,294.00*	*-62,529,546,294.00*	*128.42*
412	**Hasil Retribusi Daerah**	**55,980,517,525.00**	**58,931,135,490.00**	**-2,950,617,965.00**	**105.27**
41201	*Retribusi Jasa Umum*	*26,389,800,000.00*	*28,668,170,054.00*	*-2,278,370,054.00*	*108.63*
41202	*Retribusi Jasa Usaha*	*7,784,538,250.00*	*3,975,864,077.00*	*3,808,674,173.00*	*51.07*
41203	*Retribusi Perizinan Tertentu*	*21,806,179,275.00*	*26,287,101,359.00*	*-4,480,922,084.00*	*120.55*
413	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**37,626,054,550.00**	**37,626,054,550.00**	**0.00**	**100.00**
41301	*Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD*	*37,626,054,550.00*	*37,626,054,550.00*	*0.00*	*100.00*
414	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**588,299,259,955.00**	**784,013,713,884.70**	**-195,714,453,929.70**	**133.27**
41401	*Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan*	*396,371,500.00*	*1,538,252,711.00*	*-1,141,881,211.00*	*388.08*
41402	*Penerimaan Jasa Giro*	*5,138,501,606.00*	*5,446,634,576.28*	*-308,132,970.28*	*106.00*
41403	*Pendapatan Bunga Deposito*	*52,065,944,716.00*	*49,998,533,959.19*	*2,067,410,756.81*	*96.03*
41404	*Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*	*11,492,260.00*	*14,730,260.00*	*-3,238,000.00*	*128.18*
41406	*Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan*	*330,193,840.00*	*1,071,215,269.60*	*-741,021,429.60*	*324.42*
41407	*Pendapatan Denda Pajak*	*1,263,216,561.00*	*1,545,535,986.00*	*-282,319,425.00*	*122.35*
41408	*Pendapatan Denda Retribusi*	*185,344,502.00*	*325,741,443.00*	*-140,396,941.00*	*175.75*
41410	*Pendapatan Dari Pengembalian*	*4,219,647,068.00*	*8,516,791,911.87*	*-4,297,144,843.87*	*201.84*
41414	*Hasil Pengelolaan Dana Bergulir*	*188,000,000.00*	*151,447,243.00*	*36,552,757.00*	*80.56*
41415	*Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)*	*3,898,130,000.00*	*6,542,073,743.00*	*-2,643,943,743.00*	*167.83*
41416	*Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama*	*608,848,832.00*	*758,797,604.00*	*-149,948,772.00*	*124.63*
41417	*Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)*	*519,993,569,070.00*	*707,529,334,050.32*	*-187,535,764,980.32*	*136.07*
41423	*Penerimaan Lain-lain*	*0.00*	*91,004,127.44*	*-91,004,127.44*	*#VALUE!*
41431	*Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati*	*0.00*	*483,621,000.00*	*-483,621,000.00*	*#VALUE!*
42	***Dana Perimbangan***	***1,694,744,640,648.00***	***1,711,271,242,511.00***	***-16,526,601,863.00***	***100.98***

421	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	**143,199,349,000.00**	**173,396,948,566.00**	**-30,197,599,566.00**	**121.09**
42101	*Bagi Hasil Pajak*	*122,763,886,000.00*	*138,962,730,155.00*	*-16,198,844,155.00*	*113.20*
42102	*Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam*	*20,435,463,000.00*	*34,434,218,411.00*	*-13,998,755,411.00*	*168.50*
422	**Dana Alokasi Umum**	**1,157,958,587,000.00**	**1,149,801,473,000.00**	**8,157,114,000.00**	**99.30**
42201	*Dana Alokasi Umum*	*1,157,958,587,000.00*	*1,149,801,473,000.00*	*8,157,114,000.00*	*99.30*
423	**Dana Alokasi Khusus**	**393,586,704,648.00**	**388,072,820,945.00**	**5,513,883,703.00**	**98.60**
42301	*Dana Alokasi Khusus*	*59,298,215,000.00*	*42,884,335,429.00*	*16,413,879,571.00*	*72.32*
42302	*Dana Alokasi Khusus Non Fisik*	*334,288,489,648.00*	*345,188,485,516.00*	*-10,899,995,868.00*	*103.26*
43	***Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah***	***831,993,617,736.00***	***901,495,722,796.00***	***-69,502,105,060.00***	***108.35***
431	**Pendapatan Hibah**	**166,463,900,000.00**	**162,996,436,500.00**	**3,467,463,500.00**	**97.92**
43101	*Pendapatan hibah dari Pemerintah*	*0.00*	*3,158,648,500.00*	*-3,158,648,500.00*	*#VALUE!*
43102	*Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur*	*166,463,900,000.00*	*159,837,788,000.00*	*6,626,112,000.00*	*96.02*
433	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya**	**264,780,496,236.00**	**339,339,055,996.00**	**-74,558,559,760.00**	**128.16**
43301	*Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi*	*264,780,496,236.00*	*339,339,055,996.00*	*-74,558,559,760.00*	*128.16*
434	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	**387,744,706,000.00**	**386,155,714,800.00**	**1,588,991,200.00**	**99.59**
43401	*Dana Penyesuaian*	*387,744,706,000.00*	*386,155,714,800.00*	*1,588,991,200.00*	*99.59*
435	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	**13,004,515,500.00**	**13,004,515,500.00**	**0.00**	**100.00**
43501	*Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur*	*13,004,515,500.00*	*13,004,515,500.00*	*0.00*	*100.00*
436	**Pendapatan Lainnya**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#VALUE!**
43602	*Pendapatan Lainnya -LRA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*#VALUE!*
	Jumlah	**4,058,099,090,414.00**	**4,422,599,399,218.15**	**-364,500,308,804.15**	**108.98**
5	**BELANJA**	**5,182,074,462,157.57**	**4,441,673,370,394.65**	**740,401,091,762.92**	**85.71**
51	***Belanja Tidak Langsung***	***2,619,724,799,549.81***	***2,349,232,579,995.94***	***270,492,219,553.87***	***89.67***
511	**Belanja Pegawai**	**1,403,510,590,886.30**	**1,286,795,633,705.61**	**116,714,957,180.69**	**91.68**
51101	*Gaji dan Tunjangan*	*1,048,219,600,987.00*	*973,637,509,919.00*	*74,582,091,068.00*	*92.88*
51102	*Tambahan Penghasilan PNS*	*316,306,893,000.00*	*281,539,884,695.61*	*34,767,008,304.39*	*89.01*
51103	*Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH*	*13,105,625,897.80*	*11,893,946,600.00*	*1,211,679,297.80*	*90.75*
51105	*Insentif Pemungutan Pajak Daerah*	*23,062,200,000.00*	*17,673,143,226.00*	*5,389,056,774.00*	*76.63*
51106	*Insentif pemungutan Retribusi Daerah*	*2,816,271,001.50*	*2,051,149,265.00*	*765,121,736.50*	*72.83*
513	**Belanja Subsidi**	**250,000,000.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00**
51301	*Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga*	*250,000,000.00*	*0.00*	*250,000,000.00*	*0.00*
514	**Belanja Hibah**	**290,233,862,550.00**	**258,000,874,222.00**	**32,232,988,328.00**	**88.89**
51401	*Belanja Hibah Kepada Pemerintah*	*102,352,572,550.00*	*102,352,568,850.00*	*3,700.00*	*100.00*
51404	*Belanja Hibah Kepada Masyarakat*	*161,182,152,000.00*	*129,059,970,472.00*	*32,122,181,528.00*	*80.07*
51405	*Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan*	*25,189,550,000.00*	*25,078,746,900.00*	*110,803,100.00*	*99.56*
51408	*Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*	*1,509,588,000.00*	*1,509,588,000.00*	*0.00*	*100.00*
515	**Belanja Bantuan Sosial**	**92,385,453,000.00**	**86,331,775,000.00**	**6,053,678,000.00**	**93.45**
51501	*Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat*	*12,298,113,000.00*	*11,972,695,000.00*	*325,418,000.00*	*97.35*
51502	*Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan*	*77,087,340,000.00*	*74,310,080,000.00*	*2,777,260,000.00*	*96.40*

51503	*Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan*	*3,000,000,000.00*	*49,000,000.00*	*2,951,000,000.00*	*1.63*
516	**Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	**92,771,858,152.00**	**92,531,238,338.00**	**240,619,814.00**	**99.74**
51603	*Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa*	*84,945,500,000.00*	*84,722,265,404.00*	*223,234,596.00*	*99.74*
51604	*Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*#VALUE!*
51605	*Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa*	*5,598,051,752.00*	*5,580,666,534.00*	*17,385,218.00*	*99.69*
51606	*Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi*	*2,228,306,400.00*	*2,228,306,400.00*	*0.00*	*100.00*
517	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik**	**500,265,955,180.18**	**493,492,244,936.60**	**6,773,710,243.58**	**98.65**
51703	*Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa*	*500,265,955,180.18*	*493,492,244,936.60*	*6,773,710,243.58*	*98.65*
518	**Belanja Tidak Terduga**	**240,307,079,781.33**	**132,080,813,793.73**	**108,226,265,987.60**	**54.96**
51801	*Belanja Tidak Terduga*	*240,307,079,781.33*	*132,080,813,793.73*	*108,226,265,987.60*	*54.96*
52	***Belanja Langsung***	***2,562,349,662,607.76***	***2,092,440,790,398.71***	***469,908,872,209.05***	***81.66***
521	**Belanja Pegawai**	**293,025,497,180.60**	**274,672,203,103.64**	**18,353,294,076.96**	**93.74**
52101	*Honorarium PNS*	*47,065,395,029.00*	*38,043,814,424.00*	*9,021,580,605.00*	*80.83*
52102	*Honorarium Non PNS*	*151,156,926,700.00*	*146,387,199,566.00*	*4,769,727,134.00*	*96.84*
52103	*Uang Lembur*	*1,588,282,000.00*	*887,019,850.00*	*701,262,150.00*	*55.85*
52105	*Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (dialihkan ke blj. barang/jasa)*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*#VALUE!*
52106	*Belanja Pegawai Dana BOS Daerah*	*21,824,442,000.00*	*20,861,118,000.00*	*963,324,000.00*	*95.59*
52107	*Belanja Pegawai BLUD*	*63,498,406,451.60*	*61,668,874,263.64*	*1,829,532,187.96*	*97.12*
52108	*Belanja Pegawai Dana BOS Reguler*	*7,892,045,000.00*	*6,824,177,000.00*	*1,067,868,000.00*	*86.47*
522	**Belanja Barang dan Jasa**	**1,497,967,754,184.95**	**1,298,515,715,895.60**	**199,452,038,289.35**	**86.69**
52201	*Belanja Bahan Pakai Habis*	*89,305,336,699.00*	*73,915,658,684.00*	*15,389,678,015.00*	*82.77*
52202	*Belanja Bahan/Material*	*40,239,820,750.00*	*28,766,548,661.00*	*11,473,272,089.00*	*71.49*
52203	*Belanja Jasa Kantor*	*245,077,609,658.00*	*218,502,692,456.00*	*26,574,917,202.00*	*89.16*
52204	*Belanja Premi Asuransi*	*53,391,575,004.00*	*39,295,525,112.00*	*14,096,049,892.00*	*73.60*
52205	*Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor*	*13,174,638,988.00*	*9,440,509,272.00*	*3,734,129,716.00*	*71.66*
52206	*Belanja Cetak dan Penggandaan*	*14,749,591,904.00*	*12,316,640,081.00*	*2,432,951,823.00*	*83.50*
52207	*Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir*	*4,389,246,051.00*	*2,966,997,422.00*	*1,422,248,629.00*	*67.60*
52208	*Belanja Sewa Sarana Mobilitas*	*450,940,200.00*	*281,482,000.00*	*169,458,200.00*	*62.42*
52209	*Belanja Sewa Alat Berat*	*68,019,000.00*	*10,605,000.00*	*57,414,000.00*	*15.59*
52210	*Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor*	*4,399,569,000.00*	*3,136,297,182.00*	*1,263,271,818.00*	*71.29*
52211	*Belanja Makanan Dan Minuman*	*47,182,367,572.00*	*33,995,519,289.00*	*13,186,848,283.00*	*72.05*
52212	*Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya*	*749,177,500.00*	*643,665,250.00*	*105,512,250.00*	*85.92*
52213	*Belanja Pakaian Kerja/Perlengkapan Kerja Lapangan*	*2,750,297,410.00*	*2,144,900,980.00*	*605,396,430.00*	*77.99*
52214	*Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu*	*356,750,000.00*	*309,300,000.00*	*47,450,000.00*	*86.70*
52215	*Belanja Perjalanan Dinas*	*113,445,763,624.37*	*67,798,079,796.00*	*45,647,683,828.37*	*59.76*
52216	*Belanja Beasiswa Pendidikan PNS*	*250,000,000.00*	*150,000,000.00*	*100,000,000.00*	*60.00*
52217	*Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis*	*9,635,606,338.00*	*6,934,778,001.00*	*2,700,828,337.00*	*71.97*

52220	Belanja Pemeliharaan	80,588,467,607.00	66,954,574,187.00	13,633,893,420.00	83.08
52221	Belanja Jasa Konsultansi	24,483,787,490.00	20,672,456,099.00	3,811,331,391.00	84.43
52222	Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Daerah	40,824,703,000.00	39,562,094,675.00	1,262,608,325.00	96.91
52223	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49,857,575,183.00	37,501,533,412.00	12,356,041,771.00	75.22
52224	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga	373,500,000.00	370,865,000.00	2,635,000.00	99.29
52225	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan	290,000,000.00	178,430,000.00	111,570,000.00	61.53
52226	Belanja Penyedia Jasa	30,237,319,750.00	27,310,187,240.00	2,927,132,510.00	90.32
52227	Belanja barang dan jasa BLUD	443,240,096,900.58	426,154,753,082.60	17,085,343,817.98	96.15
52228	Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat	17,315,311,160.00	16,086,401,310.00	1,228,909,850.00	92.90
52229	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16,376,459,552.00	11,384,175,624.00	4,992,283,928.00	69.52
52230	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4,102,225,000.00	3,867,300,000.00	234,925,000.00	94.27
52231	Belanja Khusus Pengawasan	132,421,300.00	70,000,000.00	62,421,300.00	52.86
52232	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Reguler	146,847,877,544.00	144,214,146,080.00	2,633,731,464.00	98.21
52233	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	2,442,200,000.00	2,351,600,000.00	90,600,000.00	96.29
52234	Belanja rumah tangga KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD	1,239,500,000.00	1,228,000,000.00	11,500,000.00	99.07
523	**Belanja Modal**	**771,356,411,242.21**	**519,252,871,399.47**	**252,103,539,842.74**	**67.32**
52301	Belanja Modal Pengadaan Tanah	86,154,623,308.00	21,840,061,455.00	64,314,561,853.00	25.35
52302	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	2,107,218,500.00	1,268,509,000.00	838,709,500.00	60.20
52303	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	26,304,516,500.00	22,892,503,000.00	3,412,013,500.00	87.03
52304	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1,264,100,400.00	269,300,300.00	994,800,100.00	21.30
52305	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	250,000,000.00	214,390,990.00	35,609,010.00	85.76
52308	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	191,284,775.00	163,586,150.00	27,698,625.00	85.52
52309	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	131,570,400.00	125,314,050.00	6,256,350.00	95.24
52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9,725,028,772.00	6,022,137,235.00	3,702,891,537.00	61.92
52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,889,496,790.00	4,124,298,926.00	765,197,864.00	84.35
52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,289,957,925.00	16,255,042,163.00	2,034,915,762.00	88.87
52313	Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur	10,027,038,138.00	9,394,754,600.00	632,283,538.00	93.69
52314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	293,863,700.00	279,186,840.00	14,676,860.00	95.01
52315	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga/Gedung Kantor/Gudang	114,286,000.00	105,170,000.00	9,116,000.00	92.02
52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,578,874,815.00	5,138,386,998.00	2,440,487,817.00	67.80
52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	366,485,600.00	209,312,500.00	157,173,100.00	57.11
52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1,324,960,200.00	1,074,772,933.00	250,187,267.00	81.12
52319	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	16,199,512,604.00	11,456,399,230.00	4,743,113,374.00	70.72
52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	9,360,900,490.00	8,281,183,726.00	1,079,716,764.00	88.47
52321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	125,832,047,453.00	69,059,605,437.00	56,772,442,016.00	54.88
52322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	10,408,437,568.00	8,146,494,680.00	2,261,942,888.00	78.27

52323	*Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air*	*41,529,270,760.00*	*33,984,272,989.00*	*7,544,997,771.00*	*81.83*
52324	*Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota*	*40,947,753,749.00*	*22,179,738,922.00*	*18,768,014,827.00*	*54.17*
52325	*Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon*	*2,291,864,900.00*	*2,025,229,831.00*	*266,635,069.00*	*88.37*
52326	*Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan*	*162,448,068,965.00*	*105,322,853,162.00*	*57,125,215,803.00*	*64.83*
52327	*Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan*	*793,900,475.00*	*749,086,218.00*	*44,814,257.00*	*94.36*
52329	*Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman*	*468,800,000.00*	*0.00*	*468,800,000.00*	*0.00*
52330	*Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan*	*1,216,000.00*	*1,200,000.00*	*16,000.00*	*98.68*
52331	*Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga*	*1,736,815,242.00*	*1,618,626,322.00*	*118,188,920.00*	*93.20*
52332	*Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian*	*46,200,000.00*	*45,100,000.00*	*1,100,000.00*	*97.62*
52336	*Belanja Modal BLUD*	*150,319,293,142.21*	*132,120,424,798.47*	*18,198,868,343.74*	*87.89*
52337	*Belanja Modal Dana Bos Daerah*	*18,845,599,000.00*	*18,087,166,250.00*	*758,432,750.00*	*95.98*
52338	*Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah*	*9,000,000.00*	*9,000,000.00*	*0.00*	*100.00*
52339	*Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*#VALUE!*
52340	*Belanja Modal BOSREG*	*21,039,425,071.00*	*16,725,522,694.00*	*4,313,902,377.00*	*79.50*
52341	*Belanja Modal Pengadaan alat-alat perikanan*	*65,000,000.00*	*64,240,000.00*	*760,000.00*	*98.83*
	Jumlah	**5,182,074,462,157.57**	**4,441,673,370,394.65**	**740,401,091,762.92**	**85.71**
	Surplus/Defisit	**(1,123,975,371,743.57)**	**(19,073,971,176.50)**	**(1,104,901,400,567.07)**	**95.93**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**1,123,975,371,743.57**	**1,125,220,244,892.32**	**(1,244,873,148.75)**	**99.03**
61	***Penerimaan Pembiayaan Daerah***	***1,136,075,371,743.57***	***1,131,115,244,892.32***	***4,960,126,851.25***	***99.56***
611	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	**1,128,475,371,743.57**	**1,128,475,371,743.57**	**0.00**	**100.00**
61101	*Pelampauan Penerimaan PAD*	*-18,525,878,046.11*	*-18,189,851,140.51*	*-336,026,905.60*	*98.19*
61102	*Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan*	*-28,526,658,674.00*	*-28,526,658,674.00*	*0.00*	*100.00*
61103	*Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah*	*96,772,404,448.80*	*96,436,377,543.20*	*336,026,905.60*	*99.65*
61104	*Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainya*	*1,078,402,094,529.61*	*1,078,402,094,529.61*	*0.00*	*100.00*
61107	*Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah*	*-6,471,590,514.73*	*-6,471,590,514.73*	*0.00*	*100.00*
61108	*Sisa Penghematan Pengeluaran Pembiayaan Daerah*	*6,825,000,000.00*	*6,825,000,000.00*	*0.00*	*100.00*
617	**Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir**	**7,600,000,000.00**	**2,639,873,148.75**	**4,960,126,851.25**	**34.74**
61701	*Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir*	*7,600,000,000.00*	*2,639,873,148.75*	*4,960,126,851.25*	*34.74*
62	***Pengeluaran Pembiayaan daerah***	***12,100,000,000.00***	***5,895,000,000.00***	***6,205,000,000.00***	***48.72***
622	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	**12,100,000,000.00**	**5,895,000,000.00**	**6,205,000,000.00**	**48.72**
62202	*Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*	*4,500,000,000.00*	*4,500,000,000.00*	*0.00*	*100.00*
62204	*Dana Bergulir*	*7,600,000,000.00*	*1,395,000,000.00*	*6,205,000,000.00*	*18.36*
	Jumlah	**1,123,975,371,743.57**	**1,125,220,244,892.32**	**(1,244,873,148.75)**	**99.03**
	Pembiayaan	**1,123,975,371,743.57**	**1,125,220,244,892.32**	**(1,244,873,148.75)**	**99.03**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0.00**	**1,106,146,273,715.82**	**(1,106,146,273,715.82)**	**96.27**

Lampiran 10

PERNYATAAN REVIEW LPPD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2020

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Sidoarjo, 30 Maret 2021

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO INSPEKTORAT DAERAH

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700926 199003 1 005

Lampiran 11

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2020

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa informasi Capaian Akuntabilitas kinerja telah disajikan secara andal, akurat, dan berkualitas

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Sidoarjo, 30 Maret 2021

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO INSPEKTORAT DAERAH

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700926 199003 1 005